

Kata Pengantar

Salam Sejahtera



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020 ini dapat disusun dengan baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan semua instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah mewujudkan akuntabilitas Balai Besar POM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM. Disamping itu, melalui pelaporan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dan bagaimana proses pencapaiannya.

Fungsi utama Laporan Kinerja adalah :

pertama, merupakan sarana bagi BBPOM di Banjarmasin untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan POM dan seluruh stakeholder (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat), dan

kedua, merupakan sarana untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banjarmasin periode tahun 2020–2024. Oleh karena itu pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dan Badan POM selaku induk organisasi.

Banjarmasin, 19 Februari 2021

Plt. Kepala Balai Besar POM

di Banjarmasin,



Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. BBPOM di Banjarmasin sebagai salah satu di antaranya juga membuat laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan POM dan para pemangku kepentingan (**stakeholders**), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin dan upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 ditetapkan dengan SK Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin HK.02.02.109.05.20.1728 tanggal 18 Mei 2020, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Terdapat 11 sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin yang diturunkan dari Sasaran strategis dari peta strategi level 0 Kepala Badan POM, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 91,95 (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat: target 80,8 ; realisasi 78,05 ; capaian kinerja 96,60% (**Baik**)
 - b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : target 78 % ; realisasi 81,54% ; capaian

kinerja 104,54 % (**Baik**)

- c. Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan : target 94,00% ; realisasi 68,77% ; capaian kinerja 73,16% (**Cukup**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : target 85,00% ; realisasi 79,46% ; capaian kinerja 93,48% (**Baik**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 104,45% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 68,00% ; realisasi 78,36% ; capaian kinerja 115,24% (**Sangat Baik**)
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin , pada tahun 2020 memperoleh NPS 106,17% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 61,00 ; realisasi 69,67 ; capaian kinerja 114,21% (**Sangat Baik**)
 - b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 72 ; realisasi 76,11 ; capaian kinerja 105,71% (**Baik**)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 88,5 ; realisasi 89,18; capaian kinerja 100,77% (**Baik**)

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 109,80% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- a. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan : target 87% ; realisasi 814,64% ; capaian kinerja 93,84% (**Baik**)
 - b. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 55% ; realisasi 53,52% ; capaian kinerja 97,31% (**Baik**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 55% ; realisasi 53,52% ; capaian kinerja 97,31% (**Sangat Baik**)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : target 20% ; realisasi 36,59% ; capaian kinerja 182,93% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dalam perhitungan NPS disesuaikan menjadi 120% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan : target 55% ; realisasi 59,96% ; capaian kinerja 97,31% (**Baik**)
 - f. Indeks Pelayanan Publik : target 3,11 ; realisasi 3,69 ; capaian kinerja 109,02% (**Baik**)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 109,80% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 83,73% ; realisasi 88,8% ; capaian kinerja 106,05% (**Baik**)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman : target 16 ; realisasi 16 ; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - c. Jumlah desa pangan aman : target 4 ; realisasi 4 ; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya : target 2 ; realisasi 2 ; capaian kinerja 100% (**Baik**)

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 107,60% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar : target 90% ; realisasi 97,27% ; capaian kinerja 108,08% (**Baik**)
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar : target 90% ; realisasi 96,41 ; capaian kinerja 107,12% (**Baik**)

7. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2020 memperoleh NPS 110,73% (**Sangat Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :

- a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan : target 81% ; realisasi 89,69% ; capaian kinerja 110,73% (**Sangat Baik**)
8. Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif, pada tahun 2020 memperoleh NPS 91,16% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin : target 85% ; realisasi 74,08% ; capaian kinerja 87,15% (**Baik**)
 - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin : target 80% ; realisasi 76,14% ; capaian kinerja 95,18% (**Baik**)
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada tahun 2020 memperoleh NPS 106,88% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin : target 75 ; realisasi 80,16% ; capaian kinerja 106,88% (**Baik**)
10. Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan, pada tahun 2020 memperoleh NPS 104,21% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP : target 76% ; realisasi 67,2% ; capaian kinerja 88,42% (**Cukup**)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal : target 1,51 ; realisasi 1,82 ; capaian kinerja 120,53% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dalam perhitungan NPS disesuaikan menjadi 120% (**Sangat Baik**)

11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada tahun 2020 memperoleh NPS 104,46% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :

- a. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin : target 93% ; realisasi 90,96% ; capaian kinerja 97,81% (**Cukup**)
- b. Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar BPOM di Banjarmasin : target Efisien (90%) ; realisasi Efisien (100%) ; capaian kinerja 111,11% (**Sangat Baik**)

Pagu anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 sesuai DIPA nomor Nomor : SP DIPA-063.01.2.432881/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp. 53.402.305.000,-. Pada bulan April 2020, dilakukan refocussing anggaran melalui APBNP 2020, untuk penanganan Pandemi COVID-19, dimana pagu anggaran tersebut dipotong lebih kurang 50% yaitu sebesar Rp. 26.697.470.000,- , sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp. 26.704.835.000,-. Realisasi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 24.982.811.972,- atau 93,55%

Hasil pengukuran tingkat efisiensi, Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,13 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0.13 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 11 Sasaran Kinerja dan 28 Indikator Kinerja, dimana 9 dari 11 Sasaran Kinerja dan 20 dari 28 Indikator Kinerja tersebut memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018
hal

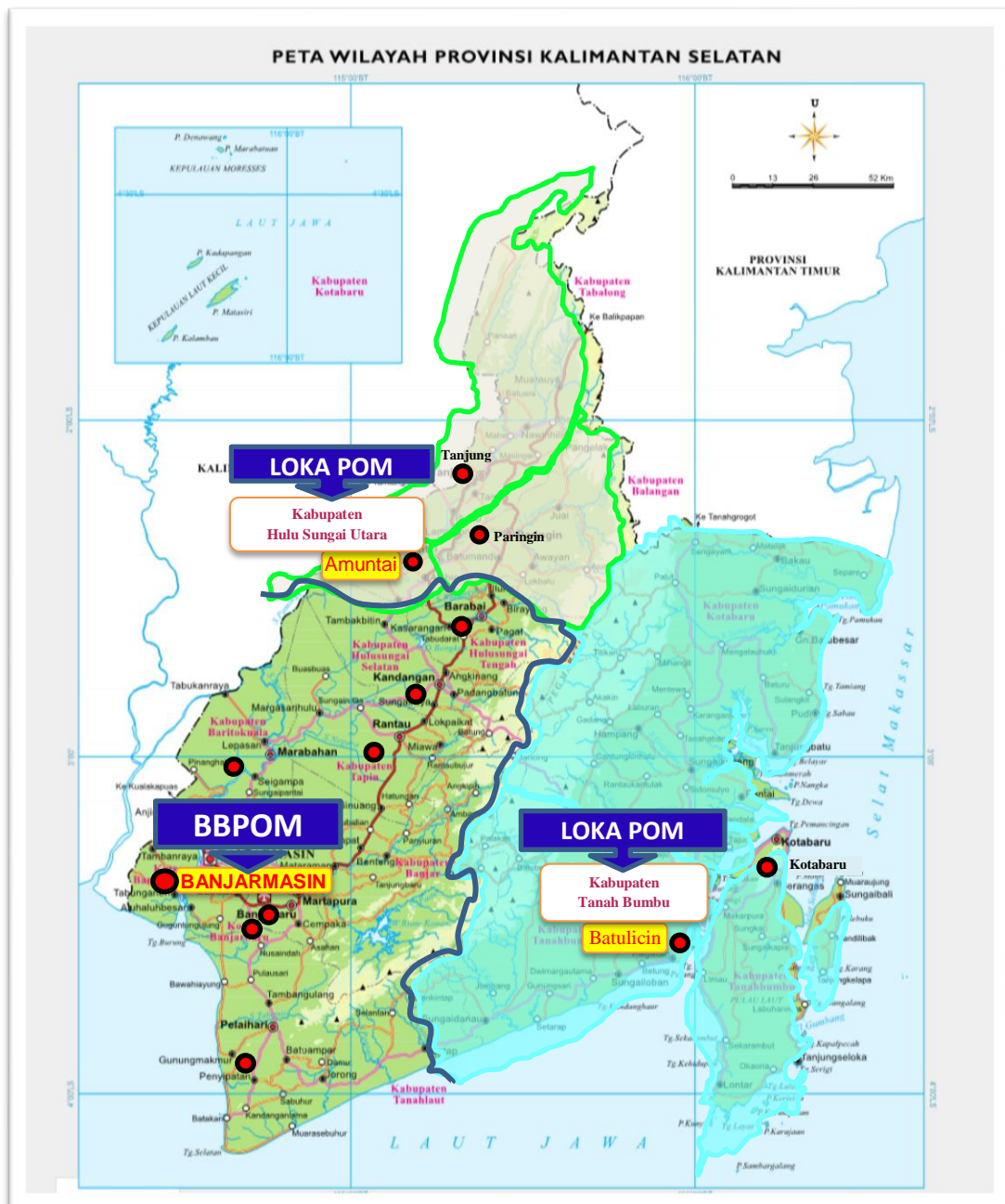
Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat yang mengkoordinir 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah kerja 3 kabupaten dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kerja 2 kabupaten. Wilayah kerja tersebut diantaranya :

Tabel 1.1

**Wilayah kerjas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab.
Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu**

Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah kerja
Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	1. Kota Banjarmasin, 2. Kota Banjarbaru, 3. Kabupaten Banjar, 4. Kabupaten Tanah Laut, 5. Kabupaten Barito Kuala, 6. Kabupaten Tapin, 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2. Kabupaten Balangan, 3. Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	1. Kabupaten Tanah Bumbu, 2. Kabupaten Kota Baru



Gambar 1.1

Peta wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang

pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.2 Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM baru (Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat

terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitas (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan.
Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang

meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

- a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan KIE kepada masyarakat.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
 - 11) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang

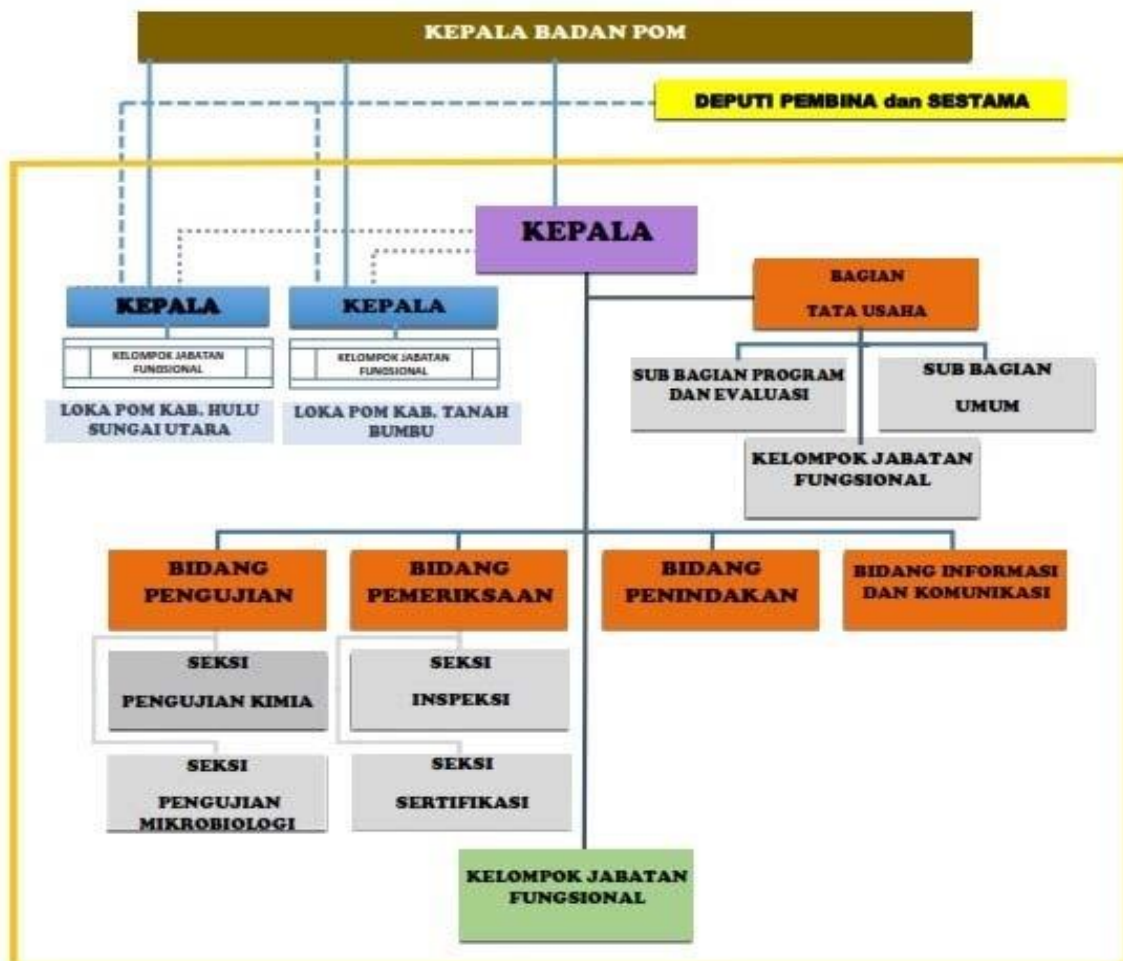
Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 12) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 13) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 14) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 15) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 16) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

- 17) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.
- 18) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 19) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 20) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 21) Bermula dari merebaknya virus Corona jenis baru (SARS-CoV-2),

yang disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), di dataran negeri Tiongkok tepatnya di provinsi Wuhan pada akhir 2019, seluruh negara di dunia seolah diterpa krisis besar. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini juga berpengaruh pada negara kita. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Konferensi Pers di Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Menyusul pernyataan tersebut, Kementerian Keuangan juga mulai menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) yang kemudian menjadi pedoman seluruh Eselon I untuk menerapkan kebijakan serupa hingga unit layanan terkecil di daerah.

1.3 Struktur Organisasi



Bidang Pengujian

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Kimia ; Tugas : melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Mikrobiologi ; Tugas : melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Seksi Inspeksi ; Tugas: melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi Tugas: melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Tata Usaha

Tugas: Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Program & Evaluasi Tugas: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Umum Tugas: melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3.1 Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan

sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai **74,1%**. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi **55,7%**, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

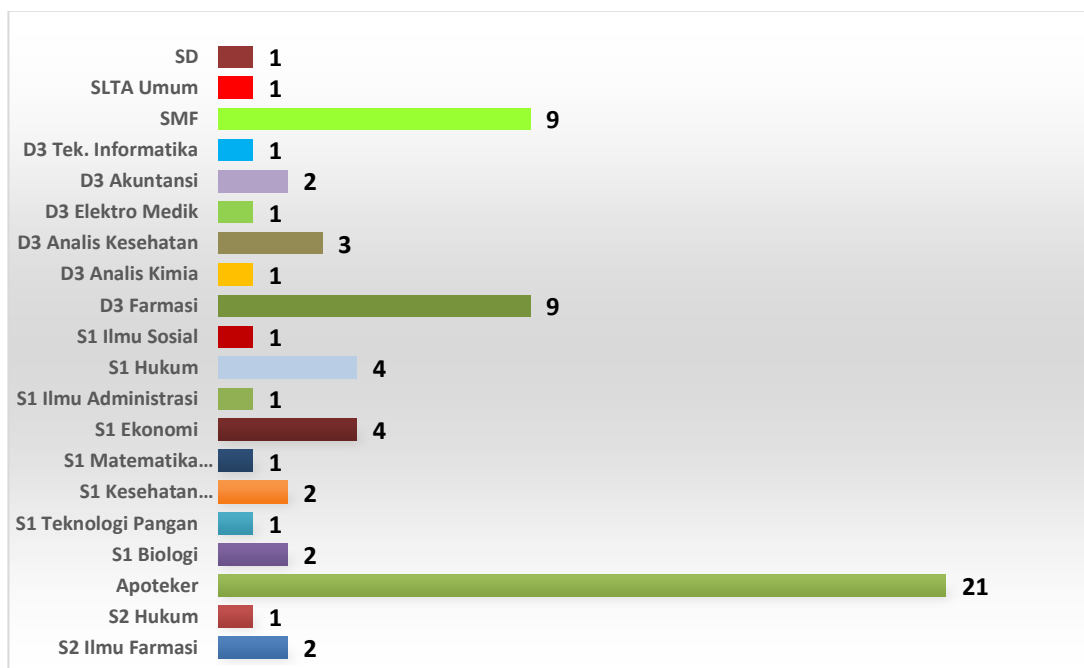
Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM yang baru. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM

yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2020 adalah sejumlah 64 orang.

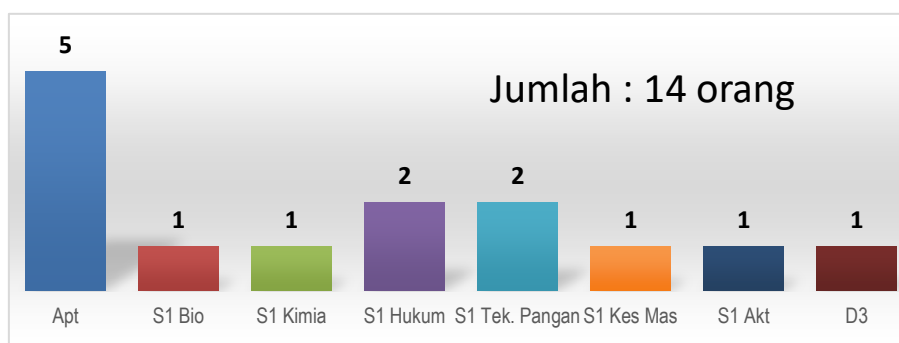
Adapun jumlah pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada grafik dibawah. Pada penerimaan CPNS tahun 2019 dialokasikan untuk BBPOM di Banjarmasin sebanyak 3 orang.

2. Sumber Daya Manusia

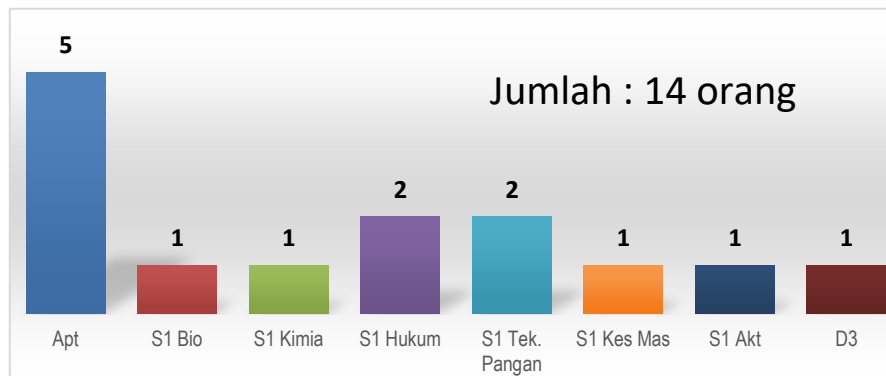


Grafik 1.1

Profil Pegawai BBPOM di Banjarmasin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Grafik 1.2
Profil Pegawai Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Grafik 1.3
Profil Pegawai Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM baru bersumber dari APBN sesuai revisi DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2020 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2020 sebesar **Rp. 26.704.835.000** (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

1.3.2 Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke

Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berikut adalah data-data hasil survei BPS yang diperlukan untuk pengawasan maupun melaksanakan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)
KALIMANTAN SELATAN	4.182.695
TANAH LAUT	339.195
KOTABARU	336.719
BANJAR	580.026
BARITO KUALA	310.016
TAPIN	189.081
HULU SUNGAI SELATAN	235.217
HULU SUNGAI TENGAH	269.384
HULU SUNGAI UTARA	234.604
TABALONG	250.809
TANAH BUMBU	351.673
BALANGAN	129.505
KOTA BANJARMASIN	700.869
KOTA BANJAR BARU	255.597

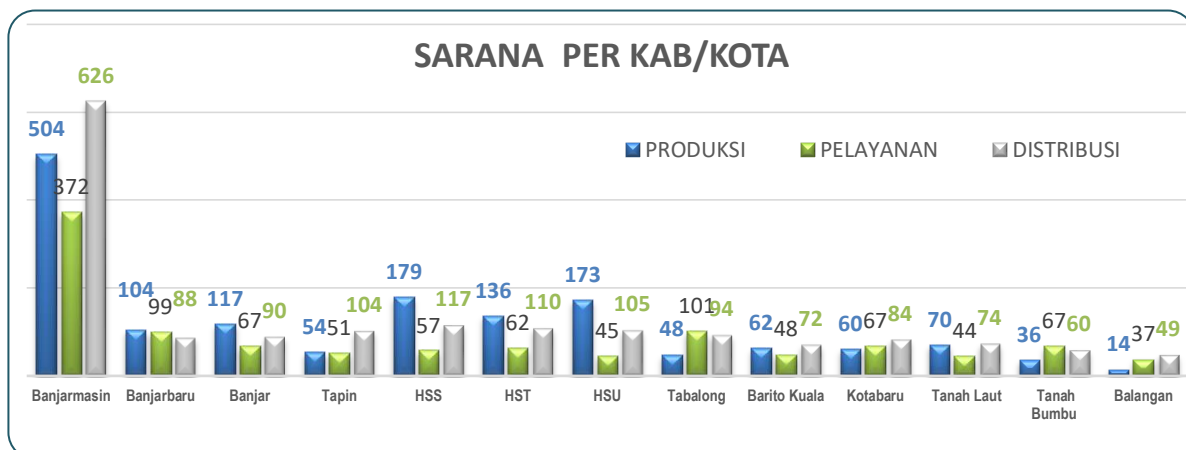
3. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2018 berjumlah 5.281 sarana, yang terdiri dari 1.551 sarana produksi, 2.607 sarana distribusi dan 1.117 sarana pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	43	1.152	1.152
Pangan MD	28	894	-	922
Kosmetika	10	388	-	398
Bahan Berbahaya	-	4	-	4
Obat Tradisional	6	298	-	304
Suplemen Makanan	-	298	-	298
JUMLAH	44	1.925	1.152	2.821
PIRT	1.507			1.507

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 34,45%, sisanya tersebar hampir merata di 12 Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:



Grafik 1.4

Jumlah Sarana per Kabupaten/Kota

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Badan POM :

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan

Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

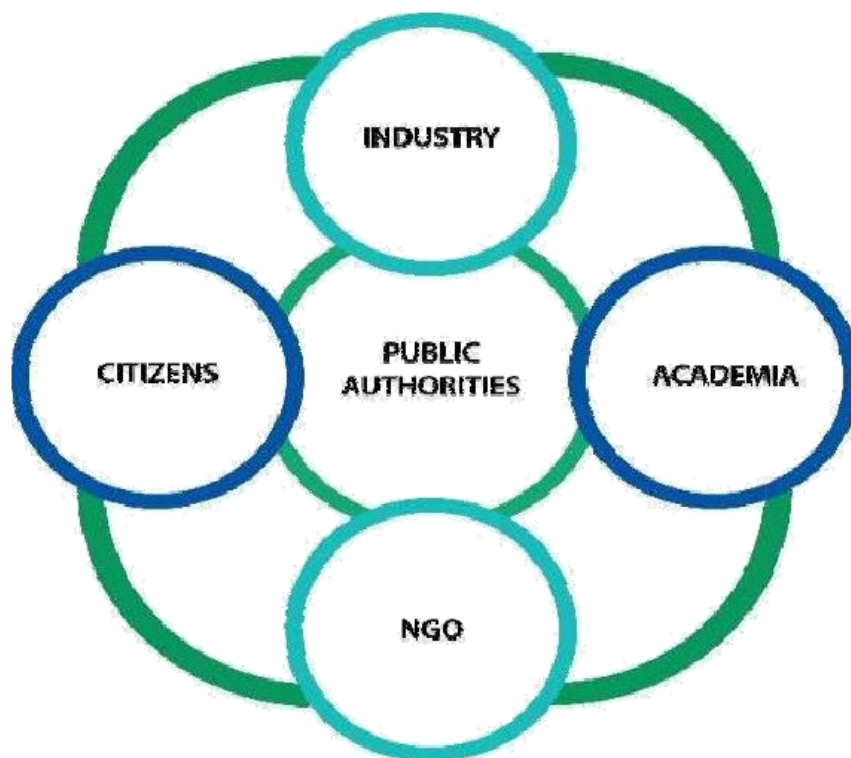
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional

Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh

secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui

inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

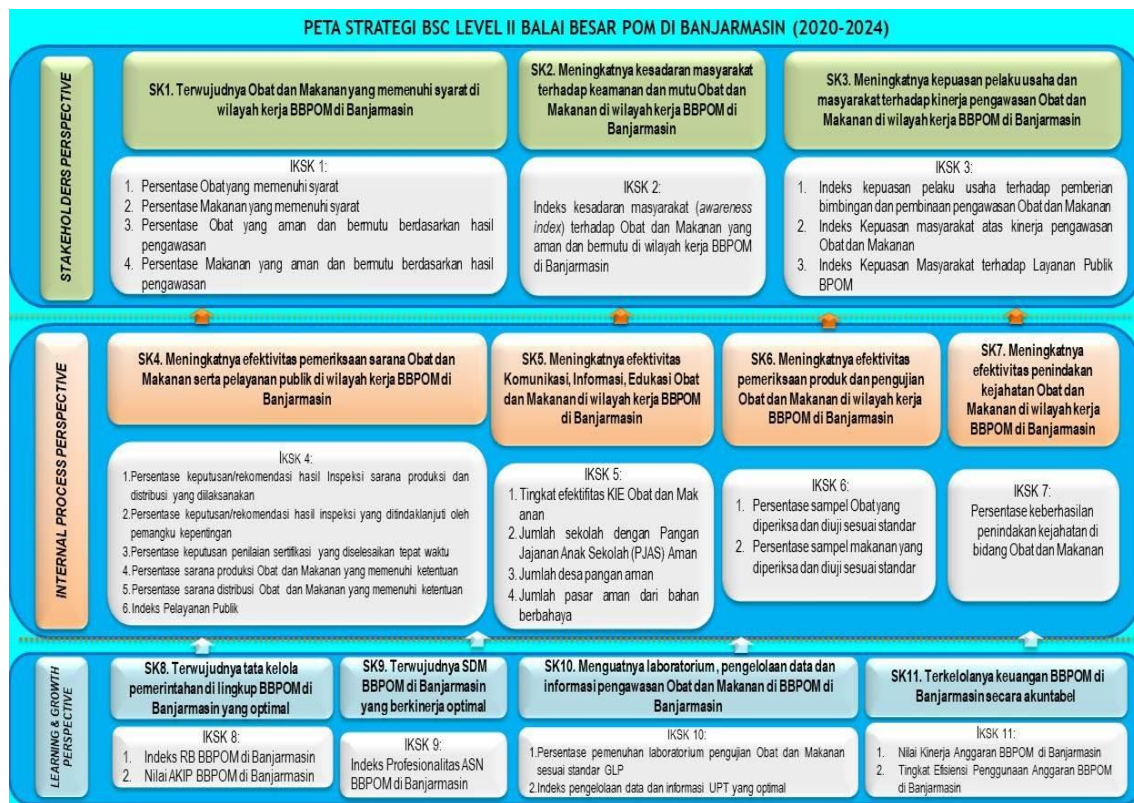
terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran

Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM d Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang	IKSK 8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		optimal		
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata

rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita

untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024.**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan

Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 81 di akhir tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92 di akhir tahun 2024.**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 83 di akhir tahun 2024.**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik**

Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu

melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 90% di tahun 2024.**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 24% di tahun 2024.**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024.**
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat)

masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90,64% di tahun 2024.**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 22 di akhir tahun 2024.**
- 3) Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 di akhir tahun 2024.**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 2 di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu

disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90 di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal,

peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 95 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar

POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 85 % di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian

halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 80% di tahun 2024.**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke -11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- i. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 97 di tahun 2024.
- ii. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Tabel 2.2 Perianian Kineria Tahun 2020

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder	SK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
	SK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu *)	68
	SK 3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan *)	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin*)	88,5
	Internal	SK 4	Persentase keputusan/rekomendasi

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Process		hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin*)	3,11
	SK 5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,3
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	16
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	4
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin*)	2
	SK 6	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin*)	90
	SK 7	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81
	Learning and Growth	SK 8	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin *)
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	SK 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin*)	75
	SK 10	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal *)	1,51
	SK 11	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)

*) Diukur pada akhir tahun



Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM baru bersumber dari APBN sesuai revisi DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2020 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2020 sebesar **Rp. 26.704.835.000** (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing -

masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja SOTK Baru:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja .

Dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi di tahun 2020, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019, dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target nasional 2020, target Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 sebagai tahun yang sedang dijalani dan tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kemudian dibandingkan juga capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2020 dari 3 (tiga) Balai Besar/ Balai POM lainnya yang tergabung dalam Klaster 6, yaitu Balai Besar POM di Serang, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang.

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja tahun 2020, diperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Total yang dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 104,51 dengan kriteria Baik, yang merupakan rata-rata dari 3 (tiga) Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif, yaitu :

No.	Perspektif	Nilai	Kriteria
1	<i>Stakeholder</i>	104,45	Baik
2	<i>Internal Process</i>	107,41	Baik
3	<i>Learning and Growth</i>	101,68	Baik
	Total	104,51	Baik

Tabel 3.1

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif - BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatannya masing-masing, yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
A	Perspektif <i>Stakeholder</i>		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,95	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	115,24	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	106,17	Baik
NPS Perspektif <i>Stakeholder</i>		104,45	Baik
B	Perspektif <i>Internal Process</i>		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	109,80	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	101,51	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	107,60	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	110,73	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
	NPS Perspektif <i>Internal Process</i>	104,45	Baik
C	Perspektif <i>Learn and Growth</i>		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	91,16	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	106,88	Baik
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	104,21	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	104,46	Baik
	NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i>	101,68	Baik
	NPS Total	104,51	Baik

Tabel 3.2
Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan
BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020

Kemudian Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran xx dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan penyesuaian hasil perhitungan NPS secara manual menggunakan martiks capaian RAPK dengan batas tertinggi NPS adalah 120%.

Dari 28 Indikator Kinerja (IK) yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin, terdapat 3 IKU dengan NPS yang melebihi 120%, yaitu IKSK11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin (121,72%),

IKSK12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (182,95%), dan IKS26 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal (120,58%).

Untuk tingkat Sasaran Kegiatan (SK), yang memperoleh NPS lebih dari 120% adalah SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin (120,58%), sedangkan pada tingkat Perspektif semua NPS di bawah 120%.

Berikut Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Balai Besar/ Balai POM yang tergabung dalam Klaster 6 :

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Balai Besar POM di Banjarmasin	Balai Besar POM di Serang	Balai POM di Kendari	Balai POM di Kupang
A	Perspektif <i>Stakeholder</i>				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	91,95	97,18	116,91	101,23
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	115,24	120,00	106,76	96,35
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	106,17	103,90	95,77	96,02
	NPS Perspektif <i>Stakeholder</i>	104,45	107,03	106,48	97,87
B	Perspektif <i>Internal Process</i>				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	109,80	110,56	101,86	101,65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	101,51	101,40	101,15	101,14

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Balai Besar POM di Banjarmasin	Balai Besar POM di Serang	Balai POM di Kendari	Balai POM di Kupang
	di wilayah kerja UPT				
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	107,60	115,96	112,48	106,31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	110,73	115,38	113,64	120,00
	NPS Perspektif <i>Internal Process</i>	107,41	110,83	107,28	107,27
C	Perspektif <i>Learn and Growth</i>				
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	91,16	97,80	90,77	83,85
9	Terwujudnya SDM UPT	106,88	112,48	110,40	113,76
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	104,21	114,50	95,65	103,94
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	104,46	106,11	104,72	103,90
	NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i>	101,68	107,72	100,39	101,36
	NPS Total	104,51	108,53	104,72	102,17

Tabel 3.3
Perbandingan Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2020 seluruh Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6 memperoleh NPS yang Baik dengan rata-rata 105,34%. Balai Besar POM di Banjarmasin berada di posisi ketiga setelah Balai Besar POM di Kupang dan Balai POM di Kendari, dan disusul Balai POM di Kupang di posisi keempat. Data NPS

lebih lengkap dari keempat Besar/ Balai POM dalam Klaster 6, dapat dilihat dari tabel pada lampiran xx dalam laporan ini.

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Balai Besar POM di Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas belum optimal dan masih jauh dari kriteria yang diharapkan yaitu Sangat Baik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020.

3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, nomor HK.02.02.109.05.20.1728 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin, yang mengacu kepada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Besar POM di Banjarmasin (level 2) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) level 0 Kepala

Badan POM, dimana pada tiap Sasaran Kegiatan terdapat satu atau lebih Indikator Kinerja, dengan jumlah seluruhnya 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2020, capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,60	Baik
		IKSK 02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,54	104,54	Baik
		IKSK 03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	Cukup
		IKSK 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03	Sangat Baik
		IKSK 07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71	Baik
		IKSK 08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 09	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84	Baik
		IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	55	53,52	97,31	Baik
		IKSK 11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	82	99,81	121,72	Sangat Baik
		IKSK 12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,93	Sangat Baik
		IKSK 13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	Baik
		IKSK 14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06	Baik
		IKSK 16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16,00	100,00	Baik
		IKSK 17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00	Baik
		IKSK 18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	Baik
		IKSK 20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK 21	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	Sangat Baik
Learning & Growth Perspective							
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK 22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15	Baik
		IKSK 23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88	Baik
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	Cukup
		IKSK 26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81	Baik
		IKSK 28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100,00	111,11	Sangat Baik

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas Analisis Akuntabilitas Kinerjanya adalah sebagai berikut :



Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu

:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
1.1**

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

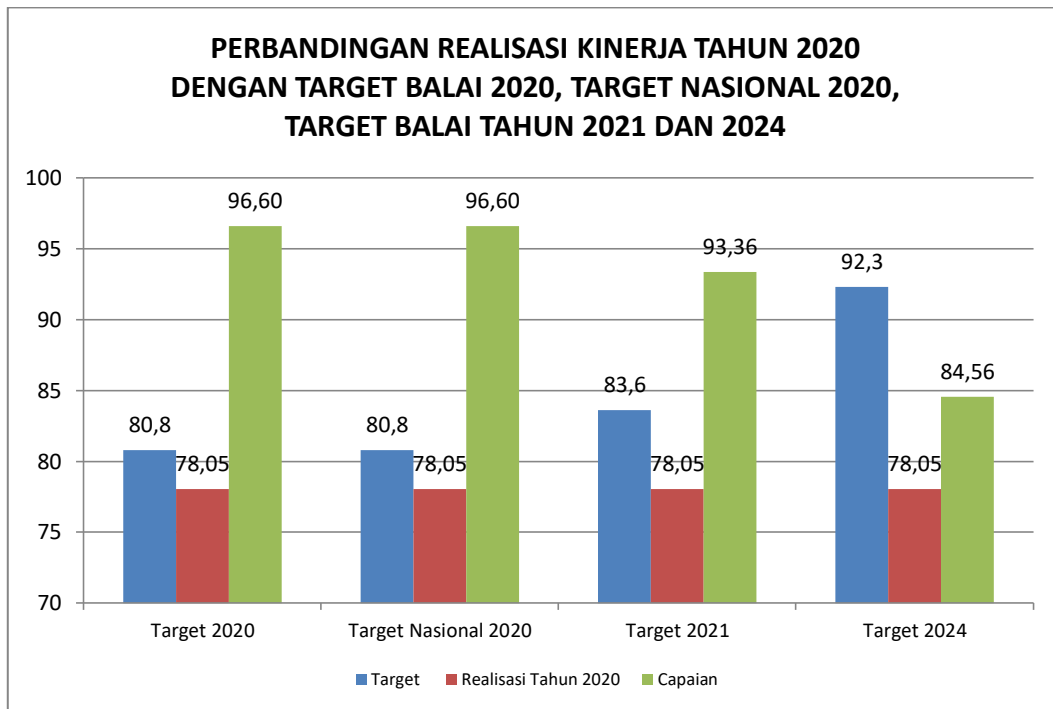
Target	Realisasi	Capaian	Status
80,8	78,05	96,60	Baik

Definisi “Obat” pada tahun 2020 mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017, dan terdapat perubahan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu selain hasil ujinya tidak memenuhi syarat, obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dalam pemenuhan label walaupun memenuhi syarat dalam hasil uji juga dikategorikan TMS. Obat tanpa izin edar, telah kedaluarsa atau rusak juga tetap disampling meskipun tidak diuji, dan obat dengan kategori ini

disimpulkan TMS sehingga berpengaruh terhadap realisasi Obat yang Memenuhi Syarat.

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2018) karena adanya perubahan Indikator Kinerja beserta Definisi Operasional (DO) nya pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024. Selain itu, dari metode sampling yang digunakan, pada tahun 2018 dan 2019 tidak dibedakan metode sampling yang digunakan (baik acak maupun *targeted*), sedangkan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini hanya memperhitungkan sampel acak.

Apabila dibandingkan terhadap target Nasional, capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini sama dengan capaian terhadap target Balai (96,6%) karena target Balai Besar POM di Banjarmasin dan target Nasional sama yaitu 80,8%. Sementara itu, apabila dibandingkan terhadap target akhir RPJM tahun 2024 yang sebesar 80,8%, maka capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 84,56% dengan kriteria Cukup.



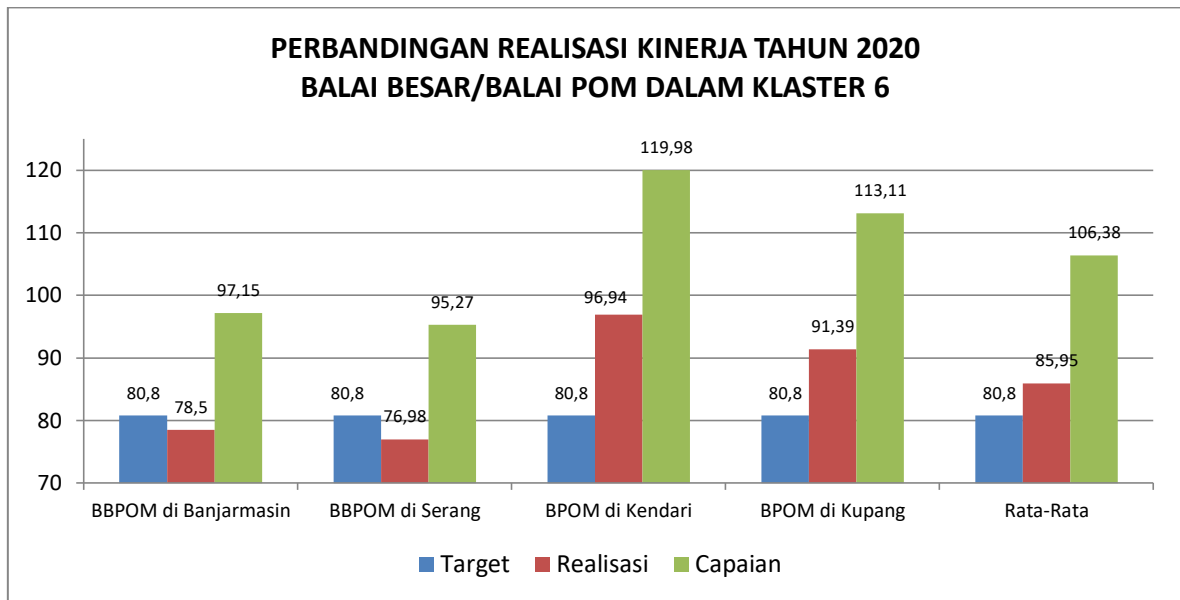
Grafik 3.1

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

IKSK1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Ini menunjukkan bahwa Obat yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin belum memenuhi target Obat yang Memenuhi Syarat untuk beredar di masyarakat sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin perlu meningkatkan pengawasan di bidang Obat.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target, realisasi dan capaian kinerja dari Balai Besar/ Balai POM yang tergabung dalam Klaster 6, dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6 Tahun 2020
IKSK1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6, capaian Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi dari capaian BPOM di Serang (95.27%), namun lebih rendah dari capaian BPOM di Kendari (119.98%) dan BPOM di Kupang (113,11%). Perbedaan ini dapat terjadi karena peredaran obat yang tidak memenuhi syarat sangat dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha yang belum menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta proses distribusi obat / Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) hingga diterima oleh konsumen juga dapat mempengaruhi mutu dari obat, kosmetik maupun obat tradisional yang sudah diproduksi.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020, Balai Besar POM di

Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,99 %, dengan capaian kinerja sebesar 97,15 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,03 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75 % (tidak efisien). Hal ini menunjukkan bahwa yang diperlukan untuk dapat mencapai tingkat efisiensi anggaran, maka Persentase Obat yang Memenuhi Syarat harus tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,15 %	99,99 %	0,97	-0,03	75%

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK1.1.Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Obat yang Memenuhi syarat pada tahun 2020 antara lain :

1. Kegiatan inspeksi terhadap sarana produksi Obat tradisional dan kosmetik yang dilakukan untuk menilai terhadap pemenuhan aspek Cara Pembuatan yang Baik, selain itu juga untuk melakukan penilaian terhadap label kemasan. Selain bersifat sidak, kegiatan inspeksi juga berorientasi pada pembinaan kepada pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan pemenuhan aspek Cara Pembuatan yang Baik yang pada akhirnya memberikan dampak secara tidak langsung terhadap mutu/keamanan produk.

2. Sosialisasi terhadap pelaku usaha dalam rangka pemenuhan aspek Cara Distribusi yang Baik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah kerusakan mutu obat di sepanjang jalur distribusi tetap baik sampai ketangan konsumen.

Meskipun kriteria ketercapaian indikator kinerja Presentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Baik, namun masih perlu peningkatan capaian karena realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan/program yang mendukung capaian untuk indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat agar berhasil dipenuhi, antara lain:

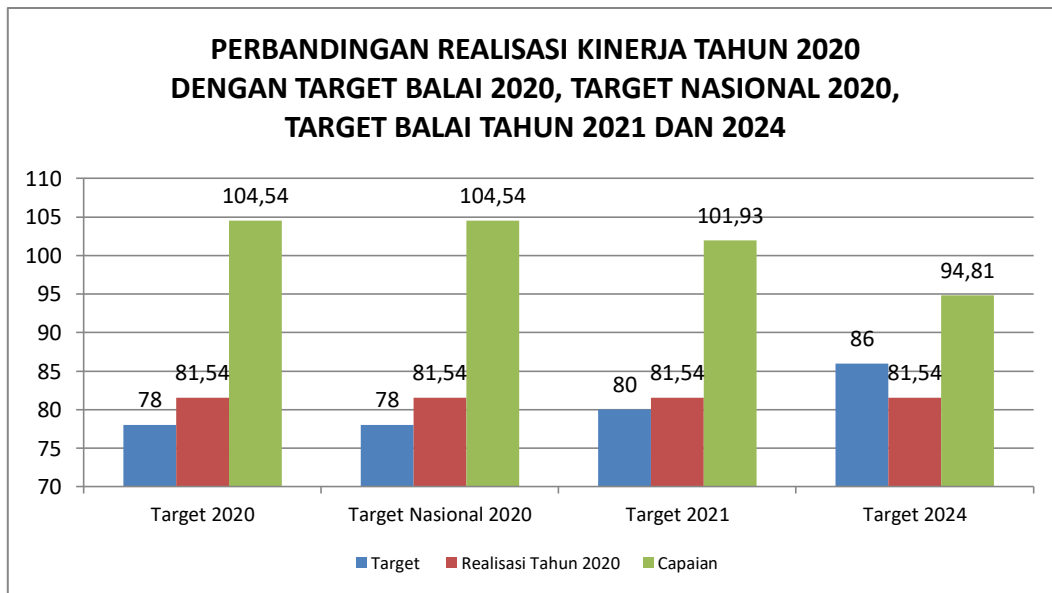
1. Pelatihan eksternal dan internal, uji kolaborasi dan uji profisiensi bagi personel penguji laboratorium BBPOM di Banjarmasin, sehingga diharapkan kompetensi penguji yang meningkat akan dapat menjawab tantangan dalam pengujian beraneka ragam sediaan obat yang berkembang di masyarakat;
2. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi petugas pengawasan label juga perlu dilakukan, mengingat masih adanya ketidaksamaan persepsi dalam penentuan label memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan;
3. Peningkatan kompetensi petugas Petugas dari Seksi Sertifikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi juga turut berperan dalam keberhasilan penyediaan obat yang memenuhi syarat, mengingat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin hanya terdapat produsen obat tradisional dan kosmetik, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sehingga dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan pelayanan publik secara baik.

**IKSK
1.2**

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target	Realisasi	Capaian	Status
78	81,54	104,54	Baik

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2018) karena adanya perubahan Indikator Kinerja (IK) beserta Definisi Operasional (DO) nya pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024. Metode sampling yang digunakan, pada tahun 2019 tidak dibedakan metode sampling yang digunakan (baik acak maupun *targeted*), sedangkan pada tahun 2020 hanya memperhitungkan sampel acak.

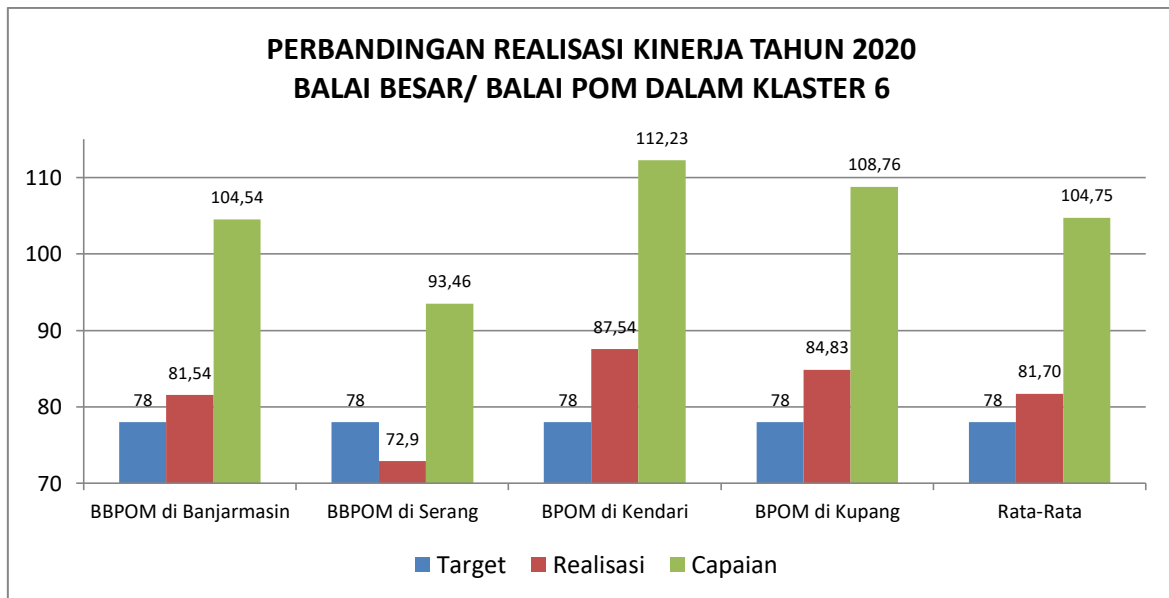


Grafik 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024

IKSK1.2.Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Apabila dibandingkan terhadap target nasional, capaian persentase makanan yang memenuhi syarat ini sama dengan capaian terhadap target Balai (78%) karena target BBPOM di Banjarmasin dan target nasional sama yaitu 104,54%. Sementara itu, apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (tahun 2024) yang sebesar 86%, maka capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 94,82% (Baik). Kriteria makanan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji kadaluarsa, rusak, penandaan label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), Tanpa Izin Edar (TIE), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.



Grafik 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK1.2.Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai Besar/ Balai POM lainnya dalam Klaster 6, capaian Balai Besar POM di Banjarmasin (104,54%) lebih tinggi dari capaian Balai Besar POM di Serang (93,46%), namun lebih rendah dari capaian Balai POM di Kendari (112,23%) dan Balai POM di Kupang (108,76%).

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain disebabkan oleh :

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga mutu pangan olahan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat;
2. Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal;
3. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Program Desa Pangan Aman dan Pasar Aman dari bahan Berbahaya;
4. Penyuluhan melalui kegiatan KIE di Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan;
5. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada pelaku usaha pangan pada saat petugas BBPOM di Banjarmasin melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi persyaratan yang berlaku;

6. Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB termasuk penataan ruang dan pendampingan pelaku usaha; dan
7. Publikasi hasil pengawasan Makanan oleh BPOM berupa *public warning* melalui website BPOM yang meliputi informasi identitas makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan berbahaya) dan tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mengonsumsi makanan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha makanan untuk memenuhi standar mutu.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,98 %, dengan capaian kinerja sebesar 104,54 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,05 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 % (**Efisien**). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran kegiatan yang dilaksanakan memberikan ketercapaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat secara efisien.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,54 %	99,98 %	1,05	0,5	100%

Tabel 3.6
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini adalah:

1. Peningkatan pengawasan pangan, bimbingan/ penyuluhan kepada pelaku usaha Pangan, penanggung jawab kantin sekolah, dan pengawas pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing;
2. Peningkatan koordinasi dengan *stake holder* terkait penyampaian hasil uji sampel dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut; dan
3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (facebook, twitter dan instagram) dan Lebih memasyarakatkan cek KLIK dengan program Germas SAPA.

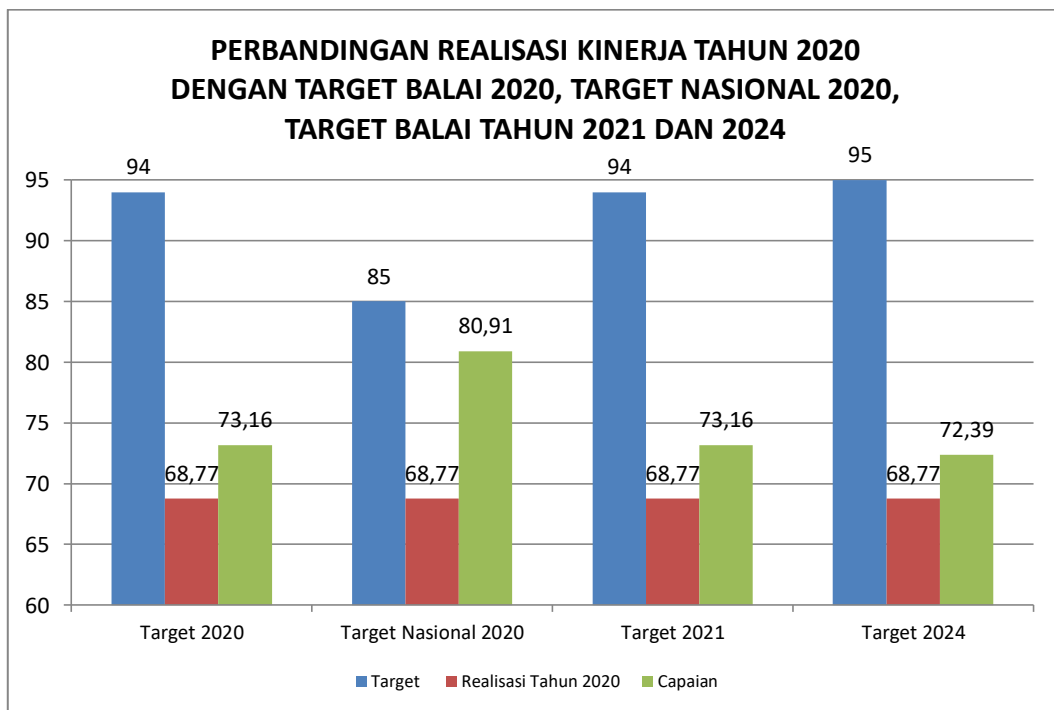
**IKSK
01.03**

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target	Realisasi	Capaian	Status
94	68,77	73,16	Cukup

Definisi sampel “obat” yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017.

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2018) karena adanya perubahan Indikator Kinerja (IK) beserta Definisi Operasional (DO) nya pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu merupakan indikator yang dinilai berdasarkan sampel obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan menggunakan data sampling *targeted/purposive*.

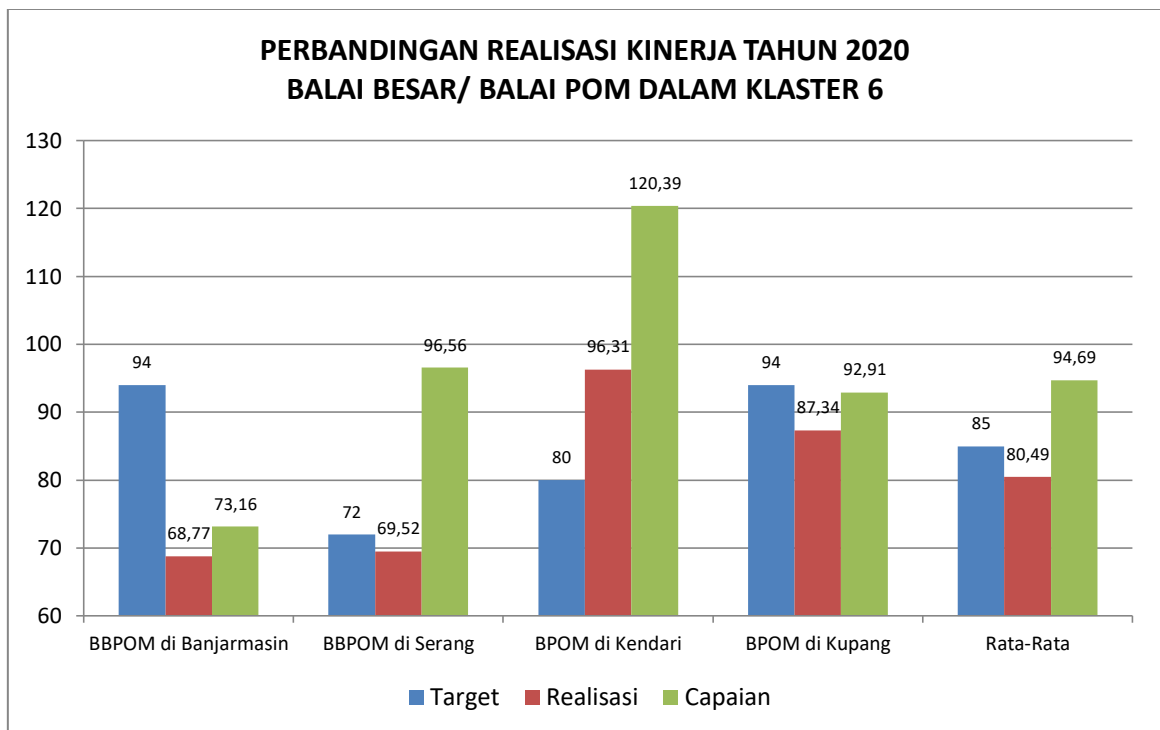


Grafik 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024

IKSK1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Apabila dibandingkan terhadap target nasional diperoleh capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 80,90%, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian terhadap target Balai yang sebesar 73,16%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target balai dengan target nasional, dimana target nasional lebih rendah dibandingkan target balai. Sementara itu, apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (tahun 2024) yang sebesar 95%, maka capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 72,39% (cukup)



Grafik 3.6

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6**

IKSK1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6, capaian Balai Besar POM di Banjarmasin paling rendah (73,16%), sementara itu capaian Balai POM di Kendari adalah yang tertinggi (120,39%), diikuti oleh Balai Besar POM di Serang (96,56%) dan Balai POM di Kupang (92,91%). Perbedaan ini dapat terjadi adanya perbedaan sebaran sampel obat yang termasuk dalam kriteria sampling *targeted* di masing-masing daerah. Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan adanya perbedaan jumlah sampel yang disampling dan diuji, semakin besar jumlah sampel yang diuji, maka kemungkinan ditemukannya obat yang tidak memenuhi syarat juga besar.

Penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu di tahun 2020 dapat disebabkan oleh tingginya target kinerja balai yang jauh melebihi target kinerja nasional, sehingga untuk tahun berikutnya perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin. Penyebab lain dari capaian kinerja yang cukup rendah dikarenakan adanya sampel obat yang disampling berdasarkan kriteria sampling *targeted* yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dari segi penandaan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap jumlah sampel yang tidak aman dan tidak bermutu. Solusi yang dapat diberikan yaitu agar kedepannya pengambilan sampling obat *targeted* dapat sepenuhnya mengacu pada Pedoman Sampling BPOM dan lebih memperhatikan kriteria penandaan terhadap produk yang disampling.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun

anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 73,16 %, dengan capaian kinerja sebesar 99,99 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,73 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,27 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75 %. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai Tingkat Efisiensi anggaran, maka realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,16 %	99,99 %	0,73	-0,27	75%

Tabel 3.7

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi *trend* cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui perdagangan secara daring (*online trading*). Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen kesehatan, OT, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara daring menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM.

Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk Obat dan Makanan impor ilegal yang dipasarkan secara daring.

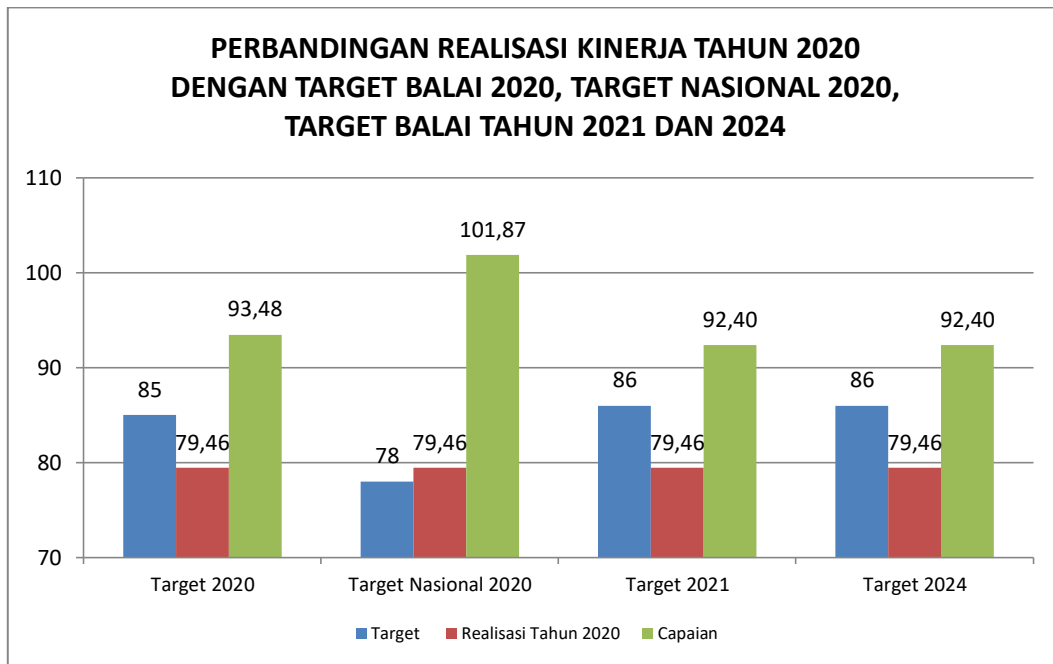
Kegiatan dan program yang perlu juga ditingkatkan secara berkesinambungan adalah kompetensi petugas penguji obat dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, uji kolaborasi dan uji profisiensi baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun provider eksternal. Berkembangnya kemampuan uji diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah keamanan dan mutu obat yang sangat berpengaruh terhadap keabsahan hasil uji laboratorium obat BBPOM di Banjarmasin.

**IKSK
1.4**

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target	Realisasi	Capaian	Status
85	79,46	93,48	Baik

Apabila dibandingkan terhadap target nasional diperoleh capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 101,87%, lebih tinggi dibanding capaian terhadap target Balai yang sebesar 93,48%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, capaian terhadap target 2024 (92,40%).

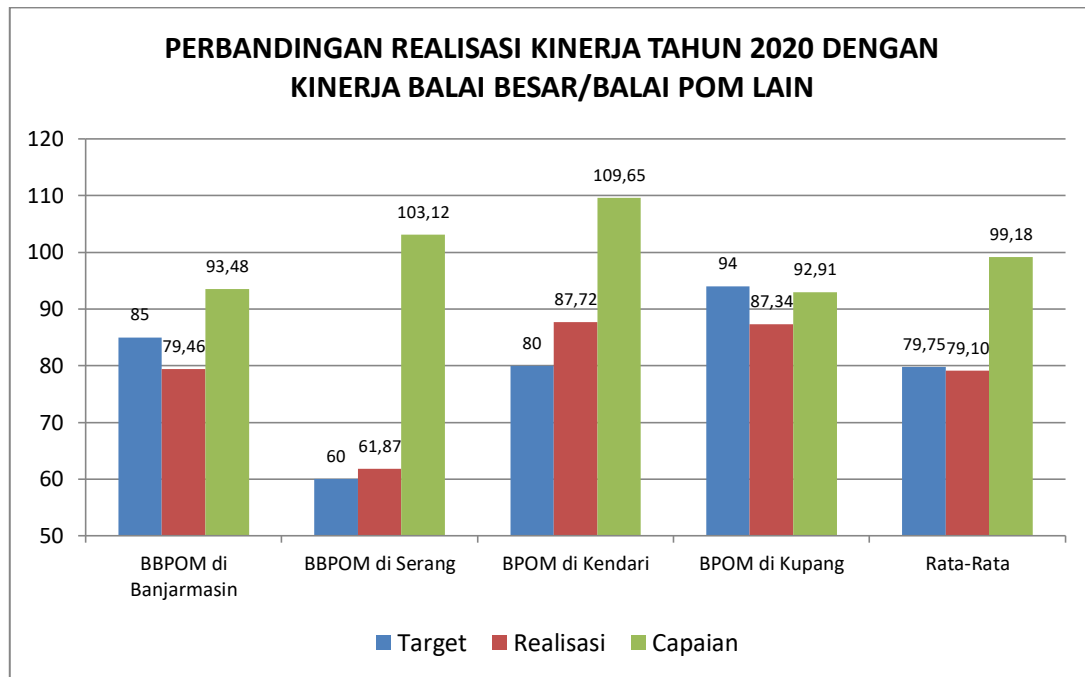


Grafik 3.7

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

IKSK1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target Indikator pada Sasaran Strategis Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena adanya perubahan formulasi prioritas sampling obat dan makanan yang awalnya hanya sampel makanan yang sudah mempunyai ijin edar, sedangkan saat ini berubah kriterianya dengan penambahan sampel makanan tanpa ijin edar (TIE), Kadaluasa, rusak dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Untuk pengujian hanya sampel yang memiliki izin edar yang akan diuji di laboratorium. Selain itu untuk target indikator terwujudnya makanan yang aman dan bermutu hanya memperhitungkan sampel makanan yang termasuk kategori sampling *targeted* tanpa memperhitungkan sampel yang masuk dalam kategori sampling acak.



Grafik 3.8.

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6**

IKSK1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Dari drafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai/Balai Besar POM lainnya dalam *cluster* yang sama, capaian BBPOM di Banjarmasin lebih rendah dari capaian BPOM di Kendari (109,65%) dan BPOM di Serang (103,12%), namun lebih tinggi dari capaian BPOM di Kupang (92,91%). Perbedaan capaian kinerja ini dapat dikarenakan sebaran produk makanan di tiap-tiap wilayah yang berbeda, sehingga memungkinkan ditemukannya makanan yang tidak memenuhi syarat dalam jumlah besar di wilayah yang berbeda. Masih ditemukannya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, rhodamin dan formalin khususnya produk pangan hasil Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) karena masyarakat/pelaku usaha IRTP mudah memperoleh bahan berbahaya tersebut. Hal ini

disebabkan Peraturan tentang Bahan Berbahaya belum tersosialisasi dengan baik kepada distributor, pengecer, maupun pengguna akhir.

Di sisi lain pengetahuan pemilik/penanggung jawab IRTP belum memadai untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Kondisi tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan strategi pendekatan yang tepat agar IRTP dapat memproduksi pangan dengan keamanan dan mutu yang terjamin. Pendekatan ini perlu dilakukan karena IRTP adalah aset daerah dan merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang perlu dibina agar mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Untuk menghadapi hal tersebut BBPOM di Banjarmasin akan lebih intensif dalam pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang makanan yang aman dan bermutu. Salah satunya adalah memanfaatkan TI berbasis internet untuk menyebarluaskan informasi obat dan makanan untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Iklan yang gencar dilakukan oleh pelaku usaha baik melalui media cetak, media elektronik, maupun pemanfaatan internet sangat membantu mereka dalam pemasaran dan penjualan. Hal ini membuat masyarakat menjadi sangat mudah percaya dengan iklan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan sebagian besar masyarakat kita masih rendah. Kondisi ini sangat memungkinkan masyarakat tidak dapat memilih makanan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran

2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,98%, dengan capaian kinerja sebesar 93,48 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,94 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,06 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75 %. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat efisiensi anggaran, indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan harus mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,48 %	99,98 %	0,94	-0,06	75%

Tabel 3.8

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK1.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Beberapa program/ kegiatan yang juga dapat dilakukan dalam mendukung keberhasilan dalam pencapaian realisasi sesuai target yang ditetapkan dengan indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain : peningkatan kompetensi petugas penguji makanan, peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengawasan label terkait penerapan teknik sampling acak dan penentuan evaluasi penandaan, peningkatan kompetensi Seksi Sertifikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi sehubungan dengan banyaknya produsen makanan yang izin edarnya dari BPOM, IRTP dan pengusaha pangan siap saji, sehingga petugas

dapat melakukan pembinaan dan pendampingan agar pelaku usaha kompeten dalam hal memproduksi makanan secara baik dan benar.

**SK
2**

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

**IKSK
2.1**

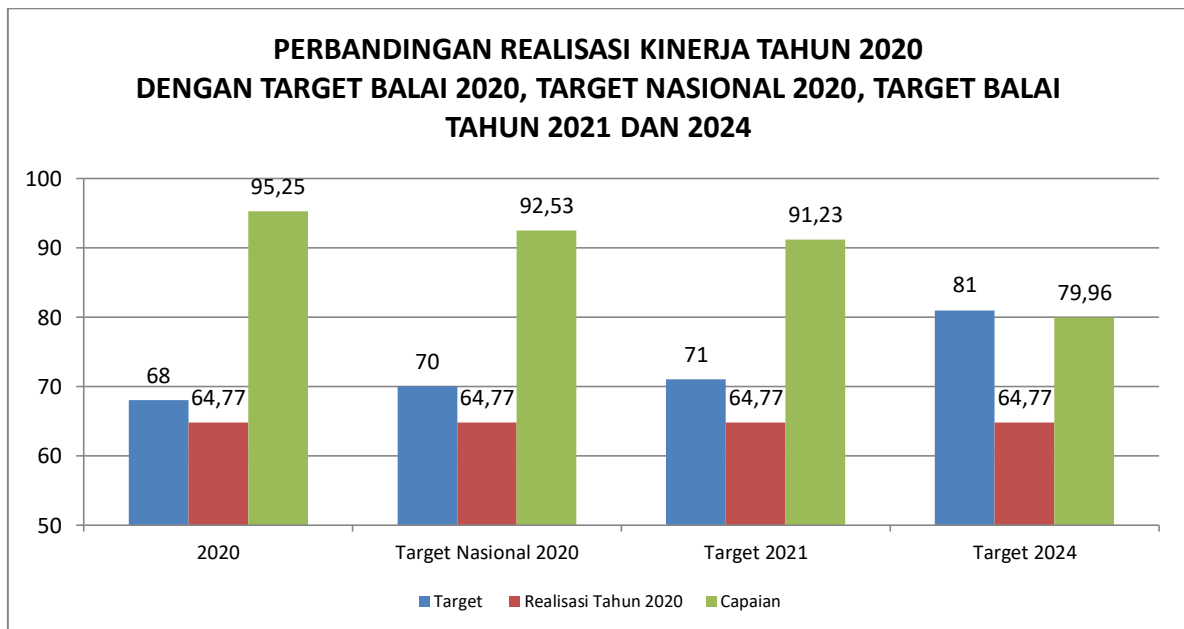
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu

Target	Realisasi	Capaian	Status
68	78,36	115,24	Sangat Baik

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana sistem pengawasan Obat dan Makanan efektif dilakukan. Pengukuran dilakukan terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait bagaimana cara memilih produk Obat dan Makanan sebelum digunakan.

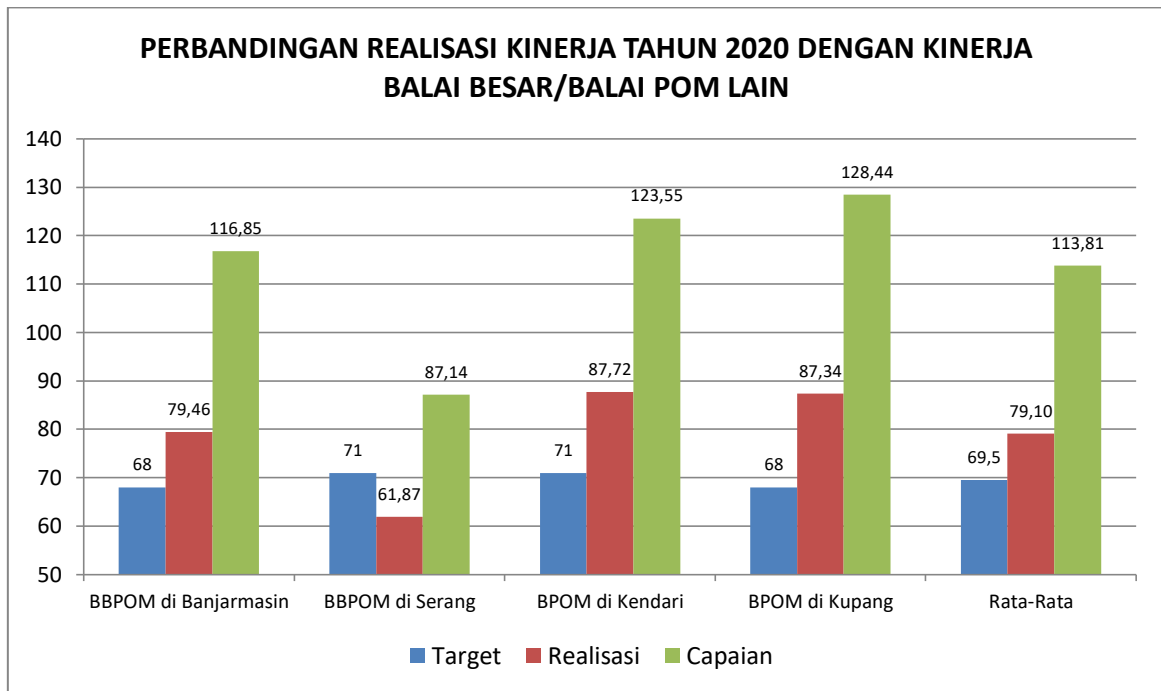
Pada tahun 2020 target indikator kinerja indeks kesadaran masyarakat yang ditetapkan adalah 68,00 dan realisasi yang dicapai adalah 78,36, sehingga diperoleh capaian terhadap target sebesar 115,24%. Ini artinya tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah cukup baik, dan masih dapat ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Dengan realisasi indeks 78,36 dapat dikatakan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam memilih Obat dan Makanan aman, seperti memahami apa manfaat produk bagi kesehatan, bagaimana ciri produk yang aman dan bermutu, membaca dan memahami aturan pakai yang tepat, tidak menggunakan produk yang tidak terjamin keamanannya seperti ilegal, palsu dan kedaluwarsa, serta menyimpan produk secara baik dan benar.



Grafik 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK2.1 Indeks kesadaran masyarakat

Pada tahun 2019 juga telah dilakukan pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan realisasi 64,77 sehingga jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 menghasilkan capaian 120,98%. Peningkatan yang terjadi selama periode satu tahun merupakan salah satu parameter keberhasilan BBPOM di Banjarmasin dalam melaksanakan tupoksi, khususnya terkait KIE Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Gencarnya KIE melalui media sosial, media *online*, dialog interaktif dan media cetak menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan. Di tahun 2020 KIE juga dilakukan secara tatap muka tetapi terbatas mengingat kasus pandemi Covid 19 masih tinggi di wilayah Kalimantan Selatan.

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat pada tahun 2020 terhadap target menengah sesuai Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 cukup baik. Pada tahun 2020, BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai indeks sebesar 78,38 sedangkan target Indeks Kesadaran Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 81. Gap yang cukup rendah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target jangka menengah dengan melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kalimantan Selatan secara berkesinambungan.



Grafik 3.10

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6

IKSK2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*)

terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kalimantan Selatan, jika dibandingkan dengan wilayah Sulawesi Tenggara yang termasuk *catchment area* Balai POM di Kendari, serta wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah pengawasan Balai POM di Kupang, memiliki nilai lebih tinggi, yaitu masing-masing indeksnya adalah 72,6 dan 68,41. Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Banten yang berada di bawah pengawasan Balai Besar POM di Serang, tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan lebih rendah, yaitu dengan nilai 87,33. Adanya perbedaan beberapa nilai indeks ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor, baik faktor eksternal seperti kualitas pendidikan masyarakat, status sosial dan tingkat ekonomi, maupun faktor internal dari Balai Besar/ Balai POM, seperti pola KIE yang diterapkan, kompetensi petugas pemberi informasi, materi yang disampaikan, serta sebaran masyarakat yang telah terpapar informasi Obat dan Makanan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 98,51 %, dengan capaian kinerja sebesar 115,24 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,17 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,17 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin digunakan secara **efisien** karena memperoleh output/capaian optimal terhadap target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	115,24 %	98,51 %	1,17	0,17	100%

Tabel 3.9

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*)

terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Peningkatan kinerja ke depannya dapat dilakukan dengan mengungkit faktor internal yang ada di Balai Besar POM di Banjarmasin. Cara pertama dengan pengembangan metoda KIE, antara lain dengan mengaktifkan grup *WhatsApp* yang beranggotakan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota, dengan harapan grup ini dapat sebagai perpanjangan tangan dari balai untuk menyampaikan kembali informasi terkait Obat dan Makanan. Metode KIE lainnya adalah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pemasangan poster Obat dan Makanan di halte-halte bus, mengingat tempat ini setiap hari banyak disinggahi pengguna angkutan, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui keberadaan dan tupoksi BPOM.

Cara kedua, meningkatkan kompetensi petugas penyuluh/pemberi informasi secara kontinyu dan berkelanjutan. Petugas diikutsertakan dalam pelatihan dan bimtek baik secara luring maupun daring. Cara petugas dalam memberikan materi informasi juga sangat penting, bagaimana caranya agar masyarakat dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Materi Obat dan Makanan yang kompleks harus sedapat mungkin diterima masyarakat dengan mudah dan dalam bahasa yang sederhana, dengan demikian petugas perlu menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap indeks kesadaran masyarakat adalah sebaran masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan. Survey ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM, di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan November tahun 2020. Responden adalah anggota rumah

tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan. Hasil survey juga ditentukan dari pengetahuan responden tentang Obat dan Makanan.

Setiap tahun Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan KIE dan pembinaan kepada masyarakat di semua kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan, responden yang ditentukan surveyor adalah komunitas yang belum pernah mendapat informasi secara langsung dari petugas balai, karena belum semua kecamatan dan desa di kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan menjadi binaan Balai Besar POM di Banjarmasin. Alternatif solusi yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah memperluas cakupan wilayah KIE dengan pemasangan poster, pembagian brosur, serta bekerjasama dengan media cetak dan media elektronik di kabupaten/kota. Diharapkan dengan cara ini dapat memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan informasi Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peningkatan capaian tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu juga dapat disandingkan dengan program/kegiatan lintas sektor. Informasi Obat dan Makanan berkaitan erat dengan pembinaan UMKM di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, serta penerbitan nomor izin P-IRT di Dinas Kesehatan, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin dapat memantapkan koordinasi secara kontinyu agar tujuan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Survei dalam rangka pengukuran indeks kesadaran masyarakat akan terus dilakukan minimal selama tiga tahun ke depan, hingga tahun 2024. Target yang telah ditetapkan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 81,00. Agar dapat

mencapai indeks ini, perlu peningkatan dan pengembangan dalam metode KIE, serta diperlukan suatu acuan, bagaimana cara agar daerah yang terpapar informasi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan tersebar merata. Diharapkan juga pada pelaksanaan program ini, lokasi yang menjadi tempat survei adalah kecamatan/desa yang masyarakatnya telah pernah dibina dan diintervensi oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, agar dapat dievaluasi tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir.

**SK
3**

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

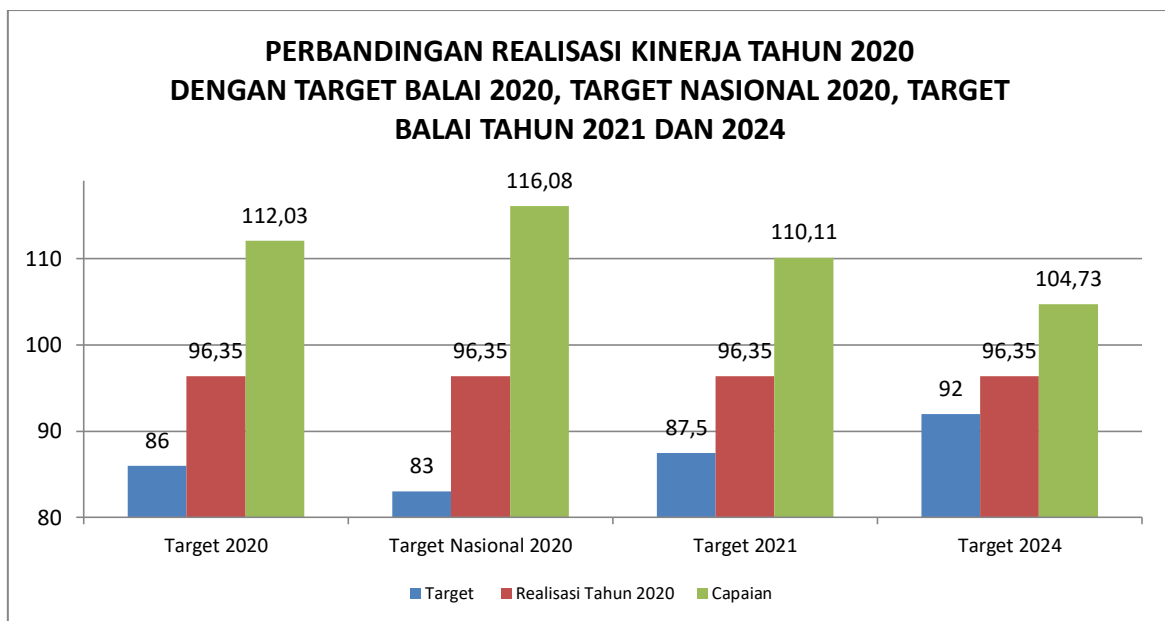
Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
3.1**

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Status
68	78,36	115,24	Sangat Baik

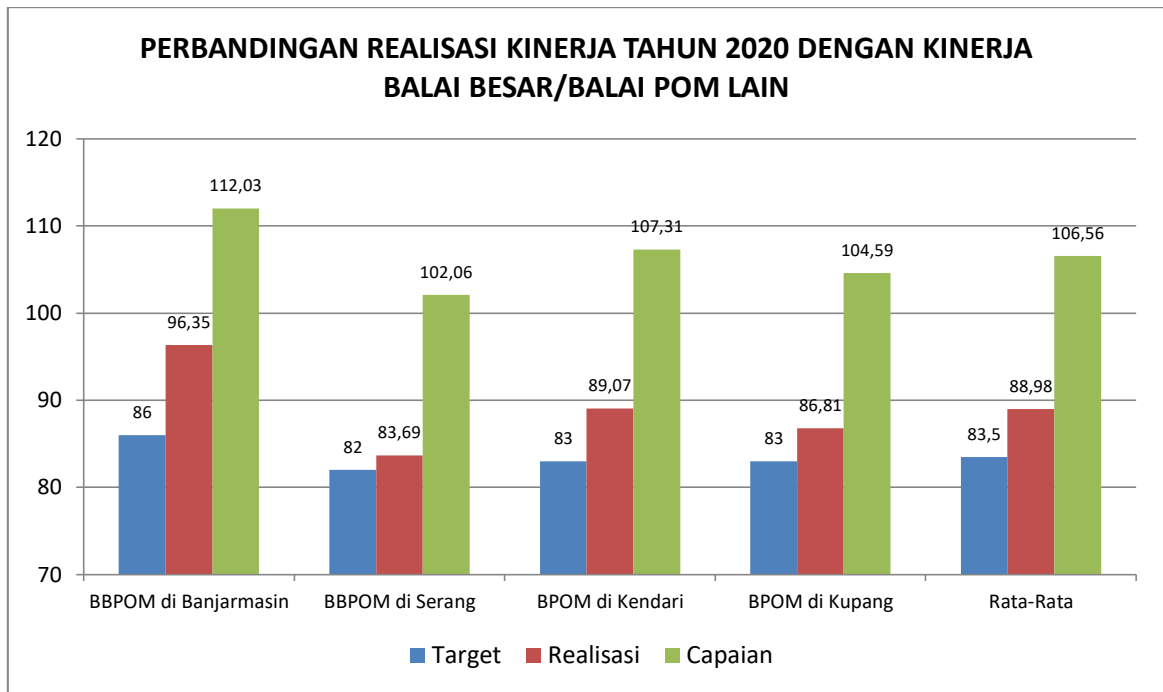
Realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 yaitu 96,35 dengan capaian 112,03 %. Capaian tersebut masuk dalam rentang capaian Sangat Baik. Namun, jika dibandingkan dengan target Nasional dimana target Balai lebih besar dibandingkan target Nasional, capaian Balai Besar POM di Banjarmasin mencapai 120,25 %. Hal ini dikarenakan adanya gap yang cukup tinggi antara target Balai Besar POM di Banjarmasin dan target Nasional serta antara realisasi dan target Balai Besar POM di Banjarmasin sendiri.



Grafik 3.11

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**
**IKSK3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Berdasarkan Rencana Str ategis Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024, realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 telah melampaui target jangka panjang pada 2024 yaitu 104,73 % terhadap target 2024. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian Balai Besar POM di Banjarmasin.



Grafik 3.12

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6**

**IKSK3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6, capaian Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi cukup signifikan. Balai Besar POM di Serang, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang memperoleh kriteria Baik (rentang nilai 100-110%). Ketiga Balai Besar/ Balai POM tersebut memiliki target yang lebih rendah dari target Balai Besar POM di Banjarmasin dan realisasi capaian dengan gap yang tidak terlalu tinggi terhadap target masing-masing. Perbedaan capaian ini dapat disebabkan factor antara lain : metode pembinaan/ pemberian bimbingan yang dilakukan, karakteristik pelaku usaha tiap daerah dan fasilitas/ sarana/ prasarana yang tersedia di masing-masing Balai Besar/ Balai POM.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/ sertifikasi produk Obat dan Makanan. Survey indeks kepuasan pelaku usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari : Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB , Pendampingan UMKM Pangan Olahan dan Pendampingan/ Fasilitasi E-Registration Pangan Olahan.

Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep Service Quality dari aspek/ dimensi : *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness (RATER)*. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*. Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi

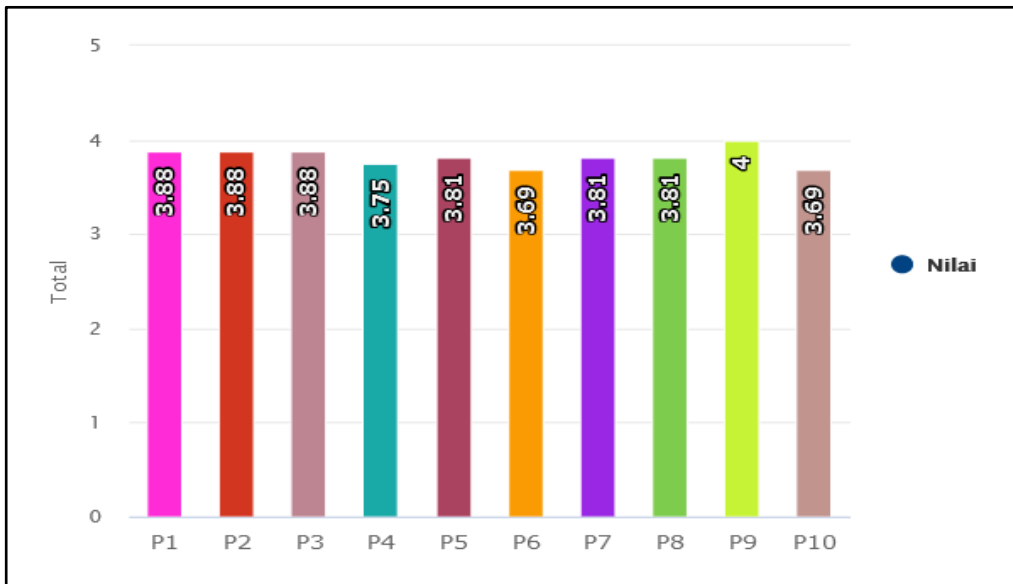
(P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/ petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

Kode aspek	Hasil Pengukuran Skala Kepuasan			Rata-rata Skala Kepuasan	Nilai Indeks
	Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB	Pendampingan UMKM Pangan Olahan	Pendampingan/ Fasilitas E-Registration Pangan Olahan		
P1	4	3.88	3.93	3.94	98.42
P2	3.75	3.88	3.87	3.83	95.83
P3	4	3.88	3.87	3.92	97.92
P4	4	3.75	3.87	3.87	96.83
P5	4	3.81	3.87	3.89	97.33
P6	4	3.69	3.67	3.79	94.67
P7	4	3.81	3.73	3.85	96.17
P8	4	3.81	3.87	3.89	97.33
P9	4	4	4	4.00	100.00
P10	4	3.69	3.67	3.79	94.67

Tabel 3.10

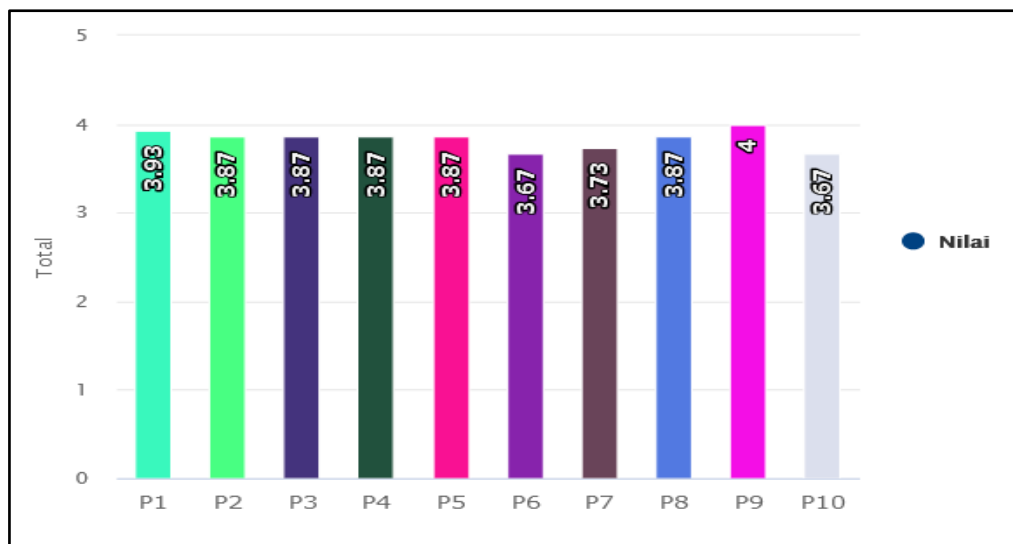
Data Pengukuran Survey Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pembinaan/ Bimbingan dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Dari ketiga jenis kegiatan sebagai target survey, nilai survey tertinggi terdapat pada aspek keramahan petugas (P9). Sementara itu, dua aspek dengan nilai rata-rata survey lebih rendah yaitu Kecukupan waktu (P6) dan Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, dsb) (P10). Meskipun masih dalam rentang nilai kepuasan “sangat puas”, kedua aspek ini dapat menjadi perhatian dikarenakan menjadi nilai terendah pada dua jenis kegiatan.



Grafik 3.13

Hasil Pengukuran Kepuasan terhadap kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan



Grafik 3.14

Hasil Pengukuran Kepuasan terhadap kegiatan Pendampingan/Fasilitasi E-Registration Pangan Olahan

Kedua kegiatan seperti pada tabel di atas merupakan kegiatan pembinaan intensif baik melalui tatap muka langsung maupun media

komunikasi online (*whatsapp*). Kecukupan waktu dan fasilitas memiliki nilai yang lebih rendah dibanding yang lainnya.

Adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin selama hampir 4 bulan (Maret-Juni 2020) memberikan dampak pada kemudahan tatap muka dengan petugas. Padahal pembinaan/ bimbingan/ konsultasi secara tatap muka intensif biasanya memberikan waktu cukup bagi pelaku usaha dan tersedia fasilitas secara riil. Adanya kecenderungan pelaku usaha yang lebih menyukai pembinaan tatap muka dibandingkan melalui media komunikasi online dapat menjadi faktor capaian nilai kecukupan waktu dan fasilitas yang lebih rendah dibanding aspek lain.

Perencanaan yang matang memudahkan langkah Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menentukan arah kegiatan sehingga kepuasan kerja dan kepuasan pelaku dapat tercapai. Sesuai dengan perspektif teori stakeholder, dan atau pemenuhan kebutuhan *stakeholders* merupakan elemen penting dalam perencanaan di semua bidang. *Stakeholder* (dalam hal ini pelaku usaha) yang telah terpenuhi kebutuhannya terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin secara otomatis akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari Balai Besar POM di Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Target pelaku usaha penerima bimbingan/pembinaan ditentukan berdasarkan analisa risiko dan prioritas. Setiap bulan

dilakukan identifikasi target berdasarkan antara lain : (1) Jenis produk dan legalitas produk; (2) Kesiapan dan komitmen pelaku usaha; (3) Hasil pengawasan *post market*; (4) Riwayat pembinaan sebelumnya; (5) Jenis kebutuhan pembinaan pelaku usaha.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dan menjadi salah satu dasar penetapan target pembinaan selanjutnya.

Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif. Pembinaan tersebut berupa pembinaan/ bimbingan teknis terkait pemenuhan *Good Manufacturing Practise* (GMP) dan *Good Distributing Practise* (GDP) terhadap calon sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan fasilitasi/pendampingan secara massif terhadap pelaku usaha dalam melakukan registrasi produk.

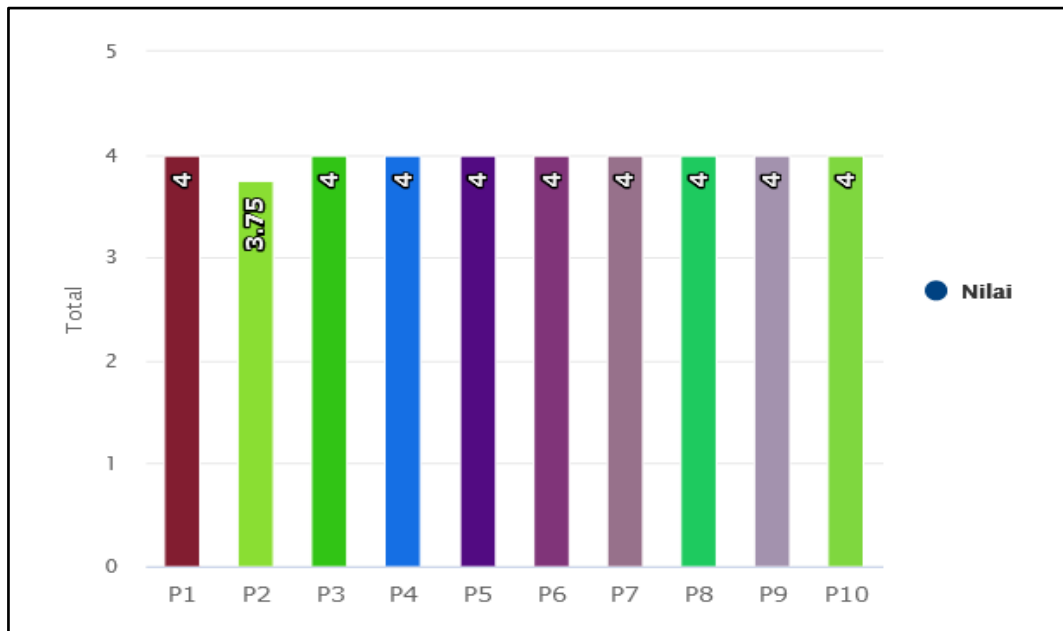
Pada bulan Maret 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima E-Registrasi Pangan Olahan. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 43 (empat puluh tiga) Nomor Izin Edar (NIE) MD terbit dan 9 (sembilan) pengajuan registrasi berproses. Fasilitasi registrasi terus berlanjut setelah kegiatan berlangsung. Meskipun dalam kondisi *Work From Home* (WFH) dikarenakan pandemic Covid-19, mulai dari bulan Maret hingga Juni 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin tetap melaksanakan pendampingan/ fasilitasi registrasi terhadap UMKM yang sedang berproses registrasi yang dilakukan melalui media komunikasi *online*.

Pembinaan/ pendampingan terkait pemenuhan *Good Manufacturing Practise* (GMP) dan *Good Distributing Practise* (GDP) terhadap calon sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan menghasilkan beberapa sarana produksi yang memperoleh

rekomendasi pendaftaran dan siap melakukan registrasi. Hal tersebut mendorong Balai Besar POM di Banjarmasin untuk menyelenggarakan kembali Pelayanan Prima E-Registrasi bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada bulan November 2020. Upaya ini memberikan hasil cukup memuaskan dimana sejumlah 27 (dua puluh tujuh) NIE terbit.

Selain pendampingan terhadap pelaku usaha bidang pangan, BBPOM di Banjarmasin juga melakukan pembinaan/ bimbingan terhadap distributor obat/ Pedagang Besar Farmasi (PBF). Bentuk pembinaan berupa Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB. *Carryover* proses Sertifikasi CDOB tahun 2019 cukup tinggi yaitu 13 (tiga belas) proses Sertifikasi CDOB. Bentuk dari Desk Pelayanan Konsultasi CAPA adalah melalui *whatsapp* grup tiap PBF. Dalam *whatsapp* grup tersebut, PBF yang sedang melaksanakan proses Sertifikasi CDOB dapat melakukan konsultasi langsung kepada inspektur CDOB, baik terkait persiapan audit (*pre-audit*) maupun pemenuhan CAPA setelah audit (*post-audit*).

Pada akhir tahun 2020, BBPOM di Banjarmasin menerbitkan rekomendasi 11 Sertifikasi CDOB *Carryover* 2019 dan 5 rekomendasi Sertifikasi CDOB tahun 2020.



Grafik 3.15

Hasil Pengukuran Survey Kepuasan terhadap Kegiatan Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB

Untuk kegiatan Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB, aspek yang memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dari aspek lain adalah aspek kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet. Untuk layanan desk konsultasi CAPA secara tatap muka, Balai Besar POM di Banjarmasin memiliki kendala pada jadwal inspektur CDOB pada jam kerja dikarenakan tingginya mobilitas kerja petugas.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,95%, dengan capaian kinerja sebesar 112,03 %. Dari data

tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,12 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,12, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan pada kegiatan pembinaan/pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarmasin dinilai efektif dan **efisien** dalam mencapai target output berupa indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	112,03 %	99,95 %	1,12	0,12	100%

Tabel 3.11

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Dalam upaya mempertahankan capaian di tahun mendatang, perlu dilakukan upaya/ kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

1. Kesiambungan pembinaan/pendampingan masif terhadap pelaku usaha utamanya UMKM. Balai Besar POM di Banjarmasin juga memiliki tantangan untuk melakukan inovasi pada metode pembinaan/pendampingan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan/pendampingan yang akan memberikan dampak pada kepuasan pelaku usaha.

2. Perluasan target pembinaan/pendampingan pelaku usaha yaitu terhadap pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional
3. Meningkatkan *awareness* dan peran admin survey Balai Besar POM di Banjarmasin untuk kelancaran penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelaku usaha
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring terhadap survey yang dilakukan. Dengan adanya perencanaan dan monitoring survey, dapat diidentifikasi secara awal hambatan maupun peluang perbaikan yang muncul sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap upaya pembinaan/pendampingan yang dilakukan.

**IKSK
3.2**

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Status
72	76,11	105,71	Baik

Pada tahun 2020 telah dilakukan Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan (PRKOM). Survei ini bersifat komposit skala nasional dan provinsi. Metodologi survei menggunakan *Quantitative Research*, potong lintang (*Cross-sectional*) dengan perhitungan sampel menggunakan *margin of error* (MoE 10%) yaitu 11.570, yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Pemilihan sampel menggunakan *Two Stage Cluster Sampling*

yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proporsional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata perkotaan/ pedesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun.

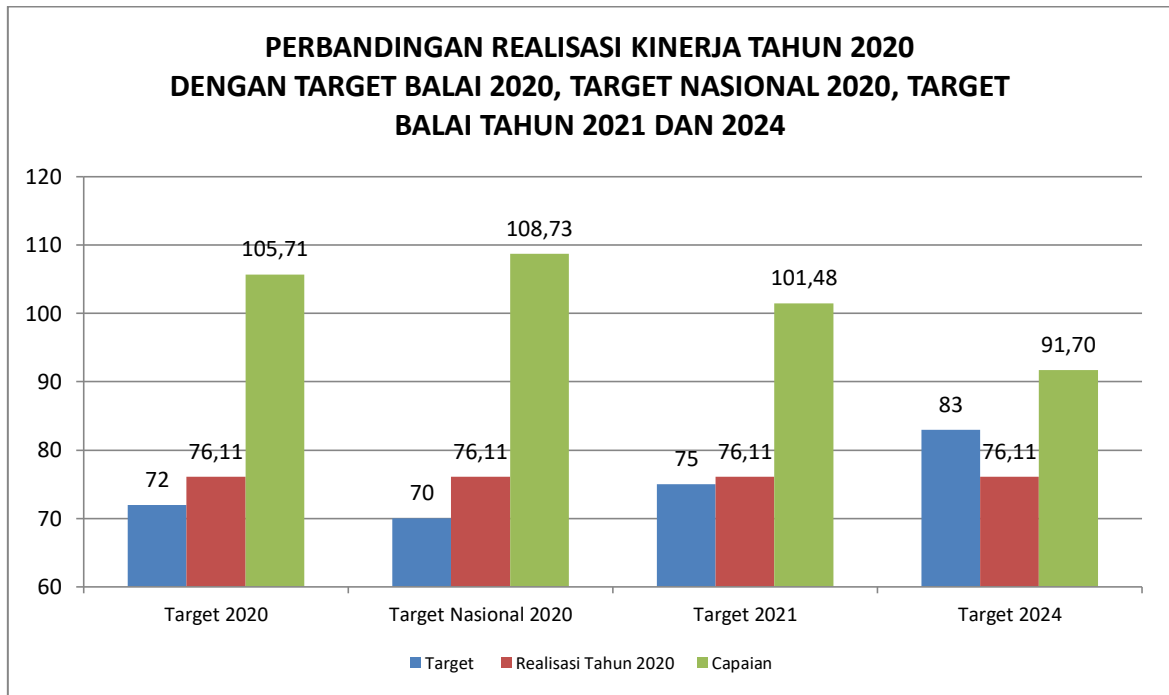
Penetapan responden berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) 11.570 yang terdiri dari jumlah kabupaten 450, jumlah kecamatan 1099, jumlah desa 1153 dan jumlah blok sensus 1157. Pengambilan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview* terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi, *tools* kuesioner di *install* di *smartphone* enumerator.

Analisis data dilakukan dengan skala likert dengan indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Interpretasi indeks mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

Skor	Interpretasi
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 – 60,00	Kurang Baik
60,01 – 75,00	Cukup Baik
75,01 – 90,00	Baik
≥ 90,01	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur

pada tahun 2020, dengan target sebesar 72,00 sebagai *baseline* data (target nasional 70,00).



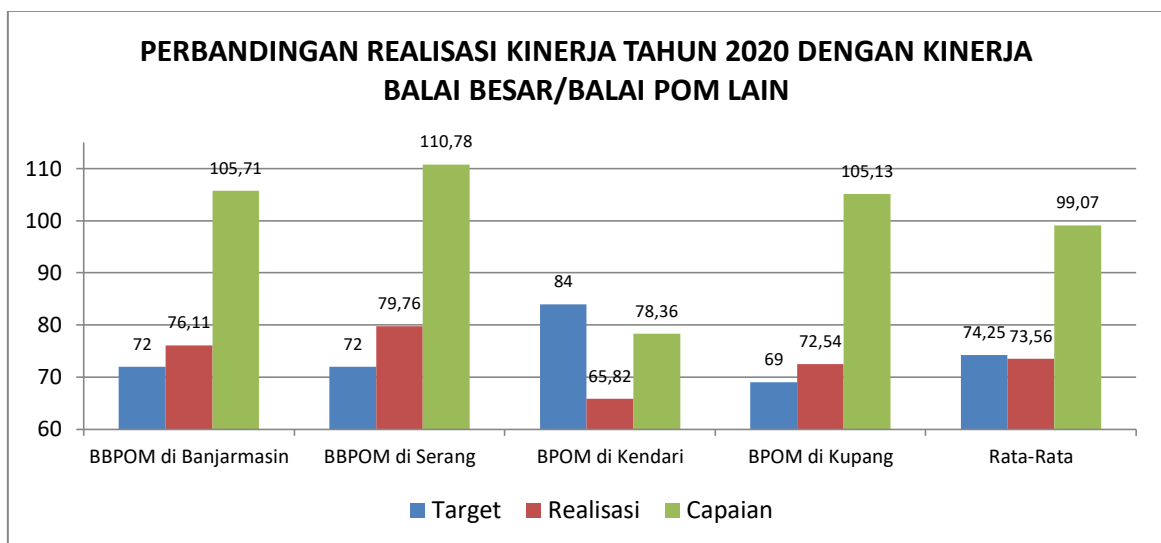
Grafik 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan hasil survei pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan diperoleh nilai indeks sebesar 76,11 termasuk kategori **Baik** dan melampaui realisasi nasional yaitu 72,54 (**Cukup Baik**). Pencapaian terhadap target Balai tahun 2020 yaitu 105,71 % dan terhadap target nasional mencapai 108,73%.

Pada Renstra tahun 2020-2014, target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar

POM di Banjarmasin adalah 83,00, realisasi indeks pada tahun 2020 sudah mencapai 91,70 % dari target tahun 2024. Agar pada tahun-tahun berikutnya nilai indeks dapat meningkat dan target kinerja tahun 2024 dapat tercapai, perlu ditingkatkan publikasi dan penyampaian informasi terkait hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, baik melalui media sosial maupun media massa (cetak dan elektronik), sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung hasil kinerja pengawasan obat dan makanan .



Grafik 3.16

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6**

**IKSK3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Jika dibandingkan dengan realisasi Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada Balai POM di Kendari (72,54) dan Balai POM di Kupang

(65,82), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di Serang (79,76).

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,92 %, dengan capaian kinerja sebesar 105,71 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,06 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,06, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin dinilai efisien dalam mencapai output target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	105,71 %	99,92 %	1,06	0,06	100%

Tabel 3.12

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

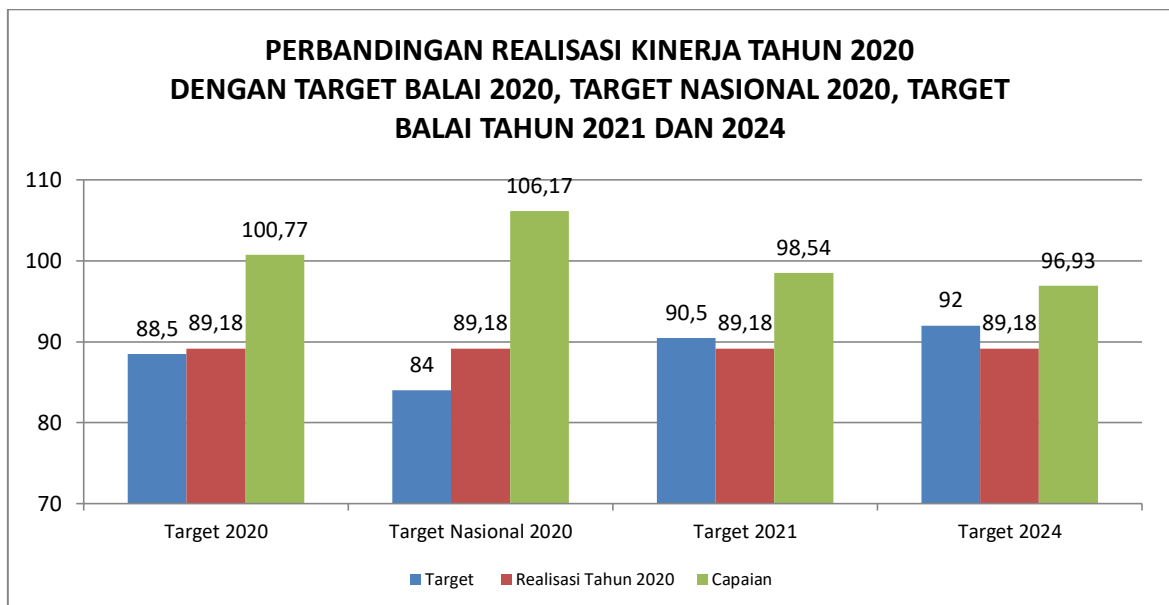
**IKSK
3.3**

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Status
88,5	89,18	100,77	Baik

Pada tahun 2020, telah ditetapkan target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 88,50. Sedangkan realisasi yang dicapai adalah 89,18, sehingga diperoleh capaian terhadap target sebesar 100,77%. Ini artinya mutu pelayanan yang diberikan Balai Besar POM di Banjarmasin kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan masuk dalam kategori sangat baik, namun demikian dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

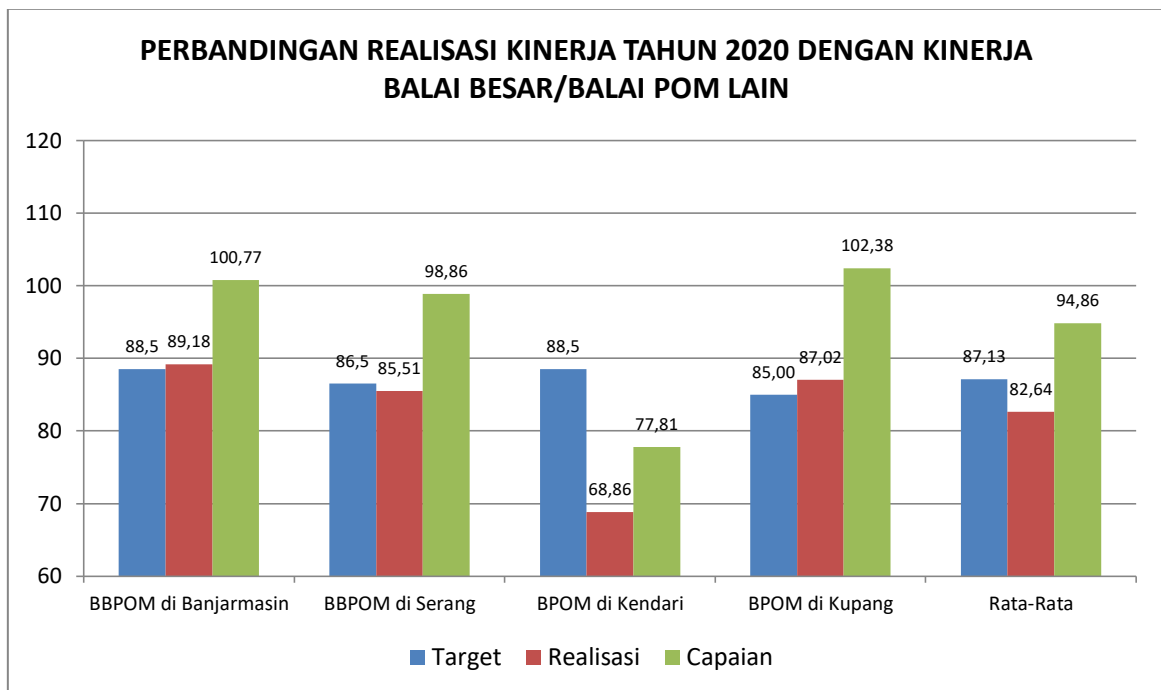
Indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, yaitu 87.90. Unsur pelayanan yang masih kurang pada tahun 2019 diperbaiki dan ditingkatkan di tahun 2020.



Grafik 3.17

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Pada tahun 2024, target indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin yang tertuang dalam rencana strategis adalah 92,00, sedangkan realisasi indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 89,18. Agar dapat mencapai nilai ini, diperlukan upaya, cara, metode agar indeks kepuasan masyarakat meningkat, dengan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, instruksi kerja, maupun perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi petugas pelayanan serta penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan. Upaya yang dilakukan secara maksimal akan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6

**IKSK3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Dibandingkan dengan capaian BBPOM di Serang (98,86%) dan Balai POM di Kendari (77,58%), indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi yaitu 100,77% sedangkan indeks kepuasan masyarakat Balai POM di Kupang adalah 102,38%.

Terdapat beberapa faktor keberhasilan peningkatan capaian kinerja. Evaluasi terhadap capaian kinerja di tahun sebelumnya serta menindaklanjuti saran dan masukan dari konsumen merupakan hal penting yang telah dilakukan oleh petugas layanan serta pihak terkait di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin. Dukungan pimpinan dan pejabat struktural serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid dari tim petugas pelayanan juga mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin menjadi lebih baik.

Semua hal terkait survei kepuasan masyarakat dibahas dalam pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen QMS. Bagi petugas yang mengikuti pelatihan pelayanan prima di tahun 2019, menyampaikan kembali materi yang diperoleh dalam kegiatan *in house training* kepada semua petugas layanan, sehingga diharapkan kompetensi dan perilaku petugas saat melayani konsumen akan menjadi lebih baik, dan informasi yang diberikan pun dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100,77%. Dari data tersebut (sebagaimana

dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,01, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin dinilai **efisien** dalam mencapai output berupa indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Banjarmasin.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Banjarmasin	100,77 %	100 %	1,01	0,01	100%

Tabel 3.13
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Jenis pelayanan publik di Balai Besar POM di Banjarmasin ada 3 (tiga), yaitu : pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan sertifikasi, dan pelayanan pengujian.

Survei kepuasan masyarakat diberikan kepada responden yang menerima manfaat dari masing-masing layanan, pada periode tertentu, dengan jumlah tertentu, yang menilai 9 (sembilan) unsur pelayanan :

1. persyaratan pelayanan,
2. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
3. waktu penyelesaian,
4. biaya/ tarif pelayanan,
5. produk spesifikasi jenis pelayanan,

6. kompetensi pelaksana,
7. perilaku pelaksana,
8. penanganan pengaduan, saran dan masukan bagi pelayanan yang diberikan, serta
9. sarana dan prasarana pelayanan.

Dari sembilan unsur pelayanan, yang masih mendapat nilai kategori baik adalah unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur yang terdapat pada pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan sertifikasi, pada pelayanan pengujian, yang masih perlu peningkatan adalah waktu penyelesaian, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

Masukan dan saran dari konsumen sebagian besar merespon positif dan memberikan apresiasi terhadap layanan petugas, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti agar pelayanan dapat lebih memberikan kemudahan, efektif waktu dan menimbulkan rasa puas bagi masyarakat. Saran yang perlu dievaluasi adalah :

- 1) Terkait pembayaran PNBP sampel narkotika, disarankan agar disediakan loket Bank BRI yang satu lokasi dengan kantor Balai Besar POM di Banjarmasin sehingga mempercepat dan mempermudah proses administrasi;
- 2) Terkait pembayaran PNBP untuk uji sampel pihak ke-3, disarankan agar disediakan bendahara penerima PNBP di area Bank, untuk efisiensi waktu bagi konsumen;
- 3) Terkait sertifikat hasil uji, disarankan dapat dilakukan *delivery* (pengantaran) dokumen hasil uji baik lewat jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas pelayanan;
- 4) Terkait hasil uji sampel napza dari kepolisian, di standar pelayanan tertulis waktu selesai uji adalah 3 (tiga) hari,

disarankan dipercepat menjadi 2 (dua) hari atau 1 (satu) hari untuk mempercepat proses penyidikan.

Terhadap saran/masukan dari konsumen dilakukan evaluasi, namun tidak semua hal dapat ditindaklanjuti dengan segera, mesti dipilih prioritas karena terkait kebijakan dan anggaran.

Terkait pembayaran PNBK, belum dapat difasilitasi di tahun 2021, karena penyediaan loket pembayaran di area kantor Balai Besar POM di Banjarmasin ataupun penempatan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin di area bank, diperlukan koordinasi dan kerjasama lebih lanjut kepada pihak bank, baik terkait penyediaan ruangan, fasilitas, serta persiapan anggaran.

Untuk *delivery* atau pengantaran dokumen hasil uji, juga belum dapat difasilitasi karena mempertimbangkan aspek keamanan apabila dokumen diantar melalui jasa pengiriman, sedangkan jika dokumen hasil uji diantar langsung yang perlu dipertimbangkan adalah petugas dan biaya perjalanan ke kabupaten yang berlokasi jauh dari Banjarmasin.

Saran untuk mempercepat proses pengujian sampel dari kepolisian juga belum dapat ditindaklanjuti, karena untuk pengujian selesai dalam satu hari belum bisa dipenuhi, dimana mulai dari proses pengujian hingga dokumen hasil uji dan surat pengantar lengkap ditandatangani, akan menghabiskan waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Tetapi hal ini akan dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan di tahun-tahun mendatang.

**SK
4****Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin**

Sasaran Kegiatan ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
4.1****Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Target	Realisasi	Capaian	Status
87	81,64	93,84	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A = *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

C = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

D = *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/

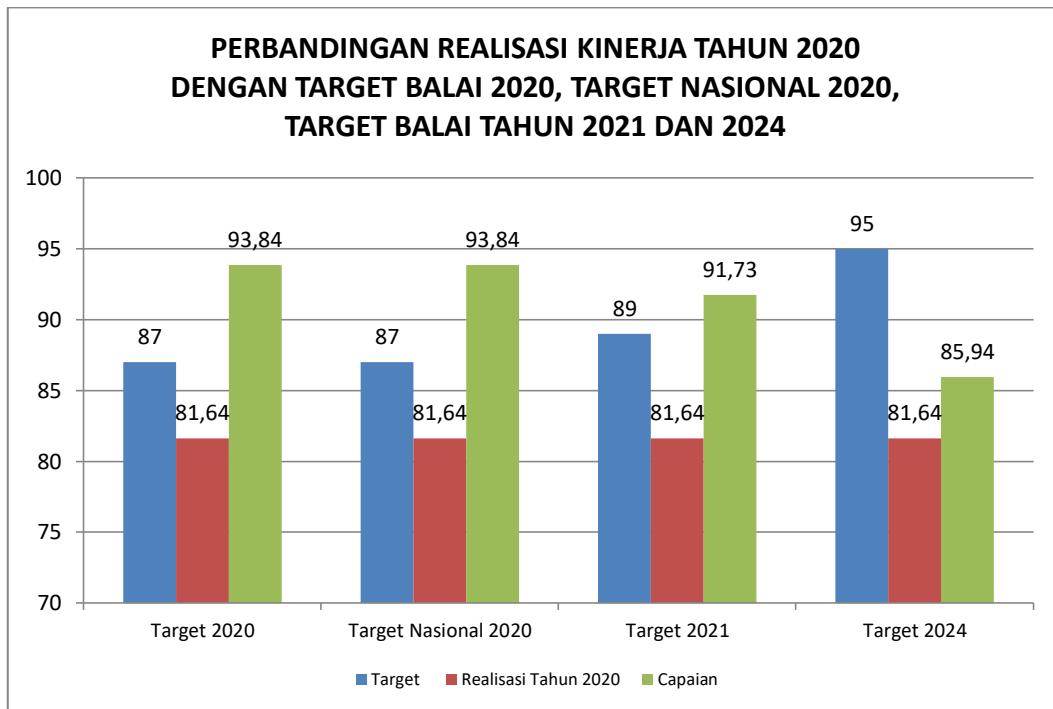
distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 691 keputusan/ rekomendasi dari 846 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 93,84 % dengan kriteria “ **Baik** ”.

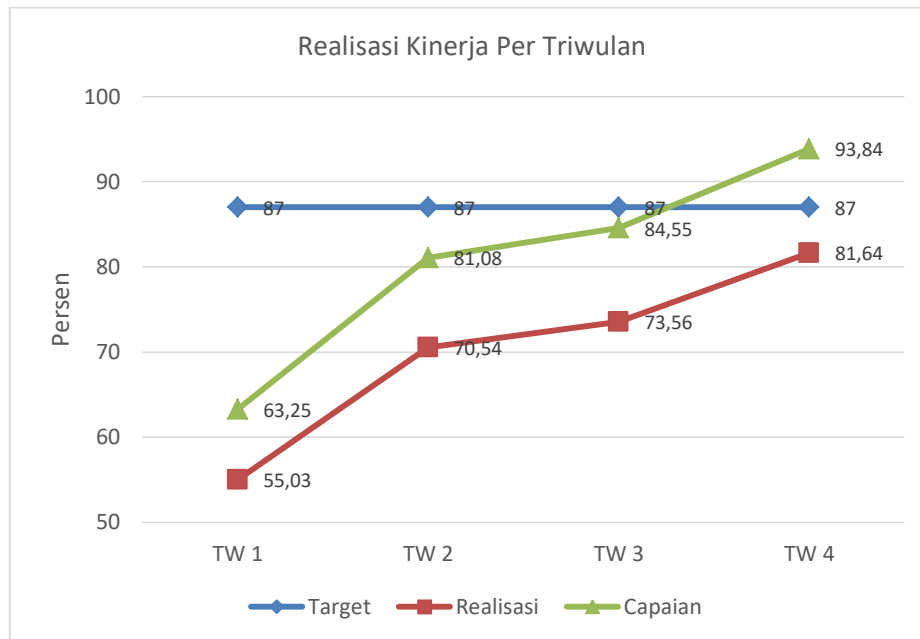


Grafik 3.19

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK4.1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi
sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Realisasi indikator kinerja ini sangat bergantung dengan jumlah tindak lanjut yang diterbitkan atau dilaksanakan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan POM/ UPT lain/ lintas sektor. Tindak lanjut yang dilaksanakan dapat dari pihak internal ataupun dari eksternal yaitu Badan POM/ UPT lain/lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi secara formal maupun non formal kepada UPT lain dan lintas sektor harus selalu ditingkatkan dalam meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Apabila dilihat berdasarkan pada capaian per triwulan akan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

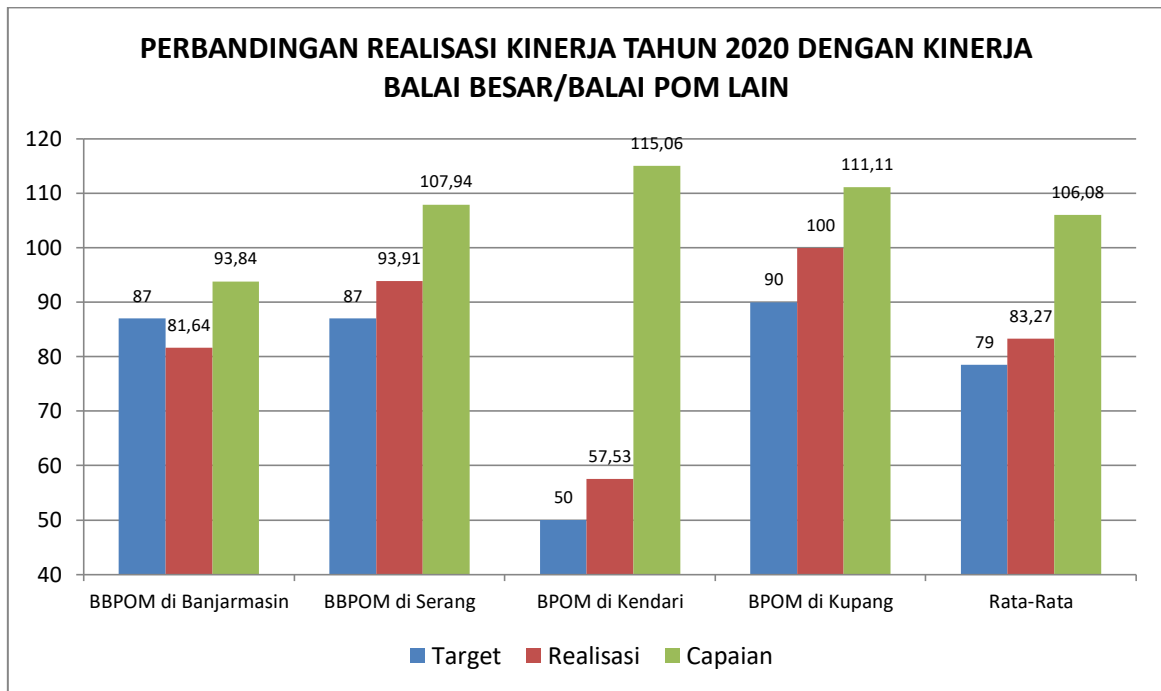


Grafik 3.20

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

IKSK4.1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Jika dilihat dari capaian per triwulan dapat menggambarkan bahwa realisasi selalu mengalami peningkatan ini artinya rencana tindak lanjut yang telah dikerjakan atas rekomendasi pencapaian Indikator Kinerja di triwulan sebelumnya sudah cukup efektif meningkatkan realisasi di triwulan berikutnya dan di TW 4 mencapai realisasi 81,64 % dengan capaian 93,84 % jika dibandingkan dengan target.



Grafik 3.21

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6

IKSK4.1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Target kinerja di tahun 2020 yang ditetapkan sama dengan target Nasional dan jika dibandingkan antara realisasi dengan target di renstra pada tahun 2024 maka capaian masih jauh dibawah target. Perlu dilakukan analisis terhadap realisasi sebagai dasar dalam penentuan tindak lanjut dalam pencapaian target kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai Renstra tahun 2024.

Setiap unit kerja menetapkan target berbeda – beda, sesuai dengan kondisi dan capaian masing – masing wilayah di tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan target nasional. Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin menetapkan target sama dengan target Nasional sebesar 87 %, sedangkan Balai

POM di Kendari menetapkan target lebih rendah dengan target nasional dan Balai POM di Kupang menetapkan target yang lebih tinggi dengan target Nasional. Dengan menetapkan target balai sama dengan target nasional, realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin belum bisa mencapai target tersebut, maka dilakukan analisis penyebab realisasi agar di tahun 2024 dapat mencapai target RPJMN di Renstra sebesar 95%.

Capaian ditahun 2020 adalah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan merupakan gabungan realisasi di BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu.

Nilai persentase terendah didapatkan dari persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan nilai 0 untuk semua wilayah baik Balai maupun Loka.

Realisasi yang masih dibawah target adalah persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain. Untuk unsur ini, ketiga unit kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu mempunyai capaian yang rendah.

Realisasi ini sangat bergantung pada tindak lanjut sebagai feedback yang diberikan oleh Pusat dalam hal ini Badan POM atau UPT lain ke Balai Besar POM maupun Loka, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Beberapa Rekomendasi yang diberikan oleh Balai/Loka kepada Pusat adalah pengawasan penandaan/label dan pengawasan iklan yang dikirimkan sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Hasil evaluasi sebagai *feedback*/tindak lanjut akan disampaikan oleh

Badan POM kepada UPT biasanya melewati bulan bahkan jika sudah diakhir tahun melewati tahun berjalan (*carry over*), sehingga tidak bisa diperhitungkan dalam tahun tersebut.

2. Rekomendasi hasil pemeriksaan berupa hasil pengawasan sarana/produk dimana tempat sarananya berada di luar wilayah pengawasan, Balai dan Loka akan memberikan rekomendasi kepada UPT yang menjadi wilayah pengawasannya untuk memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut yang diberikan oleh UPT lain jumlahnya rendah.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung melaksanakan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 93.84%, Indeks Efisiensi sebesar 0,94 dengan tingkat efisiensi sebesar -0.06 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan pada kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 **tidak efisien**. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,84%	100%	0,94	-0,06	75%

Tabel 3.14
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

**IKSK4.1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi
sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Berdasarkan **Analisis penyebab realisasi kinerja** pada tahun 2020, pada tahun 2021 akan dilakukan review dalam upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka Balai Besar POM di Banjarmasin mengambil beberapa upaya sebagai tindak lanjut berupa :

1. Dalam meningkatkan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dapat menggunakan pemanfaatan aplikasi SMARTPOM. Aplikasi SMARTPOM digunakan sebagai sarana koordinasi pemberian rekomendasi terhadap hasil pengawasan obat dan makanan dari pemangku kepentingan kepada Balai Besar/ Balai POM dan Loka POM
2. Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat
3. Meningkatkan koordinasi dengan UPT lain dalam pemberian tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan terkait hasil pengawasan terhadap sarana/ produk yang menjadi wilayah pengawasan UPT lain.
4. Balai Besar POM di Banjarmasin selalu berkoordinasi dengan Loka POM Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam pencapaian target kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

**IKSK
4.2**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Target	Realisasi	Capaian	Status
55	53,52	97,31	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

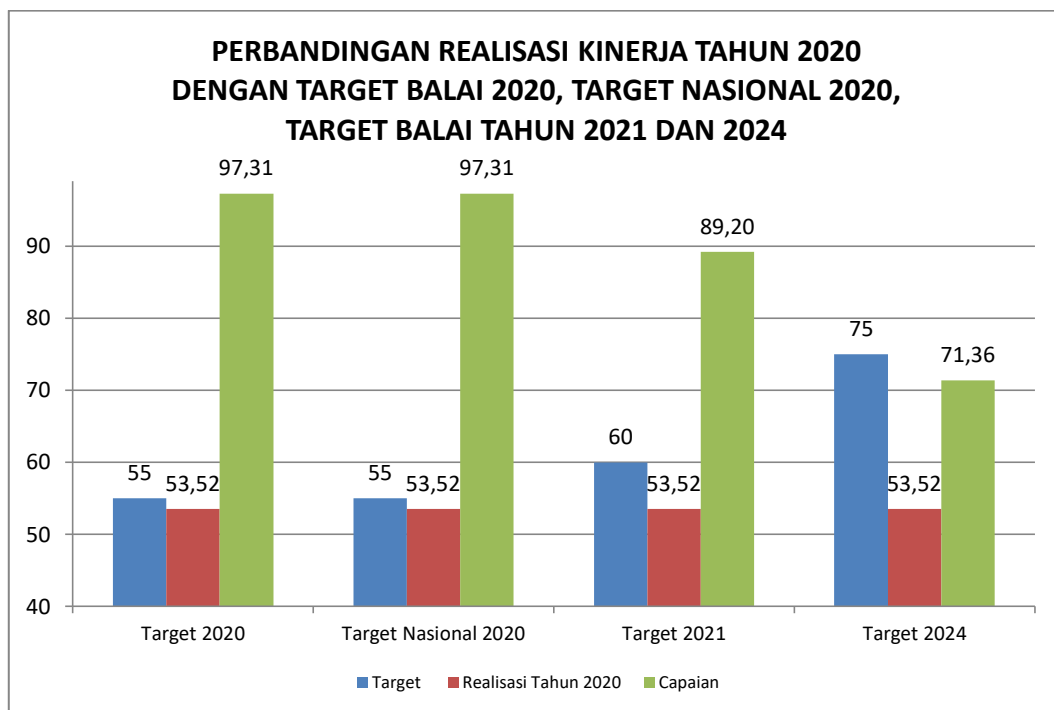
Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas

sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

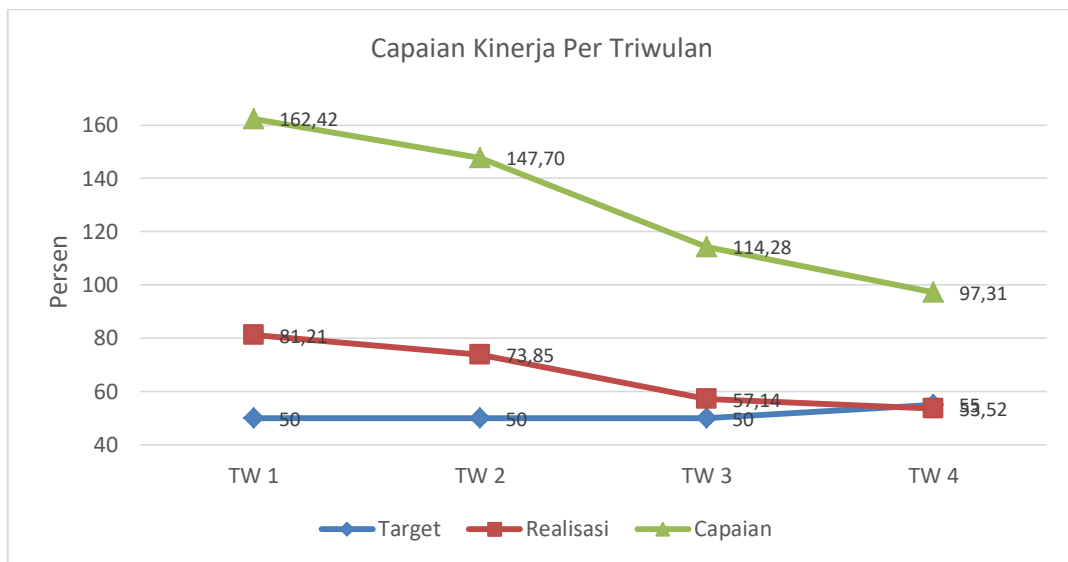


Grafik 3.22

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi**

yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2020 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 315 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 174 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 97.31% dengan kriteria “ **baik** ”. Apabila dilihat berdasarkan pada capaian per triwulan akan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.23

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Jika dilihat dari capaian per triwulan dapat dilihat bahwa realisasi per triwulan mengalami penurunan ini, hal ini sangat bergantung dari jumlah tindak lanjut sebagai feedback yang diberikan

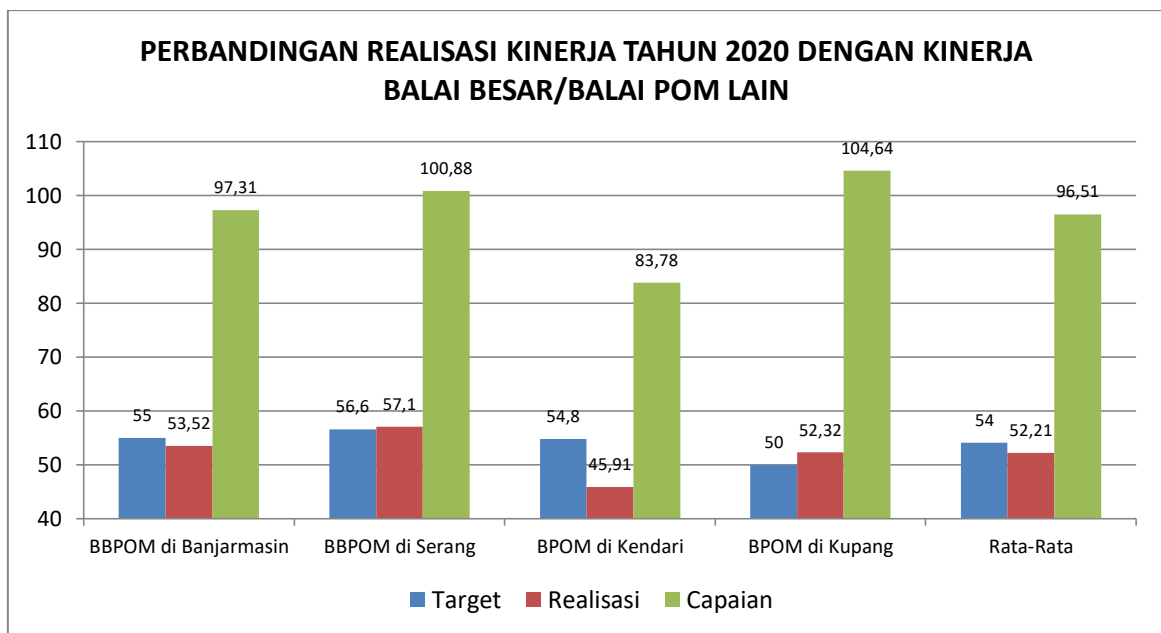
oleh kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Penurunan realisasi ini menggambarkan semakin banyak jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan terjadi kemungkinan tindak lanjut yang disampaikan sebagai feedback menjadi yang kecil, semakin besar jumlah rekomendasi yang dikeluarkan tindak lanjut yang diberikan menjadi menurun. Hal ini tentu saja bukan menjadi dasar bahwa Balai akan memberkecil jumlah rekomendasi agar tindak lanjut yang diterima meningkat.

Dalam hal menerima *feedback* Balai Besar POM di Banjarmasin juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan, sejauh mana pelaku usaha sudah memberikan CAPA sebagai bukti perbaikan terhadap temuan pada saat pemeriksaan. Badan POM juga telah menggunakan aplikasi SMARTPOM untuk mempermudah komunikasi 2 arah kepada pemangku kepentingan terkait pemberian surat rekomendasi dan feedback berupa tembusan surat tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha.

Peningkatan Koordinasi dengan Lintas sektor pada Balai Besar POM di Banjarmasin terus diupayakan dengan mendorong diterbitkannya SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44.0140/KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Februari 2020 sebagai Implementasi Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri No.41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah dapat ditingkatkan. Dengan adanya SK Gubernur ini, sebagai pendorong

untuk membentuk Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika dilihat dari tabel diatas maka persentase capaian tahun 2020 masih cukup jauh jika dibandingkan dengan target di Renstra tahun 2024. Perlu dilakukan analisis terhadap pencapaian target sebagai dasar dalam penentuan tindak lanjut untuk pencapaian target kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024.



Grafik 3.24.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi

yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Dari grafik dapat diketahui bahwa keempat Balai mempunyai target kinerja yang berbeda-beda, tetapi tidak jauh berbeda dengan

target nasional. BBPOM di Banjarmasin menetapkan target kinerja di tahun 2020 sama dengan target nasional sebesar 55 %. BBPOM di Serang memiliki target yang lebih tinggi dari target nasional, namun mampu mencapai target dengan capaian sebesar 100,88 % (lebih tinggi dibanding capaian BBPOM di Banjarmasin dan BPOM di Kendari). Capaian dari target kinerja kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sangat bergantung dengan pihak luar, yaitu pelaku usaha dan lintas sektor, hal ini dapat menjadi alasan penetapan target berdasarkan pada hasil capaian di tahun sebelumnya. Untuk mencapai target pada renstra di tahun 2024 harus dilakukan analisis penyebab realisasi kinerja masih dibawah target dalam menentukan tindak lanjut di tahun berikutnya.

Capaian di tahun 2020 adalah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan gabungan realisasi di BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbuec, sara nilai rerata, realisasi kinerja dinyatakan cukup dengan realisasi sebesar 53.52 %, namun jika dilihat dari masing – masing faktor pendukungnya dapat dilihat bahwa realisasi dibawah target diperoleh dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Dari ketiga wilayah maka Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara mencapai 27,27% dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sebesar 22,22% dibawah target dimana target sebesar 55%. Realisasi ini sangat bergantung pada banyaknya tindak lanjut yang diberikan kepada sarana terkait rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada lintas sektor. Surat rekomendasi yang sering dikeluarkan terkait rekomendasi pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan

IRTP, dimana kewenangan dalam memberikan tindak lanjut adalah Dinas Kesehatan setempat.

Penyampaian surat rekomendasi dari UPT kepada Lintas sektor masih dilakukan secara manual, begitu juga tindak lanjut sebagai *feedback* dari lintas sektor kepada UPT juga secara manual belum menggunakan aplikasi SMARTPOM

Sementara untuk persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, realisasi yang masih dibawah target adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dengan realisasi sebesar 44.77%. Tindak lanjut yang diberikan oleh pelaku usaha sebagai *feedback* atas rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM adalah berupa perbaikan CAPA terhadap temuan hasil pengawasan ke sarana distribusi dan produksi.

Sedangkan keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Balai Besar POM di Banjarmasin.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output, dimana pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 97,31%, Indeks Efisiensi sebesar 0,97 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,03 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat efisiensi penggunaan anggaran, indikator kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan harus mencapai target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	97,31%	100%	0,97	-0,03	75%

Tabel 3.15
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Berdasarkan **Analisis penyebab realisasi kinerja** pada tahun 2020, pada tahun 2021 akan dilakukan riview dalam upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan

lintas sektor, maka Balai Besar POM di Banjarmasin mengambil beberapa upaya sebagai tindak lanjut berupa :

1. Melakukan pendekatan ke pelaku usaha maupun lintas sector pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin.
2. Mengaktifkan aplikasi SMARTPOM sebagai sarana koordinasi penyampaian rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan atau tindak lanjut yang diberikan oleh lintas sektor sebagai feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin
3. Balai Besar POM di Banjarmasin selalu berkoordinasi dengan Loka POM Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam pencapaian target kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

**IKSK
4.3**

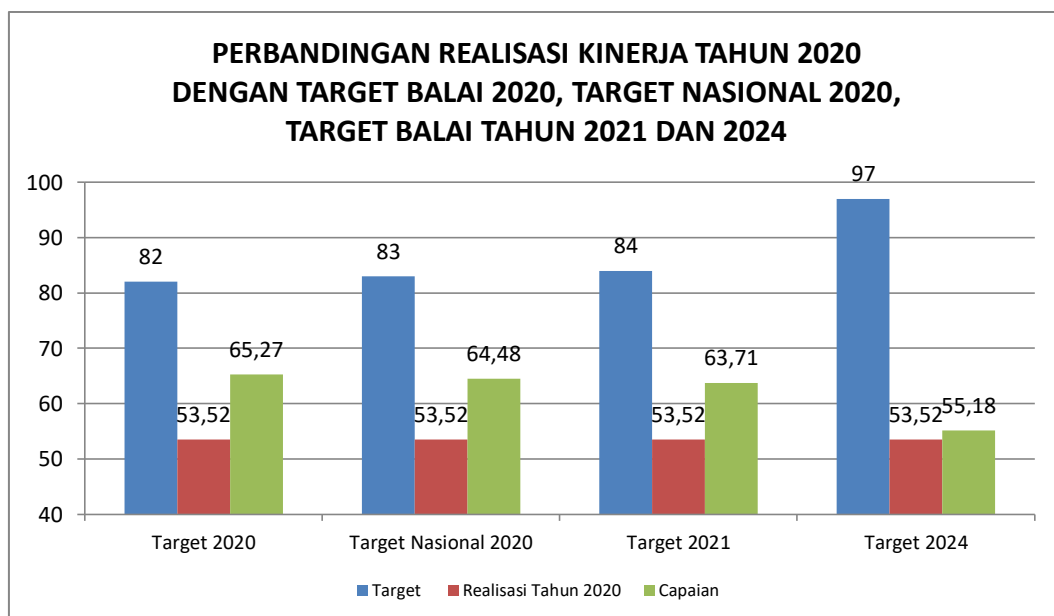
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Target	Realisasi	Capaian	Status
82	99,81	121,72	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kerja Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sebesar 99,81 % cukup berbeda signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 74,45 % (meningkat sebesar 25,26 % terhadap realisasi pada tahun 2019). Begitu juga dengan capaian terhadap target pada tahun 2020 sebesar

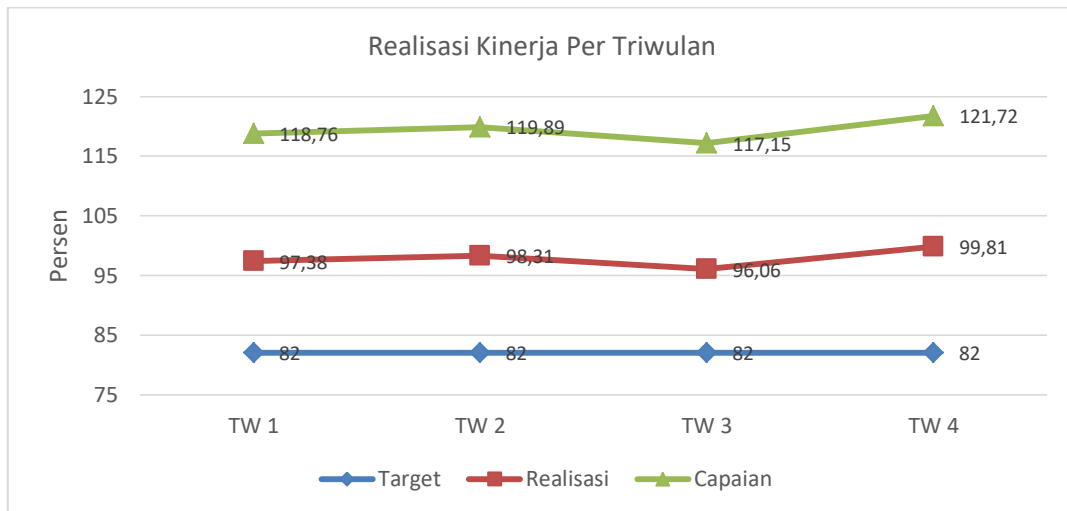
121,72 % berbeda signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 89,82 % (meningkat tajam 31,9 %).

Adanya peningkatan realisasi dan capaian ini disebabkan adanya definisi operasional indikator kegiatan yang berbeda pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, definisi operasional keputusan sertifikasi tidak mencakup adanya sertifikat/laporan hasil uji hasil pengujian sampel pihak ketiga. Sedangkan pada tahun 2020, keputusan sertifikasi mencakup adanya sertifikat/laporan hasil uji hasil pengujian sampel pihak ketiga. Hal ini sangat mempengaruhi perhitungan persentase keputusan sertifikasi tepat yang diselesaikan tepat waktu dikarenakan jumlah sampel pengujian dari pihak ketiga jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah jenis layanan sertifikasi lainnya.



Grafik 3.25

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**



Grafik 3.26

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2020 sejumlah 1512 (dari jumlah permohonan masuk 1512), sedangkan surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP hanya sejumlah 58 (dari jumlah permohonan masuk 61). Jika dibandingkan, maka jumlah sertifikat hasil uji sampel pihak ketiga yang terbit 97% terhadap keseluruhan hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

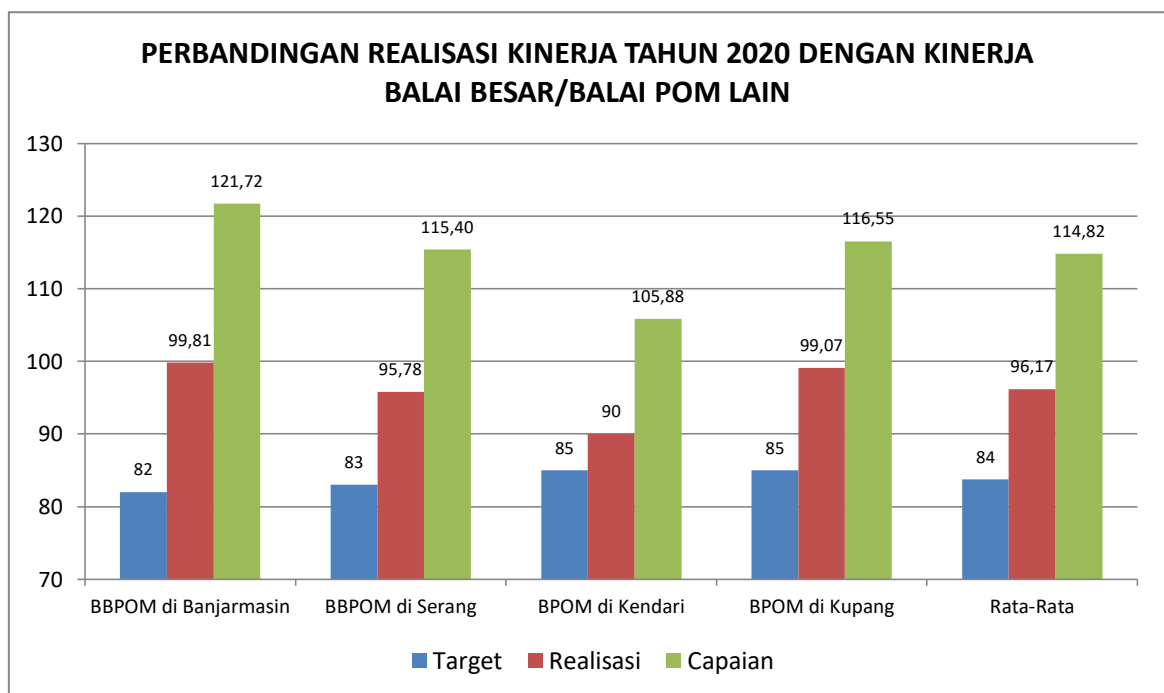
Jenis layanan sertifikasi	Permohonan	Keputusan terbit	Persentase Keputusan Sertifikasi yang Terbit	Kontribusi capaian
Sampel Pengujian Pihak Ketiga	1512	1512	100 %	96,31 %
Layanan sertifikasi lainnya (rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP)	61	58	95,08 %	3,69 %

Tabel 3.16

Layanan Sertifikasi Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak ada *carryover* pengujian sampel pihak ketiga dan hanya 4,92 % layanan sertifikasi lainnya yang belum diterbitkan rekomendasi/keputusan sertifikasi sehingga realisasi persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat mencapai 99,81%.

Capaian indikator kerja Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu terhadap target nasional pada tahun 2020 sebesar 120,25 %.



Grafik 3.27

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Jika dilihat dari realisasi persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020, target jangka menengah Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2024 sebesar 97 diharapkan bisa tercapai. Penetapan target Balai Besar POM di Banjarmasin pada

tahun 2020 yang lebih rendah dari target nasional dapat menjadi salah satu factor yang menyebabkan capaian Balai Besar POM di Banjarmasin yang terlampau tinggi (>120%). Penetapan target 2020 berdasarkan pertimbangan capaian tahun sebelumnya (2019). Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan untuk melakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan target nasional pada akhir tahun Renstra/tahun 2024.

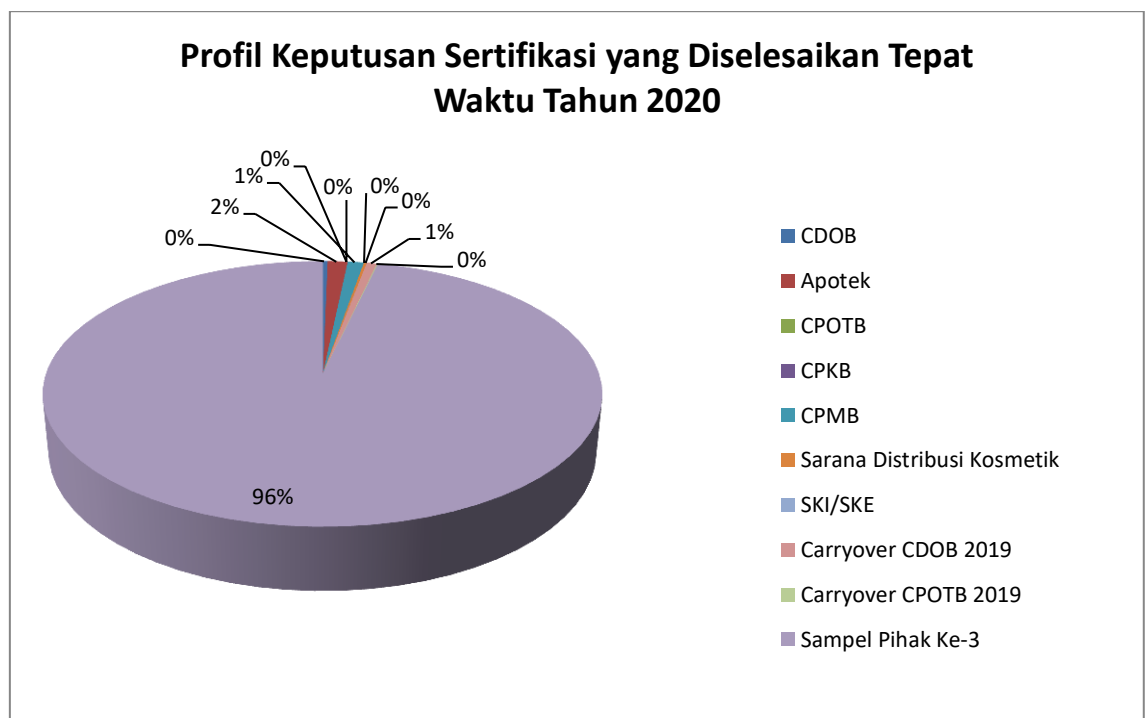
Jika dibandingkan dengan Balai Besar/ Balai POM se-cluster, Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh capaian yang lebih tinggi, namun kriteria capaian tidak dapat disimpulkan. Balai Besar POM di Serang, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang memperoleh **capaian sangat baik** dengan target yang lebih tinggi dibanding target Balai Besar POM di Banjarmasin.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Tidak adanya *carryover* pengujian sampel pihak ketiga pada tahun 2020
 - Ketepatan waktu penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga tidak lepas dari komitmen petugas laboratorium dalam memenuhi timeline Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 2020. Timeline tersebut ditetapkan sebagai standar pelayanan publik pada kegiatan pengujian sampel pihak ketiga.
 - Jenis layanan pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya

(timeline 30 HK). Dari 1512 sampel, 86,77 % (1312 sampel) merupakan sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN dengan timeline pengujian 3 HK.

- Meskipun jumlah layanan sertifikasi CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP sangat sedikit dibanding dengan jumlah layanan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi keberhasilan capaian layanan CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP tidak dapat diabaikan.



Grafik 3.28

Profil Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

- Capaian untuk jenis layanan sertifikasi CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP sendiri memberikan kontribusi 3,69 % terhadap realisasi total persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

- Dari 61 permohonan layanan CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE/ GDP (baik Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Tanah Bumbu), terbit 58 keputusan sertifikasi.
- Sedangkan 3 permohonan yang masih dalam proses pemenuhan CAPA dari pelaku usaha merupakan proses Sertifikasi CDOB PBF di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin. Dari ketiga PBF tersebut, 2 PBF merupakan *carryover* 2019 sedangkan 1 PBF lain merupakan PBF dengan pengajuan sertifikasi tahun 2020.

	Permohonan masuk	Keputusan sertifikasi terbit	On Going (Belum terbit keputusan)	Persentase
Tahun 2020	6	5	1	83,33 %
Carryover 2019	13	11	2	84,62 %
Jumlah	19	16	3	84,21 %

Tabel 3.17
Sertifikasi CDOB Tahun 2020

- Pada tahun 2020 sendiri, terdapat *carryover* proses Sertifikasi CDOB terhadap 11 *carryover* proses Sertifikasi CDOB yang terselesaikan tepat waktu dari 13 *carryover* 2019.
- Pada tahun 2019, rendahnya capaian disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kemampuan pelaku usaha dalam menyelesaikan tindakan perbaikan tindakan pencegahan/ *Corrective Action dan Preventive Action (CAPA)* dalam waktu yang cepat.
- Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar/ Balai dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk di dalamnya

pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua “Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan”.

- Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, untuk itu, diperlukan upaya percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian CAPA.
- Oleh karena itu, pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan upaya pembinaan intensif Balai Besar POM di Banjarmasin terhadap setiap proses Sertifikasi CDOB dalam bentuk desk CAPA dalam *whatsapp grup* untuk setiap PBF. Dengan media komunikasi dan layanan prima konsultasi CAPA tersebut, 84,21% proses Sertifikasi CDOB dapat diterbitkan keputusan rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu.
- Meskipun sebagian besar proses Sertifikasi CDOB dilakukan secara online melalui subsite Sertifikasi CDOB, alternatif solusi lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya proses sertifikasi yang tidak diselesaikan tepat waktu untuk proses Sertifikasi CDOB antara lain dengan pengiriman surat permintaan CAPA (setelah audit dilakukan) maupun surat permintaan CAPA berikutnya/surat pemberitahuan hasil evaluasi CAPA kepada PBF bersangkutan.

3. Kegiatan pembinaan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practise (GMP) menjadi salah satu pendukung capaian kinerja. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan dan pendampingan sehingga

pemenuhan GMP lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan.

- Pada tahun 2020, BBPOM di Banjarmasin melakukan pembinaan intensif dalam rangka persiapan audit sarana produksi maupun distribusi. Salah satu tujuan pembinaan intensif ini adalah agar pelaku usaha lebih siap saat dilakukan pemeriksaan sarana oleh Balai sehingga dapat menekan jumlah ketidaksesuaian pada penerapan Good Manufacturing Practise (GMP)).
- Jumlah ketidaksesuaian/ temuan berbanding lurus dengan kecepatan penyelesaian CAPA/ pemenuhan aspek GMP. Hal tersebut memberikan dampak pada keputusan sertifikasi CPOTB/ CPKB/ CPMB/ CDOB/ SKI/ SKE yang dapat diselesaikan tepat waktu hingga akhir tahun 2020.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,95%, dengan capaian kinerja sebesar 120,25 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,22 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,22, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dinilai **efisien** dalam mencapai output berupa persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121,72 %	99,95 %	1,22	0,22	100%

Tabel 3.18

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practise (GMP) maupun Good Distributing Practise dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi maupun pembinaan secara langsung di sarana produksi maupun distribusi dalam rangka persiapan audit/pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB)
2. Monitoring dan pendampingan pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan/Corrective Action Preventive Action (CAPA) atas temuan ketidaksesuaian saat audit/PSB secara intensif. Sekaitan dengan hal ini, dapat dilakukan *improvement* ataupun inovasi (jika diperlukan) terhadap atribut monitoring dan pendampingan
3. Peningkatan penerapan *Quality Management System* (QMS) melalui pelaksanaan SOP Makro maupun SOP Mikro terkait Sertifikasi maupun revisi SOP Mikro/pembuatan SOP Mikro jika diperlukan.

**IKSK
4.4**

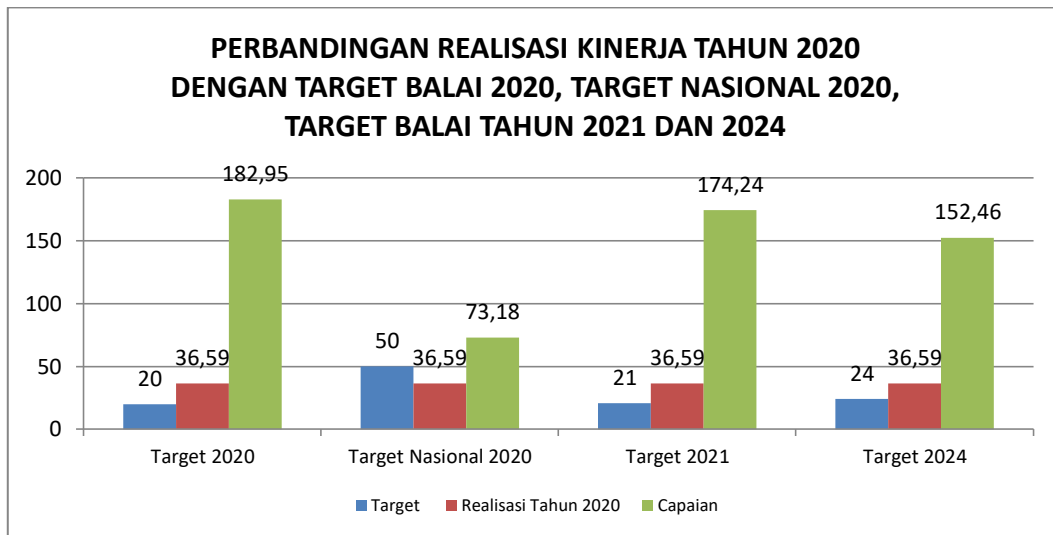
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target	Realisasi	Capaian	Status
20	36,59	182,93	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

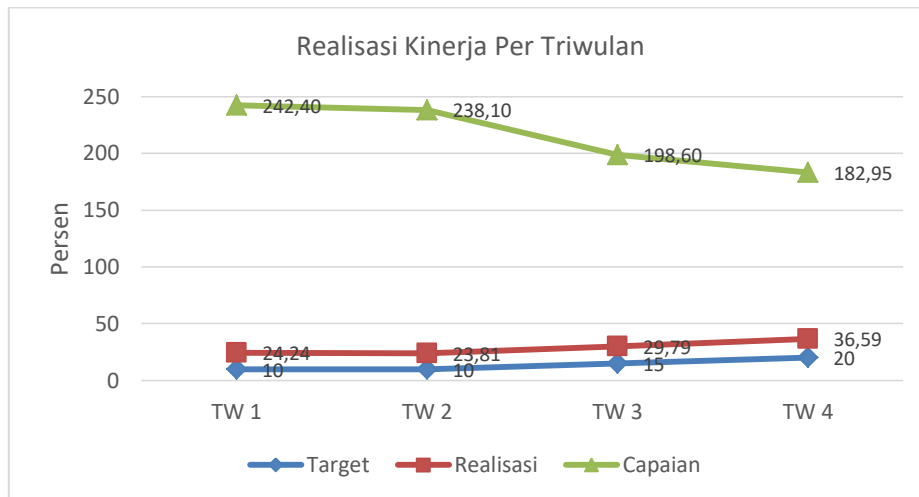
Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.



Grafik 3.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK4.4 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi
Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 123 sarana produksi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu dengan hasil sebanyak 45 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 78 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 36.59 %.

Apabila dilihat berdasarkan pada capaian per triwulan akan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.30

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

IKSK4.4 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi

Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

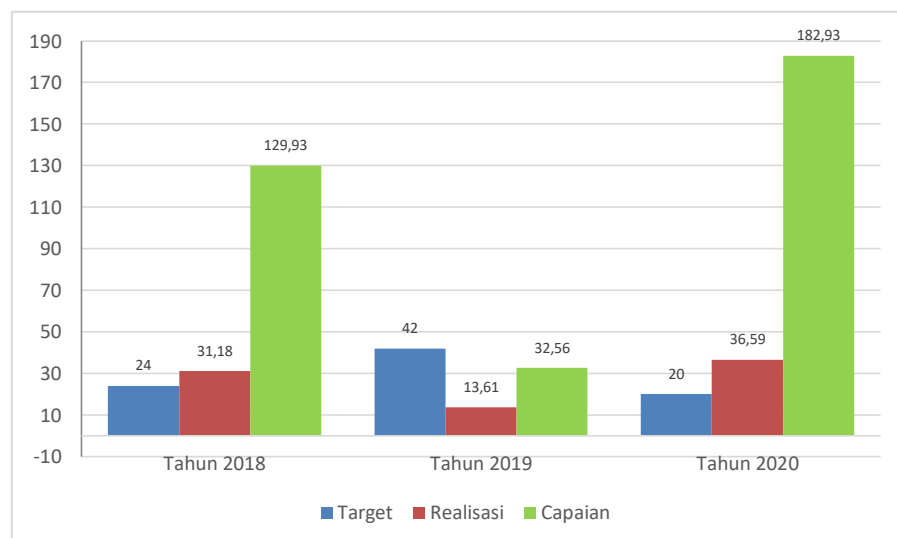
Jika dilihat dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi per triwulan mengalami peningkatan. Dari monev yang dilakukan, dapat diketahui dengan semakin besar jumlah sarana yang diperiksa, jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan jumlahnya akan meningkat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target terlihat bahwa capaiannya menjadi besar diatas 100%.

Target tahun 2020 yang ditetapkan dan diturunkan menjadi target triwulan masih berdasarkan target Balai Besar POM di Banjarmasin saja dengan baseline data di tahun sebelumnya dan belum mempertimbangkan target Loka POM, sedangkan realisasi merupakan realisasi gabungan antara Balai dan Loka. Perbedaan target ini selanjutnya akan dilakukan peninjauan kembali untuk menentukan target pada tahun 2021 dan target RPJMN di tahun 2024, dengan memperhitungkan apakah target itu sama sepanjang tahun ataukah merupakan target setahun yang dibagi menjadi triwulan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin **tidak dapat disimpulkan** karena target yang ditetapkan sebesar 20% dimana realisasi 36.59 % dengan capaian sebesar 182.95%.

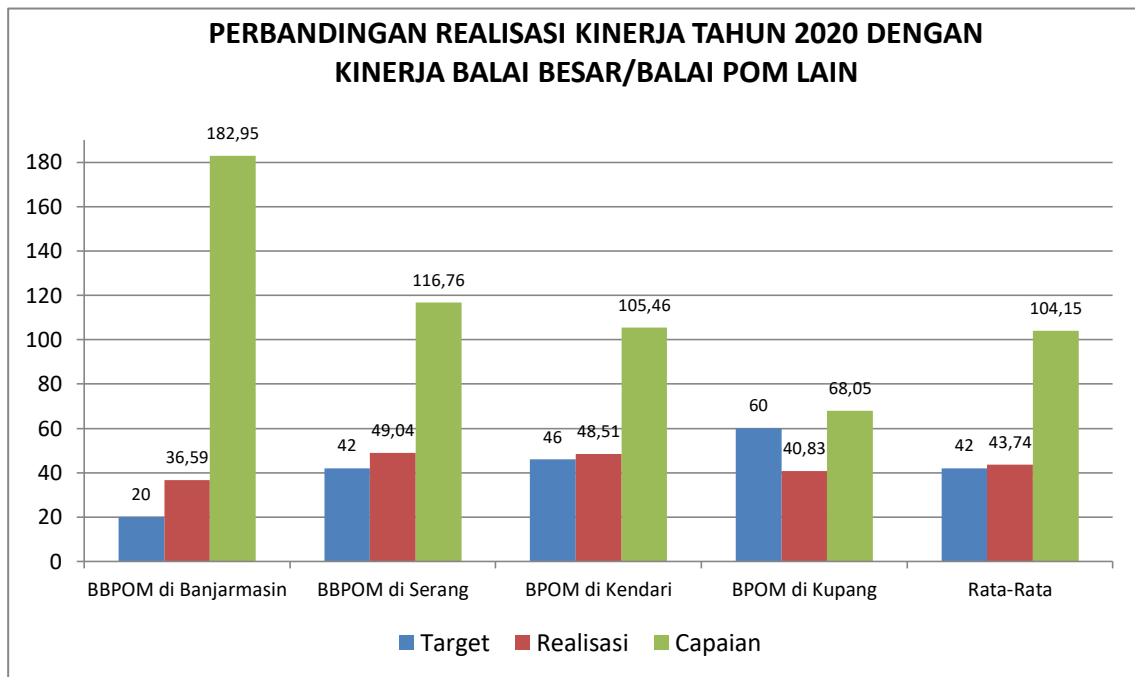
Jika dilihat dari grafik diatas maka persentase capaian tahun 2020 berada cukup jauh ditatas target tahun 2020 dan target di renstra 5 (lima) tahunan di tahun 2024. Perlu dlakukan analisis terhadap penentuan target Balai dengan mengacu target nasional dan upaya pencapaian target sebagai dasar dalam penentuan tindak lanjut untuk pemenuhan capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan di tahun 2024.

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.31
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018-2020
IKSK4.4 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi
Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan tahun 2018 sebesar 31,18 % dan tahun 2019 sebesar 13,81 % realisasinya mengalami penurunan, sedangkan realisasi di tahun 2020 naik dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya dengan angka 36,59 %



Grafik 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 6
IKSK4.4 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi
Ketentuan

Dengan melihat grafik tersebut terdapat beberapa variasi realisasi tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah. Setiap wilayah menetapkan target berdasarkan data capaian di tahun sebelumnya, dimana Balai Besar POM di Banjarmasin menetapkan target paling

rendah yaitu 20%. Capaian di tahun 2020 ini akan digunakan sebagai data dalam menentukan analisis penyebab realisasi kinerja jauh melebihi target.

Capaian di tahun 2020 adalah persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan jauh diatas target sebesar 182.93%. hal ini disebabkan oleh :

1. Perbedaan penetapan target kinerja di tahun 2020 antara BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu, yaitu sebagai berikut :

Unit Kerja	Target tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Gabungan Balai-Loka
BBPOM di Banjarmasin	20 %	27.85 %	36.59 %
Loka POM di kab. HSU	46 %	58.33 %	
Loka POM di kab Tanbu	46 %	45.00 %	

- Untuk Indikator kinerja yang sama dalam 1 provinsi terdapat penetapan target yang berbeda, sehingga menghasilkan realisasi yang berbeda juga.
- Target yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin belum memperhitungkan target dan capaian Loka POM ditahun sebelumnya. Target yang ditetapkan Balai Besar POM di Banjarmasin di tahun 2020 dimungkinkan hanya berdasarkan data realisasi Balai di tahun 2019, belum memperhitungkan capaian Loka sehingga nilainya sangat kecil, sementara Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM kab.Tanah Bumbu mengikuti target nasional yaitu sebesar 46 %.
- Pada tahun 2021 akan dilakukan peninjauan kembali target persentase sarana produksi obat dan makanan yang

memenuhi ketentuan dengan memperhitungkan data Balai Besar POM di Banjarmasin dan kedua Loka.

2. Kurangnya koordinasi internal antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu terkait penetapan target, pencapaian target dan *sharing* informasi dalam penggunaan Pedoman tools pengawasan dalam penentuan sarana memenuhi ketentuan atau tidak.
3. Keterbatasan jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Hanya terdapat 10 industri kosmetik gol A dan B, 2 sarana IOT, 3 sarana UKOT 58 Industri pangan MD dan selebihnya adalah sarana industri rumah tangga pangan (IRTP). Dengan meningkatnya jumlah target pengawasan sarana produksi maka penambahan sarannya adalah sarana IRTP, Sementara industri rumah tangga pangan (IRTP) mayoritas pemeriksaan dengan hasil TMK. Semakin tinggi jumlah sarana PIRT yang diperiksa, semakin rendah persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi petugas Balai dan Loka dalam memberikan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik.

Untuk meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,76 %, dengan capaian kinerja sebesar 182,95%, Indeks Efisiensi sebesar 1,83 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,83 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020

sebesar 88 %. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran tersebut masih dinilai **efisien** karena dapat memberikan capaian/output lebih besar.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	182,95%	99,76%	1,83	0,83	88 %

Tabel 3.19

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK4.4 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Berdasarkan **Analisis penyebab realisasi kinerja** pada tahun 2020, pada tahun 2021 akan dilakukan riview penetapan target dan upaya untuk meningkatkan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan untuk memenuhi pencapaian target. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banjarmasin mengambil beberapa upaya sebagai tindak lanjut berupa :

1. Penetapan target selain mengacu pada terget nasional, juga memperhitungkan bahwa target adalah target bersama, berdasarkan perhitungan capaian di masing-masing Balai dan Loka
2. Mengadakan diskusi internal antara tenaga pengawas Balai dan Loka sebagai evaluasi secara periodik untuk membahas update peraturan dan tools pengawasan sarana dalam rangka peningkatan kompetensi petugas pengawas.
3. Membuat perencanaan dan meminimalisir permasalahan terutama pemeriksaan ke sarana produksi dengan melaksanakan Juknis pemeriksaan sarana secara daring untuk memperoleh kesimpulan

yang tepat dalam pemeriksaan sarana yang menerapkan pembatasan pengunjung terkait protocol Covid-19.

**IKSK
4.5**

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target	Realisasi	Capaian	Status
55	59,96	109,02	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

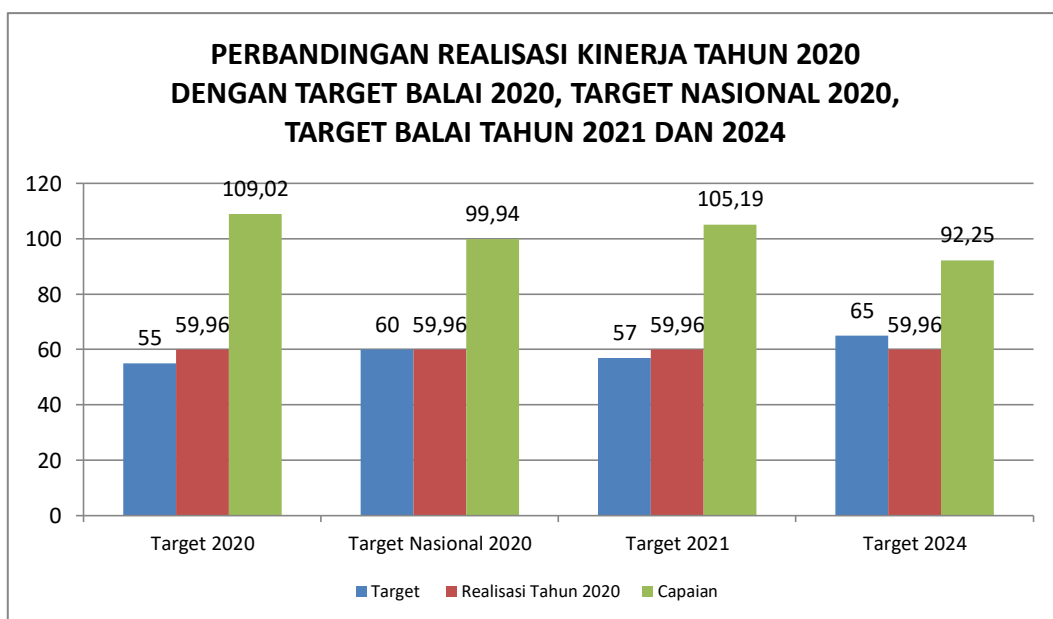
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan / jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Penetapan target balai lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional, karena mengacu pada capaian di tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan target nasional, maka capaiannya sebesar 99,94%



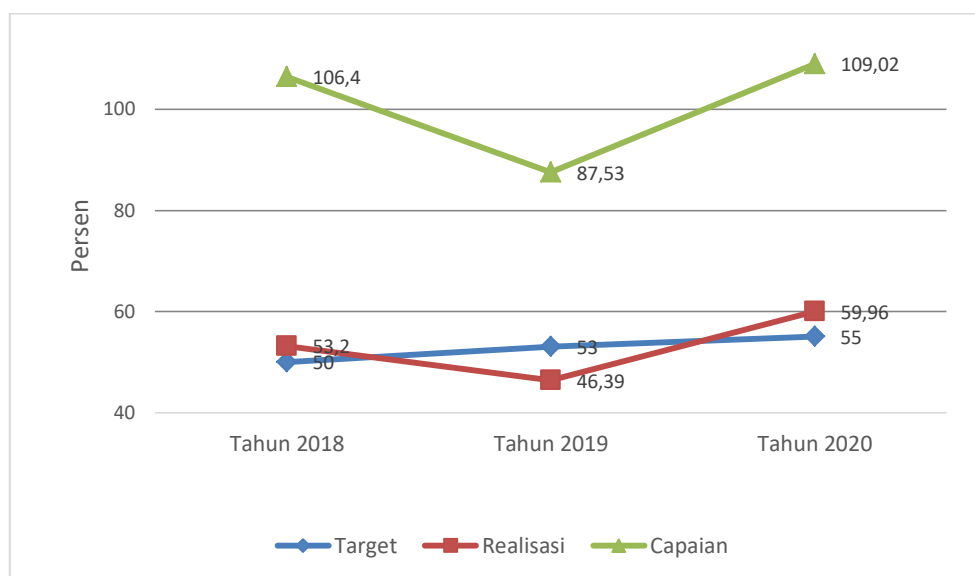
Grafik 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah bumbu kepada 542 sarana dengan hasil 325 sarana memenuhi ketentuan dan 217 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan

yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 109.02 % dengan kriteria **“baik”**.

Capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

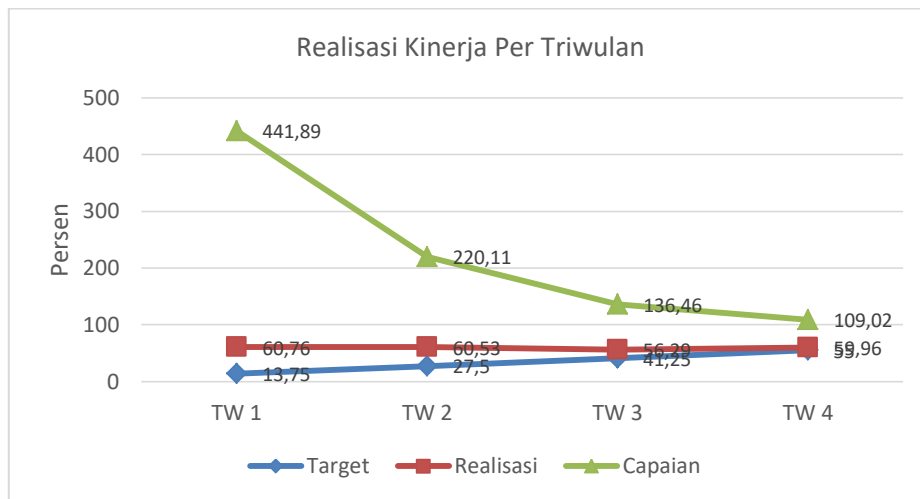


Grafik 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Per Tahun 2018-2020
ISK4.5 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi
Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 46.39 % dengan capaian 87.53%. Peningkatan persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan menggambarkan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam pendistribusian obat dan makanan. Sarana pelayanan Kefarmasian memenuhi ketentuan dalam memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat. Salah satu sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan tercapai.

Apabila dilihat berdasarkan pada capaian per triwulan akan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

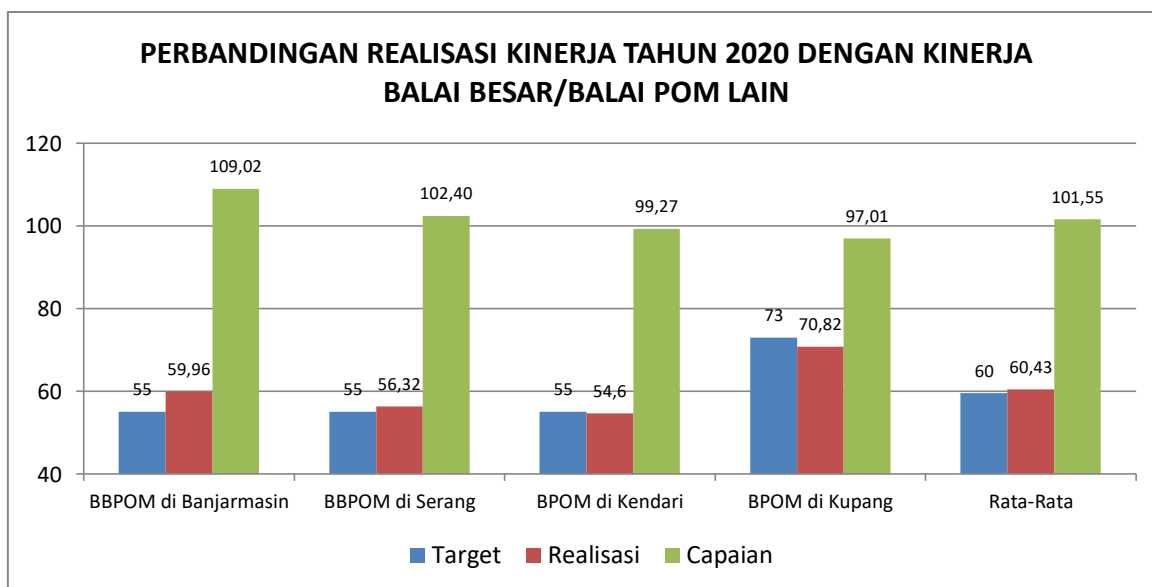


Grafik 3.35

**Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
IKSK4.5 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi
Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Jika dilihat dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan ketiga mengalami penurunan, dan meningkat di triwulan keempat. Sedangkan penetapan target tahunan yang diturunkan menjadi target triwulan bukanlah target yang sama /flat sepanjang tahun tetapi merupakan target setahun dibagi menjadi 4 triwulan, sehingga jika dibandingkan dengan target per triwulan terlihat bahwa capaiannya menjadi besar diatas 100% karna realisasi per triwulan merupakan realisasi gabungan terhadap semua sarana yang dilakukan pemeriksaan.

Target Indikator Kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sebesar 55 %, data capaian per triwulan yang dihasilkan belum bisa menggambarkan pemenuhan Indikator kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan per triwulan secara representatif terhadap target per triwulan. Seharusnya target per triwulan adalah sama dengan target pertahun. Dari monev yang dilakukan, dapat diketahui dengan semakin besar jumlah sarana yang diperiksa, jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan jumlahnya akan menurun, karena keragaman jenis sarana dan jenis temuan saat pemeriksaan. Dengan adanya pengawasan seiring dilakukan pembinaan melalui perbaikan CAPA diharapkan dapat meningkatkan persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan



Grafik 3.36

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK4.5 Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi
Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Setiap wilayah mempunyai karakteristik sarana distribusi yang berbeda-beda, akan tetapi jika dilihat pada grafik diatas Balai Besar POM di Serang, Balai POM di Kendari dan Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai target yang sama yaitu sebesar 55 % dengan realisasi yang hampir sama, sedangkan Balai POM di Kupang menetapkan target yang lebih tinggi dengan realisasi yang lebih tinggi juga.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung melaksanakan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,71 %, dengan capaian kinerja sebesar 109,02%, Indeks Efisiensi sebesar 1,09 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,09 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran untuk kegiatan yang berdampak pada Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dinilai **efisien**.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	109,02%	99,71%	1,09	0,09	100 %

Tabel 3.20

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK4.5 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Berdasarkan **Analisis realisasi kinerja** pada tahun 2020, untuk Indikator Kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dalam upaya pencapaian target tahun 2021 dan pencapaian target sesuai renstra ditahun 2024, maka Balai Besar POM di Banjarmasin selalu berkoordinasi dengan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu dalam pencapaian target.

Dalam melakukan pemeriksaan sarana diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CAPA sebagai perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Dengan adanya perbaikan CAPA, diharapkan menjadi komitmen para pelaku usaha dalam memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**IKSK
4.6**

Indeks Pelayanan Publik

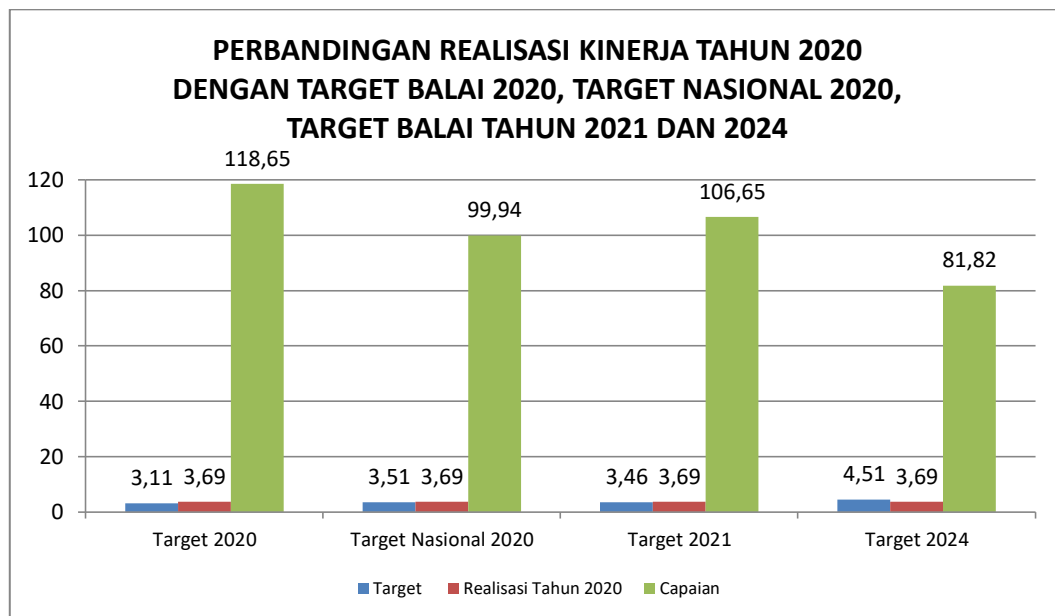
Target	Realisasi	Capaian	Status
3,11	3,69	118,65	Sangat Baik

Indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin di tahun 2020 realisasinya adalah 3,69 (baik), lebih tinggi dibanding target yaitu 3,11 (kriteria baik-dengan catatan), sehingga capaian terhadap target adalah 118,65%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu :

- 1) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi, responsivitas, integritas.
- 3) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan ruang parkir, ruang tunggu, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, dan *front office*.
- 4) Aspek sistem informasi dan konsultasi terdiri dari sarana konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.



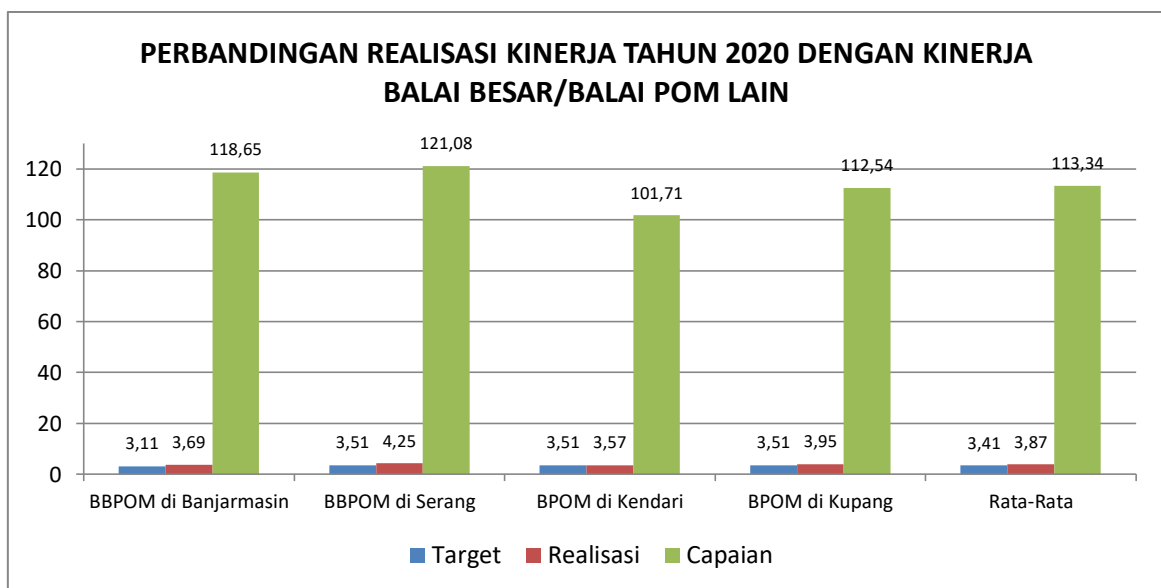
Grafik 3.37

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik**

Capaian sudah masuk dalam kriteria **sangat baik**, tetapi masih perlu perbaikan dan peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun

2019, indeks pelayanan publik meningkat dari 2,69 di tahun 2019 dan 3,69 di tahun 2020. Target indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 4,51, untuk mencapai nilai ini, perlu diupayakan semua aspek yang perlu pembenahan dan peningkatan agar pelayanan prima dapat diterapkan sesuai target yang telah ditentukan.

Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin (3,69) jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di Serang yang mencapai nilai 4,25 dan Balai POM di Kupang (3,95), nilainya lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan indeks penilaian publik Balai POM di Kendari (3,57), realisasinya lebih tinggi. Dari beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas, Balai Besar POM di Serang dan Balai POM di Kupang telah memenuhi semua kriteria penilaian sesuai ketentuan dan standar.



Grafik 3.38
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik

Faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin dibanding dengan Balai Besar POM di Serang adalah masih adanya kekurangan yang dipersyaratkan di dalam sistem pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin. Oleh karena itu, sebagai nilai pengungkit ke depannya, Balai Besar POM di Banjarmasin harus memperbaiki dan melengkapi aspek dalam system pelayanan antara lain : melengkapi *subsite* dengan informasi pelayanan dan pengaduan, terkait standar pelayanan, hasil SKM, dan informasi seputar Obat dan Makanan, menyampaikan maklumat pelayanan dan hasil survei kepuasan masyarakat kepada publik melalui baliho dan media cetak, menyediakan loket untuk pengguna berkebutuhan khusus, serta tetap menciptakan inovasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 118,65 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,19 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,19, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelayanan publik dinilai **efisien** dalam mencapai output berupa Indeks Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-------------------	------------------	--------------------------	----	----	------------

Indeks Pelayanan Publik	118,65 %	100 %	1,19	0,19	100%
-------------------------	----------	-------	------	------	------

Tabel 3.21
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik

Dilihat dari aspek standar pelayanan publik, yang perlu dilakukan kedepannya adalah pada saat proses penyusunan standar pelayanan, Balai Besar POM di Banjarmasin harus melibatkan masyarakat dan lintas sektor, selama ini standar disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan dari sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, belum mengakomodir kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam hal publikasi, maklumat pelayanan telah dipublikasikan ke masyarakat luas melalui media sosial, poster dalam ruang pelayanan, namun belum disampaikan melalui media cetak dan baliho. Informasi terkait hasil survei kepuasan masyarakat juga masih perlu perluasan dalam hal publikasi, tidak cukup hanya dipasang di ruang pelayanan dan media sosial, tetapi juga perlu dimuat dalam bentuk banner, baliho (luar ruang), dan media cetak.

Kompetensi dan kesiapan petugas dalam merespon pelanggan sudah sangat baik. Yang perlu ditingkatkan adalah pemberian sanksi kepada petugas pelayanan apabila ada pelanggan yang menerima pelayanan kurang baik. Untuk pemberian penghargaan juga perlu dilakukan kepada petugas, hal ini dapat dari disiplin, kecepatan merespon, kemudahan dalam memberikan informasi dan kesediaan melayani pelanggan dengan hati.

Untuk sarana prasarana, masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti loket untuk pelanggan berkebutuhan khusus dan penyediaan

kloset jongkok. Pelayanan informasi, pengaduan dan konsultasi sudah sangat baik, yang masih perlu dikembangkan adalah dokumentasi pelayanan informasi dan pengaduan memudahkan untuk diakses di *website*. Inovasi pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin di tahun 2020 adalah adanya rubrik 'Anda Bertanya BPOM Menjawab', bekerjasama sama dengan media cetak milik *stakeholder* yaitu Bulletin Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan yang dimuat pertriwulan, dimulai dari tahun 2017.

**SK
5**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
3. Jumlah Desa Pangan Aman
4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
5.1**

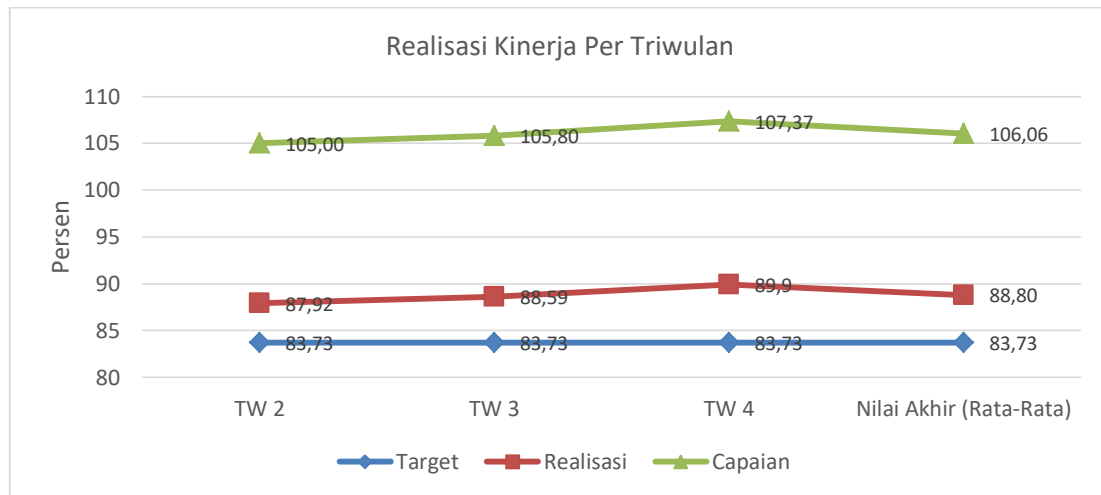
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Status
83,73	88,80	106,06	Baik

Sasaran strategis 5 meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dilakukan dengan penetapan indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Ada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang disampaikan, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra 2020–2024, dan tidak ada pengukuran di tahun-tahun sebelumnya.

Penilaiannya dimulai pada triwulan II, dan nilai akhirnya adalah rata-rata dari nilai triwulan yang terdapat pelaksanaan KIE. Balai Besar POM di Banjarmasin, melaksanakan pada triwulan II, III dan IV, sehingga nilai akhirnya yang merupakan rata-rata dari nilai ketiga triwulan tersebut adalah 8,80 dengan perincian nilai triwulan sebagai berikut :

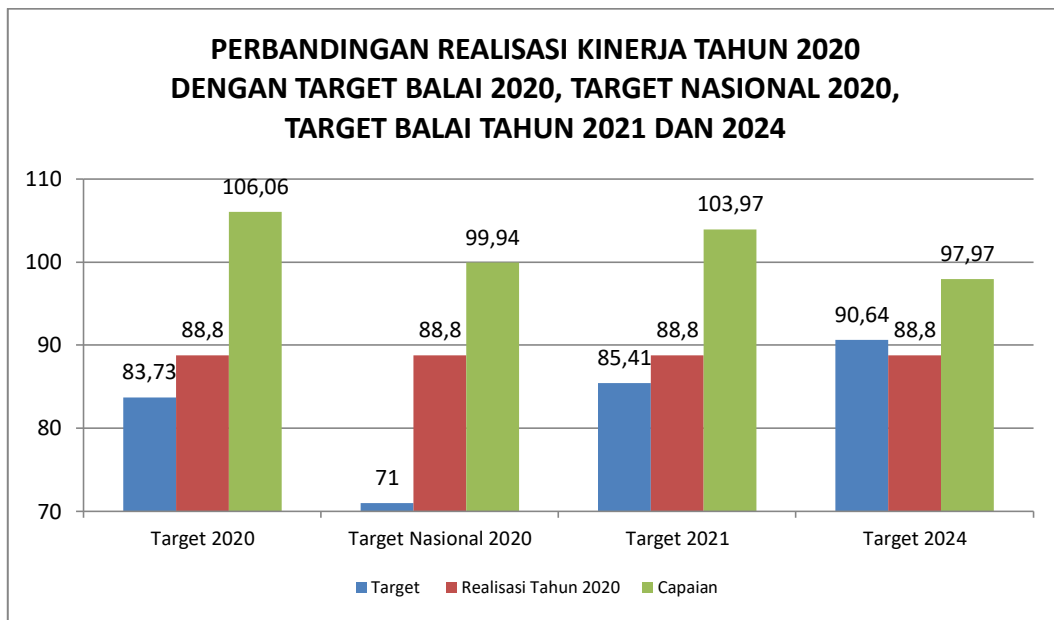


Grafik 3.39
Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
IKSK5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 88,8, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 83,73. Capaian terhadap target adalah 106,06% (**baik**). Ini artinya, KIE yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin masuk kategori **sangat efektif**. Survei dilakukan setiap triwulan terhadap masyarakat yang mendapat informasi baik secara langsung seperti penyuluhan, bimtek dan *talkshow*, maupun masyarakat yang secara tidak langsung mengakses informasi Obat dan Makanan seperti melalui media sosial *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* BBPOM di Banjarmasin dan *WhatsApp* grup.

Terkait sumber informasi yang diperoleh, responden sebagian besar mengetahui informasi obat dan makanan dari *Facebook* dan *Instagram*, tetapi lainnya juga menjawab dari *Youtube* dan *WhatsApp* grup. Dari aspek penilaian pemahaman terhadap isi KIE yang disampaikan secara langsung, responden ingat dan memahami apa

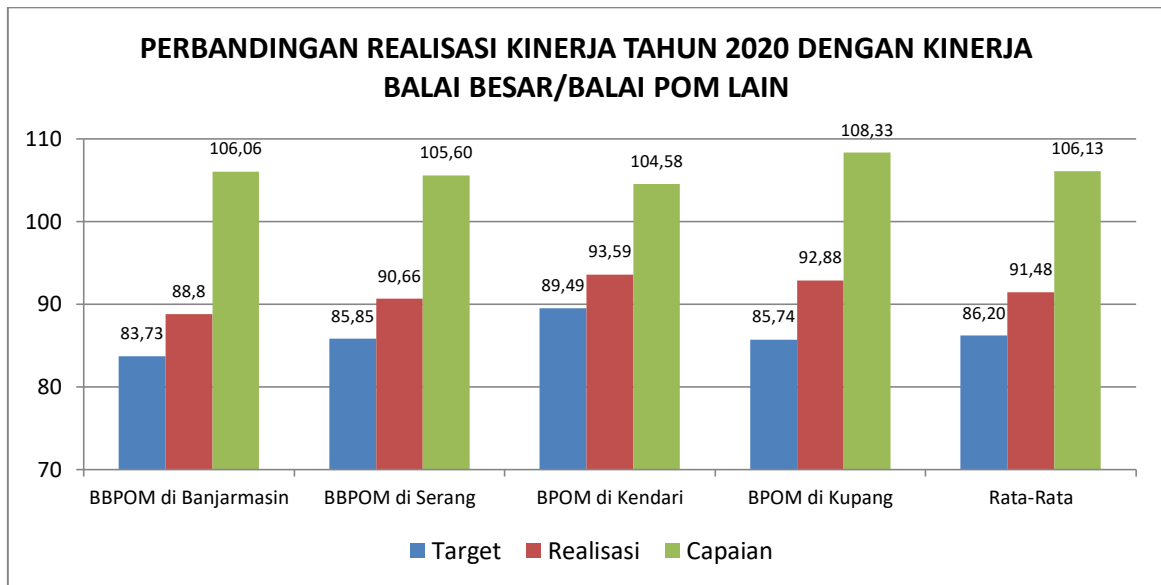
yang disampaikan narasumber. Responden juga menilai bahwa KIE Obat dan Makanan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan sebagian besar juga berminat jika dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan dan KIE dari Badan POM.



Grafik 3.40

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Target efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 90,64. Dilihat dari realisasi target pada tahun 2020 yang mencapai angka 88,8, tetap perlu upaya perbaikan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas KIE yang dilakukan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat akan Obat dan Makanan bertambah, dan keberadaan BBPOM di Banjarmasin semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



Grafik 3.41
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin (89,9) lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang (90,66), realisasi Balai POM di Kendari (93,59) dan Balai POM di Kupang (92,85).

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 98,51 %, dengan capaian kinerja sebesar 106,06 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,08 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dinilai **efisien** dalam mencapai target tingkat efisiensi KIE.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	106,06 %	98,51%	1,08	0,08	100 %

Tabel 3.22

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mengungkit nilai adalah menambah frekuensi KIE di media sosial, khususnya pada hari libur dan di luar hari kerja, sehingga masyarakat yang mengakses media sosial di hari Sabtu, Minggu dan hari libur tetap mendapat informasi dan edukasi Obat dan Makanan. Pengembangan konten atau materi pada media sosial juga perlu dilakukan, tidak terbatas hanya pada infografis tetapi juga membuat video dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat. Diupayakan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memasang poster di luar ruang seperti taman, tempat wisata agar mudah terbaca oleh masyarakat luas.

**IKSK
5.2**

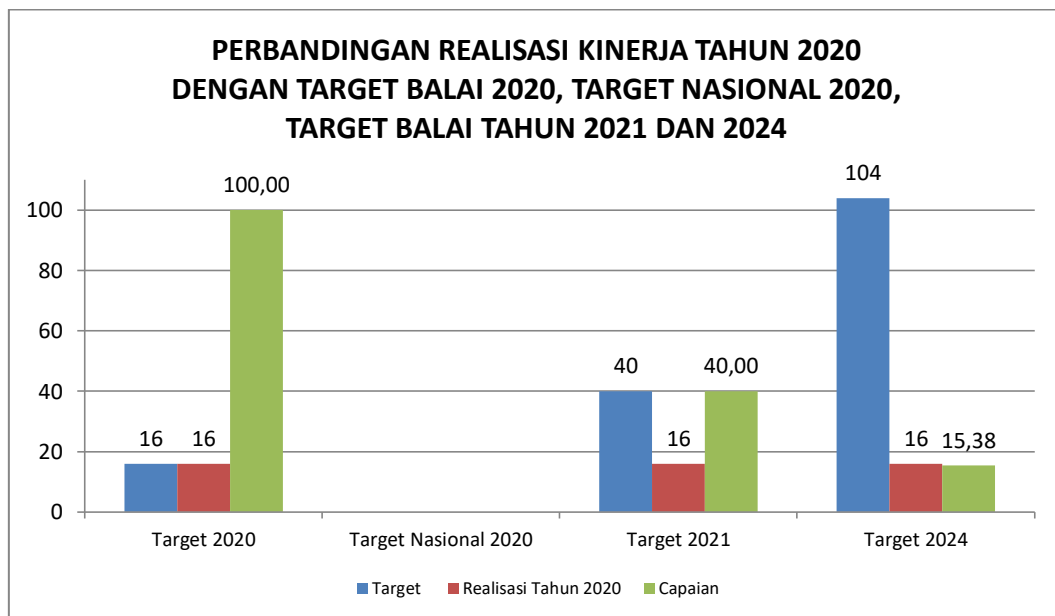
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target	Realisasi	Capaian	Status
16	16	100	Baik

Pada tahun 2020, target untuk indikator PJAS aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 16 sekolah. Jumlah ini berubah dari target awal yang seharusnya 20 sekolah. Berkurangnya target sekolah dikarenakan pada masa pandemi Covid 19 wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar termasuk zona merah, sehingga pembelajaran dilangsungkan secara daring selama April – Desember 2020. Pertemuan tatap muka seperti pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah yang melibatkan komunitas sekolah sebagai peserta, kegiatan mobil laboratorium keliling, audit kantin sekolah dan audit surveilan kantin sekolah yang melibatkan kantin dan penjual pangan di sekitar sekolah, ditiadakan. Turunnya jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 ini akan diakomodir di tahun berikutnya, sehingga tidak mempengaruhi total jumlah sekolah yg diintervensi keamanan pangannya hingga 2024. Dengan dasar inilah, capaian di tahun 2020 ditetapkan 80% secara nasional karena ada beberapa tahapan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Target sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2020 adalah 16 sekolah dan realisasi yang dicapai sama yaitu 16 sekolah, jadi capaian terhadap target adalah 100%. Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, serta monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, yang meliputi tiga tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah, intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah dan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 1.

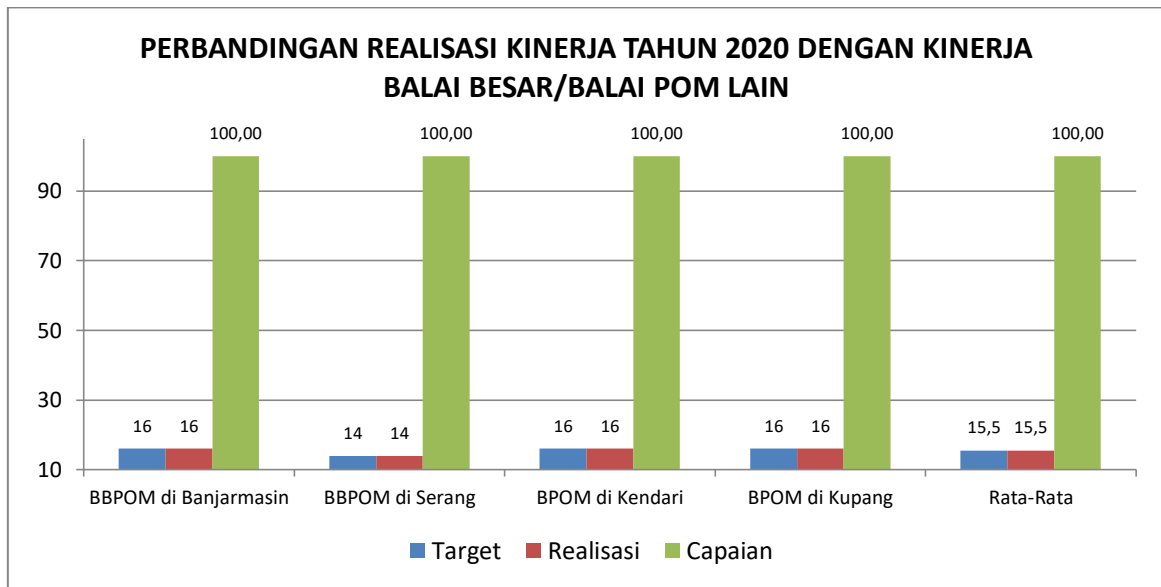
Pada tahun 2019, capaian terhadap target adalah 100%, dengan jumlah sekolah yang diintervensi 590. Perbedaan jumlah sekolah yang signifikan antara target di tahun 2019 dan tahun 2020 karena tahun 2020 merupakan awal Rencana Strategis BPOM 2020-2024, sedangkan tahun 2019 masuk ke periode renstra sebelumnya.



Grafik 3.42

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024 IKSK5.2 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target sekolah di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan kondisi wilayah. Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Serang menetapkan target sekolah 18. Balai POM di Kendari target sekolahnya adalah 14 dan target di Balai POM di Kupang adalah 16 sekolah, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.



Grafik 3.43

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK5.2 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kendala yang ada selama kegiatan intervensi PJAS aman berlangsung di tahun 2020 adalah terbatasnya cara penyampaian informasi atau materi kepada komunitas sekolah. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, bagaimana petugas balai mendorong agar terbentuknya tim keamanan pangan sekolah hingga memantau kader keamanan pangan untuk mengintervensi komunitas sekolah, memerlukan upaya dan semangat yang tinggi kepada pihak sekolah. Petugas balai harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat. Penyampain informasi yang dilakukan dengan tatap muka akan berbeda hasilnya dengan informasi yang disampaikan secara daring. Pertanyaan dan jawaban yang diterima terbatas, selain kurang jelasnya materi yang disampaikan, juga terkendala pada fasilitas dan jaringan. Sehingga

dapat dimengerti jika pemahaman yang diterima peserta dan komunitas sekolah belum seperti yang dipersyaratkan.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,97 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran dinilai efisien karena dapat mencapai capaian sesuai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100 %	99,97 %	1,00	0,00	100 %

Tabel 3.23

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK5.2 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

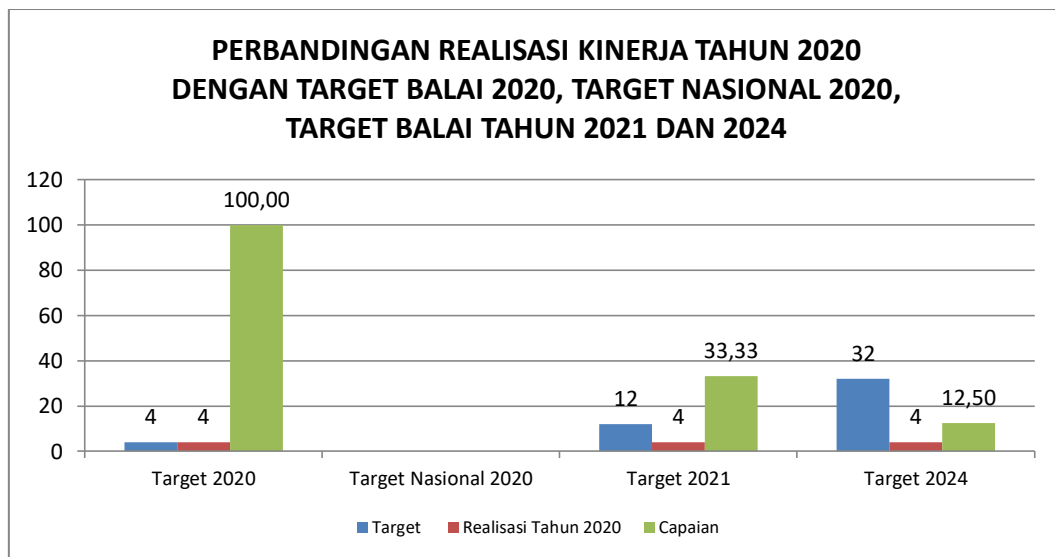
Program intervensi PJAS aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target sekolah baru dan ada sekolah yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Di tahun-tahun mendatang, keamanan pangan tidak hanya slogan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan.

**IKSK
5.3****Jumlah Desa Pangan Aman**

Target	Realisasi	Capaian	Status
4	4	100	Baik

Sasaran strategis 5 meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dilakukan dengan penetapan indikator jumlah desa pangan aman. Pada tahun 2020, target untuk indikator desa pangan aman yang diintervensi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 4 (empat) desa. Jumlah ini berubah dari target awal yang seharusnya 6 (enam) desa. Berkurangnya target desa dikarenakan pada masa pandemi Covid 19 wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar termasuk zona merah, sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah membatasi pertemuan tatap muka. Pada perencanaan di akhir tahun 2019, dua kabupaten yang akan diintervensi program keamanan pangan adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala. Tetapi pada pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menunda kegiatan, hal ini dikarenakan kasus Covid 19 masih tinggi hingga pada bulan Mei -Juli, saat akan dilaksanakan advokasi lintas sektor. Perubahan lokus pelaksanaan Keamanan Pangan Terpadu disampaikan ke pusat dan ditindaklanjuti dengan koordinasi BBPOM di Banjarmasin ke Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagai alternatif lokasi pelaksanaan Program Keamanan Pangan tahun 2020.

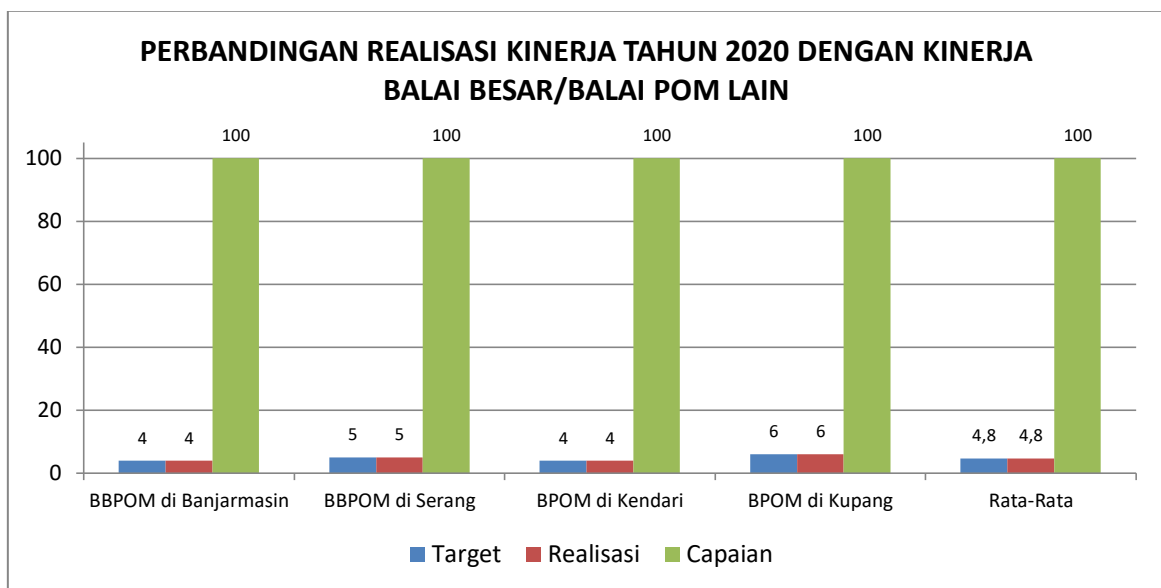
Realisasi jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2020 adalah empat desa, dan diperoleh capaian terhadap target sebesar 100%. Sembilan tahapan Program Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan *gimmick* dan *rapid test kit*, pengawalan desa pangan aman di tahun sebelumnya, pelatihan kader keamanan pangan desa, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan keamanan pangan, monitoring dan evaluasi desa pangan aman dan lomba desa pangan aman. Pada tahun 2020, ada 3 (tiga) desa yang mereplikasi kegiatan desa pangan aman dengan memasukkan anggaran di Pemerintah Daerah masing-masing untuk kegiatan tahun 2021, yaitu Desa Pematang Kabupaten Tabalong, Desa Sungai Rasau Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan Labuan Amas Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa pangan aman oleh Pemerintah Kabupaten.



Grafik 3.44

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK5.3 Jumlah Desa Pangan Aman**

Dibandingkan pada tahun 2019, desa yang diintervensi berjumlah 3 (tiga) desa, dengan realisasi 3 (tiga) desa, sehingga capaian terhadap target adalah 100%. Perbedaan jumlah desa antara target di tahun 2019 dan tahun 2020 karena tahun 2020 merupakan awal Rencana Strategis BPOM 2020-2024, sedangkan tahun 2019 masuk ke periode renstra sebelumnya. Pada tahun 2019 dipilih hanya satu kabupaten yang terdiri dari tiga desa sebagai lokus kegiatan, sedangkan pada tahun 2020 program desa pangan aman dilaksanakan di dua kabupaten, dengan lokus 6 (enam) desa pangan aman.



Grafik 3.45

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK5.3 Jumlah Desa Pangan Aman**

Target desa pangan aman di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah desa dan kondisi wilayah. Pada tahun 2020, target desa BBPOM di Serang adalah 5, Balai POM di Kendari target desa adalah 4

dan target di Balai POM di Kupang adalah 6 desa, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,28 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,01 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dinilai **efisien** karena kegiatan yang berkaitan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	100 %	99,28 %	1,00	0,01	100 %

Tabel 3.24
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Kegiatan advokasi, bimtek kader dan bimtek komunitas desa dilaksanakan dalam bentuk pertemuan. Di kondisi pandemi Covid 19, kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, penyediaan *hand sanitizer*, wajib menggunakan masker dan tempat duduk yang berjarak.

Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna. Perbedaan dengan tahapan di tahun 2019 adalah sekolah yang tidak aktif, pembelajaran dilakukan secara daring,

sehingga tidak ada sampling dan pengujian pangan jajanan di kantin dan lingkungan sekolah. Kader keamanan pangan yang dibentuk dari komunitas sekolah juga tidak melibatkan siswa, kader hanya terdiri dari guru dan komite sekolah. Ini dikarenakan kasus Covid 19 cukup tinggi di daerah sehingga tidak memungkinkan siswa untuk beraktivitas langsung di luar rumah.

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk memfasilitasi dan sebagai *reward* kepada desa yang menerapkan praktek keamanan pangan, BBPOM di Banjarmasin memberikan dukungan kepada Desa Pematang di Kabupaten Tabalong untuk mengikuti lomba Desa Pangan Aman tahun 2020. Kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan para kader didokumentasikan dan akan menjadi contoh bagi desa lain. Hal ini juga sebagai penguatan, bahwa penerapan keamanan pangan tidak selalu memerlukan banyak anggaran. Dengan semangat dan kemauan para kader yang didukung oleh perangkat desa serta Pemerintah Daerah, keamanan pangan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyiapan bahan pangan, produksi, penyiapan, penyajian hingga pangan siap dikonsumsi.

**IKSK
5.4**

Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Target	Realisasi	Capaian	Status
2	2	100	Baik

Sasaran strategis 5 meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dilakukan dengan penetapan indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada tahun 2020, target untuk indikator pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 2 (dua) pasar yang berada di dua kabupaten. Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi tahun 2020 adalah dua pasar, dan diperoleh capaian terhadap target sebesar 100%.

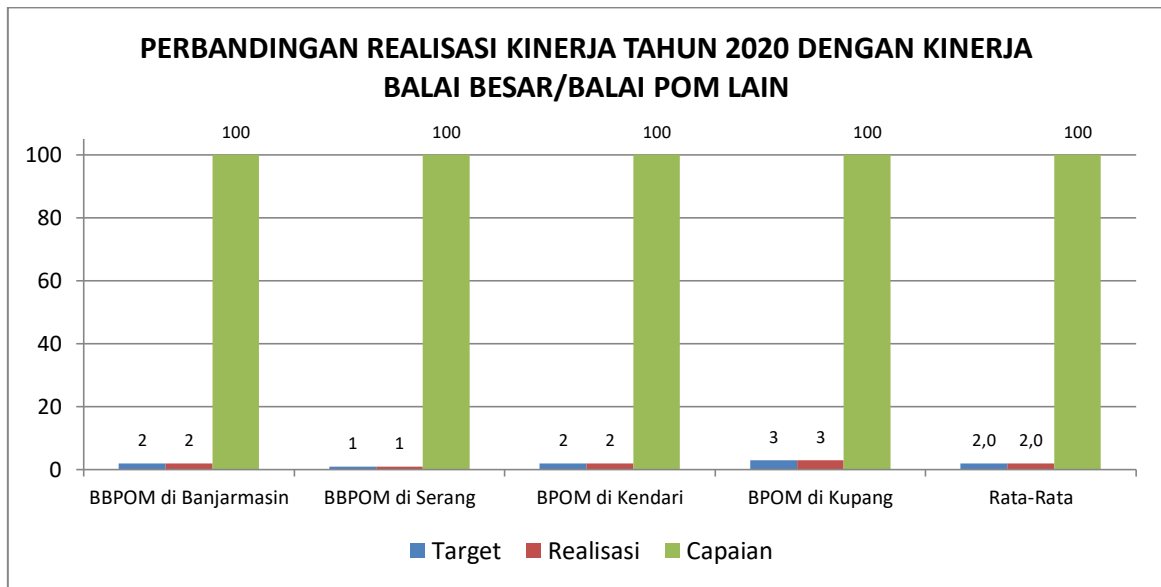
Delapan tahapan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar dan pelatihan fasilitator, monitoring dan evaluasi tahap 1, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap 2 dan lomba pasar aman dari bahan berbahaya. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memasukkan anggaran untuk kegiatan intervensi pasar aman di tahun 2021. Pasar yang menjadi lokus adalah pasar besar lainnya, selain Pasar Keramat yang telah dibina BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2020.



Grafik 3.46

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**

Pasar aman yang diintervensi pada tahun 2020 berjumlah dua pasar yang bertempat di dua kabupaten, sedangkan pada tahun 2019 hanya satu pasar aman yang diintervensi, di satu kabupaten. Capaian terhadap target di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 100%. Terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya, dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan sampling dan pengujian sampel di area pasar. Menurunnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat, merupakan sasaran dari intervensi pasar aman dari bahan berbahaya.



Grafik 3.47

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Target pasar aman dari bahan berbahaya di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah pasar dan kondisi wilayah. Pada tahun 2020, target pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Serang adalah 1, Balai POM di Kendari target pasar adalah 2 dan target di Balai POM di Kupang adalah 3 pasar, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 adalah, berubahnya lokus kabupaten yang dipilih sebagai tempat intervensi. Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan di akhir tahun 2019, telah dilakukan survey pasar di bulan Februari tahun 2020, karena kondisi masih normal. Tetapi dengan adanya wabah Covid 19, yang meningkat di Mei – Juni, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala membuat kebijakan untuk tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak, sehingga pada bulan Juni diputuskan lokus kegiatan Keamanan Pangan Terpadu berpindah tempat ke Kabupaten Tabalong. Data survey pasar yang telah diperoleh di Kabupaten Barito Kuala tidak dapat digunakan, dan BBPOM di Banjarmasin harus melaksanakan survey pasar kembali di Pasar Kalua Kab. Tabalong yang dipilih sebagai lokus baru, sehingga perlu merevisi anggaran yang ada dan terbatas.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,90 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran terkait paspasar aman dari bahan berbahaya dinilai telah **efisien**.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100 %	99,90 %	1,00	0,00	100 %

Tabel 3.25

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Untuk memfasilitasi dan sebagai *reward* kepada pasar yang menerapkan praktek keamanan pangan, Balai Besar POM di Banjarmasin memberikan dukungan kepada Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengikuti lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2020. Kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan para fasilitator didokumentasikan dan akan menjadi contoh bagi pasar di kabupaten lain. Permasalahan di Pasar Keramat adalah bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang mengalami bencana banjir di awal tahun 2021. Semua fasilitas rusak, sehingga kedepannya BBPOM di Banjarmasin akan berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten untuk memberikan dukungan kepada petugas pasar dan fasilitator dalam menata ulang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya.

**SK
6**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai

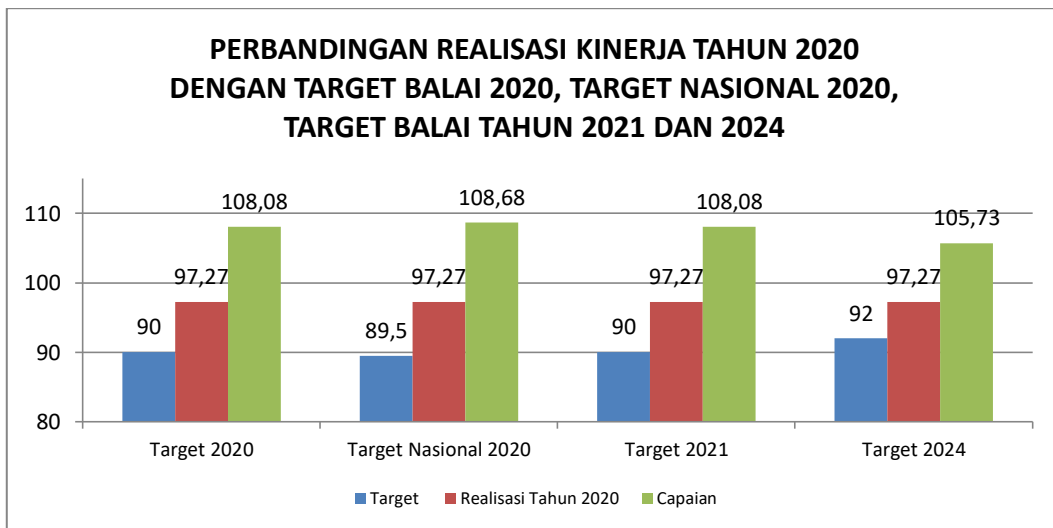
Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
6.1**

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

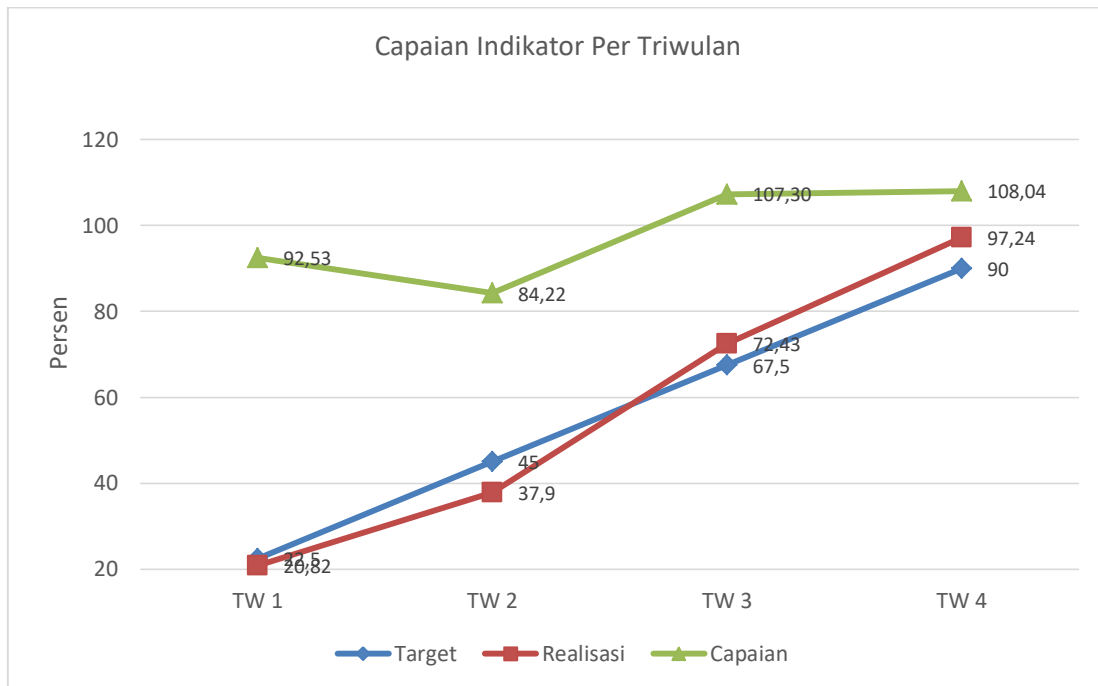
Target	Realisasi	Capaian	Status
90	97,27	108,08	Baik

Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya (tahun 2019) meskipun terdapat indikator yang serupa yaitu Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi definisi operasionalnya berbeda.



Grafik 3.48

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

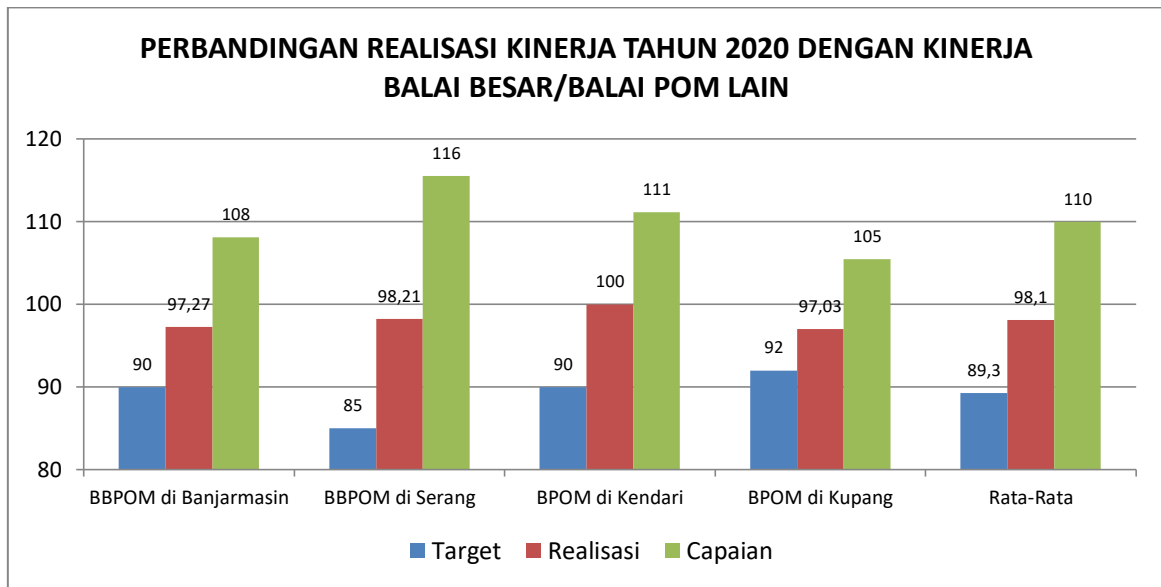


Grafik 3.49

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Karena target Balai (90%) hampir sama dengan target nasional (89,5%), maka capaian kinerja terhadap target nasional hanya sedikit lebih tinggi (108,68%). Demikian juga apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (tahun 2024) yang sebesar 92%, capaian sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar bernilai baik (105,73%).



Grafik 3.50

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai/Balai Besar POM lainnya dalam *cluster* yang sama, capaian BBPOM di Banjarmasin (108,08%) lebih tinggi dari capaian BPOM di Kupang (107,81%), namun lebih rendah dari capaian BBPOM di Serang (115,54%) dan BPOM di Kendari (108,70%). Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan target dari masing-masing balai, akan tetapi dapat dilihat bahwa capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin sudah cukup tinggi dan melebihi target baik target balai maupun target nasional, ini berarti BBPOM di Banjarmasin sudah cukup baik dalam menerapkan teknik pemeriksaan dan pengujian yang sesuai dengan standar.

Definisi pemeriksaan sesuai standar yaitu meliputi pemeriksaan terhadap nomor izin edar, kadaluarsa, kemasan, dan penandaan. Sedangkan yang dimaksud pengujian sesuai standar yaitu pengujian

yang dilakukan memenuhi standar yang terdapat di pedoman sampling dan pengujian seperti pemenuhan terhadap parameter kritis pengujian.

Capaian yang cukup tinggi terhadap persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah BBPOM di Banjarmasin didukung oleh personil pemeriksa dan penguji sampel yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengujian. Selain itu juga dikarenakan adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkesinambungan kepada para personel pengujian serta adanya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga mutu pengujian di laboratorium seperti uji profisiensi, verifikasi metode pengujian dan kalibrasi terhadap peralatan laboratorium.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,08 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada kegiatan terkait dinilai telah **efisien**.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %	99,99 %	1,08	0,08	100 %

Tabel 3.26
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

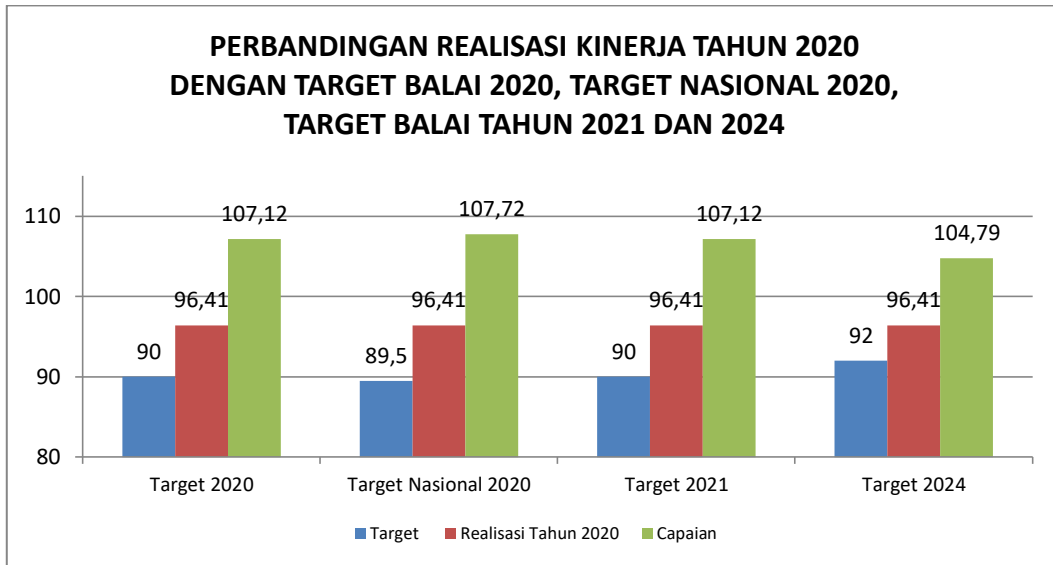
Kegiatan dan program yang perlu juga ditingkatkan secara berkesinambungan untuk menjaga pemenuhan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah peningkatan kompetensi petugas penguji obat dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, uji kolaborasi dan uji profisiensi baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun provider eksternal. Berkembangnya kemampuan uji diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah keamanan dan mutu obat yang sangat berpengaruh terhadap keabsahan hasil uji laboratorium obat BBPOM di Banjarmasin.

IKSK 6.2

Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

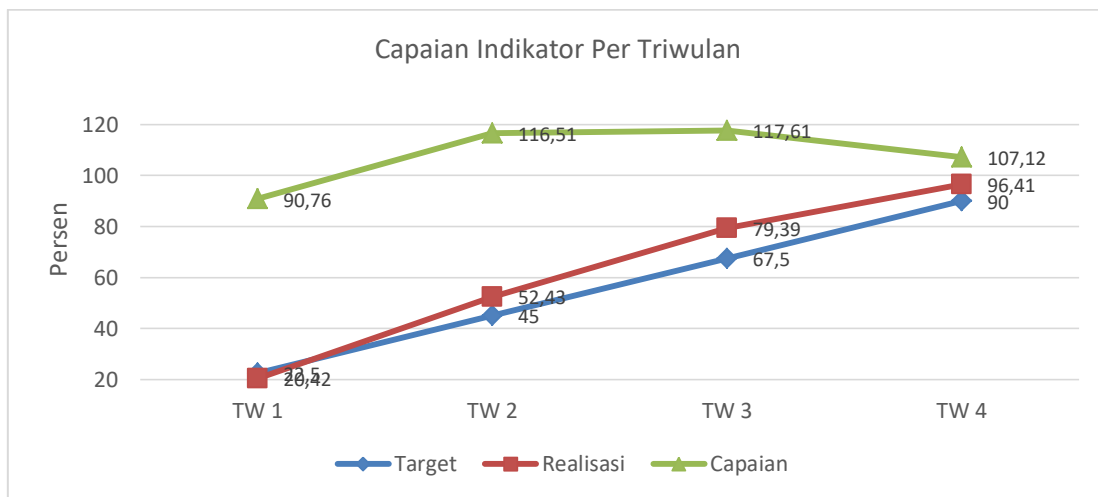
Target	Realisasi	Capaian	Status
90	96,41	107,12	Baik

Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya (tahun 2019) meskipun terdapat indikator yang serupa yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi definisi operasionalnya berbeda.



Grafik 3.51

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020, Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



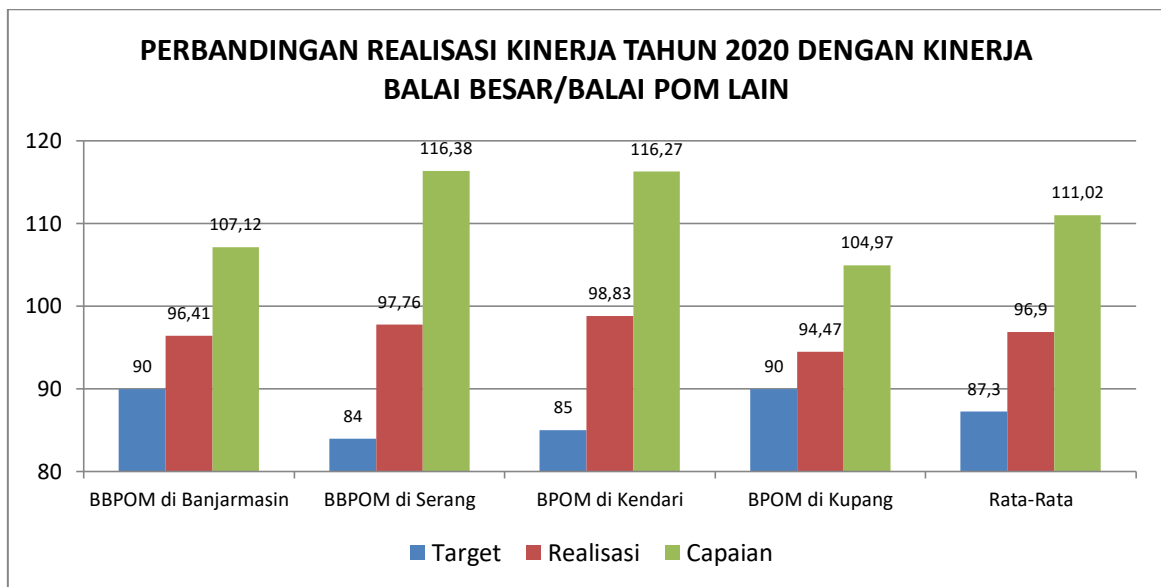
Grafik 3.52

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
IKSK6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Karena target Balai (90%) tidak berbeda signifikan dengan target nasional (89,5%), maka capaian kinerja terhadap target nasional hanya

sedikit lebih tinggi (107,72%). Demikian juga apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (tahun 2024) yang sebesar 92%, capaian sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar bernilai **baik** (107,12%).

Dari Grafik berikut dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai/Balai Besar POM lainnya dalam *cluster* yang sama, capaian BBPOM di Banjarmasin (107,12%) lebih tinggi dari capaian BPOM di Kupang (104,97%), namun lebih rendah dari capaian BBPOM di Serang (116,38%) dan BPOM di Kendari (116,27%).



Grafik 3.53
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perbedaan ini dapat terjadi karena Perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering

kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya promotif preventif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama.

Definisi pemeriksaan sesuai standar yaitu meliputi pemeriksaan terhadap nomor izin edar, kadaluarsa, kemasan, dan penandaan. Sedangkan yang dimaksud pengujian sesuai standar yaitu pengujian yang dilakukan memenuhi standar yang terdapat di pedoman sampling dan pengujian seperti pemenuhan terhadap parameter kritis pengujian.

Capaian yang cukup tinggi terhadap persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah BBPOM di Banjarmasin didukung oleh personil pemeriksa dan penguji sampel yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengujian. Selain itu juga dikarenakan adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada para personil pengujian serta adanya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga mutu pengujian di laboratorium balai seperti uji profisiensi, verifikasi metode pengujian dan kalibrasi terhadap peralatan laboratorium.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,98 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %,

Indeks Efisiensi sebesar 1,11 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,11 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada kegiatan terkait dinilai **efisien**.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	110,79 %	99,98 %	1,11	0,11	100 %

Tabel 3.27

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Kegiatan dan program yang perlu juga ditingkatkan secara berkesinambungan untuk menjaga pemenuhan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah peningkatan kompetensi petugas penguji Makanan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, uji kolaborasi dan uji profesiensi baik yang diselenggarakan oleh PPOMN maupun provider eksternal. Berkembangnya kemampuan uji diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah keamanan dan mutu Makanan yang sangat berpengaruh terhadap keabsahan hasil uji laboratorium obat BBPOM di Banjarmasin.

**SK
7**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

**IKSK
7.1**

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Status
81	89,69	110,73	Sangat Baik

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran/kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu ***meningkatkan efektifitas pengasawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa serta memberikan rasa aman pada seluruh warga***, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu ***Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan*** dengan sasaran strategis ***Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin***. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2020 Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan fungsi intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 10 (sepuluh) perkara, terdiri dari 8 perkara Balai Besar POM di Banjarmasin, 1 perkara Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan 1 perkara Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Selain itu pada tahun 2020 Balai Besar POM di Banjarmasin juga menyelesaikan perkara *carry over* tahun 2019 sebanyak 5 perkara.

Sebagaimana dalam Dokumen Renstra 2020-2024 Balai Besar POM di Banjarmasin, telah ditetapkan target indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin. Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 di wilayah Kalimantan Selatan dan seluruh wilayah Indonesia, sehingga dilakukan pemotongan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 Balai Besar POM di Banjarmasin yang digunakan untuk penanggulangan merebaknya wabah Covid-19 tersebut. Pemotongan anggaran pada kegiatan output perkara Balai Besar POM di Banjarmasin juga digunakan untuk kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat (Anggota DPR RI Komisi IX) yang dilaksanakan pada TW 4 tahun 2020.

Pemotongan anggaran ini diikuti dengan penurunan target jumlah perkara Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu dari yang semula 10 perkara, menjadi 6 perkara, terdiri dari 4 perkara Balai Besar POM di Banjarmasin, 1 perkara Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan 1 perkara Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Meskipun target jumlah perkara berubah, namun target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin tetap yaitu sebesar **81%**. Target tersebut mencakup

kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

Realisasi nilai kinerja Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2020 sebesar 89,69% yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	0	-	1,0000	-	0,15	15,00%
Tahap I	2	0	1,0000	0,4545	0,4	40,00%
P21	0	0	0,6667	0,4545	0,3	23,13%
Tahap II	4	5	0,6667	0,4545	0,15	11,56%
Realisasi Tahun 2020	6	-				89,69%
Realisasi Carry Over	-	5				
Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	6	5	11	11	100,00 %	89,69%
Target Perkara	6	5				

Tabel 3.28

Perhitungan Nilai Kinerja Indikator Keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan Tahun 2020

Realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan (81%), sehingga capaian terhadap target tahun 2020 yaitu sebesar **110,73%**.

Terdapat perbedaan definisi operasional indikator kinerja antara tahun 2020, tahun 2019, dan tahun 2018. Pada tahun 2020, definisi

operasional indikator kinerja adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dihitung dengan pembobotan setiap tahapan penyidikan. Sedangkan pada tahun 2018, definisi operasional indikator kinerja adalah Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan (SPDP). Namun pada Oktober 2018 seiring dengan adanya OTK baru, mengalami perubahan definisi operasional (revisi Renstra 2015-2019) menjadi Penyelesaian Perkara Hingga dilaksanakannya Tahap II yang juga menjadi definisi operasional indikator kinerja tahun 2019.

Akan tetapi jika dapat dibandingkan, target kinerja pada tahun 2020 lebih rendah daripada target kinerja tahun 2019 yaitu 90%. Namun realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019, yaitu realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 68,75% dan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 76,39%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018, target realisasi kinerja pada tahun 2020 lebih tinggi daripada target realisasi kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 50%. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 90% dan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 180%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

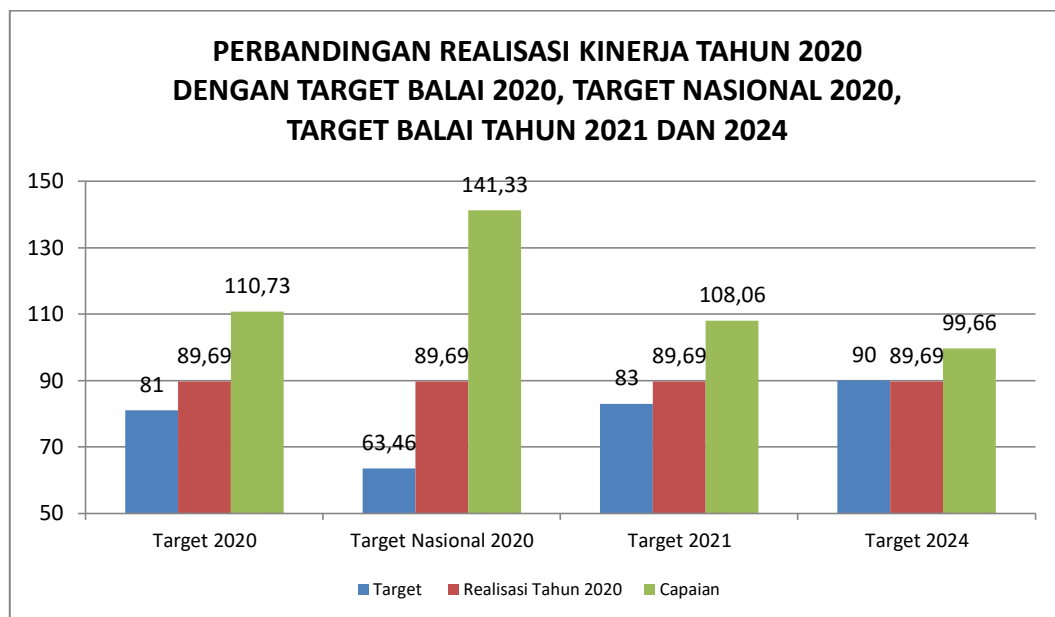
Tahun	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
2018	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin (OTK baru)	50%	90%	180%
2019	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	90%	68,75%	76,39%

Tahun	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
2020	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81%	89,69%	110,73%

Tabel 3.29

Perbandingan Kinerja Tahun 2018-2019

IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



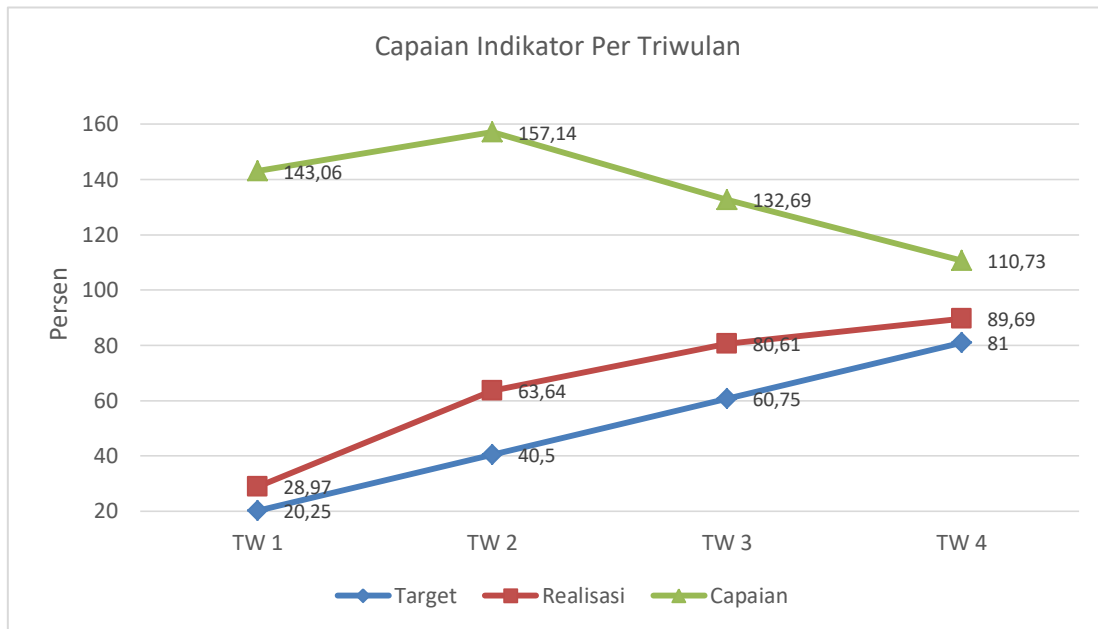
Grafik 3.54

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 realisasi kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 89,69%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, namun sedikit lebih rendah dari target kinerja tahun 2024. Sehingga diharapkan Balai

Besar POM di Banjarmasin akan mampu mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024.

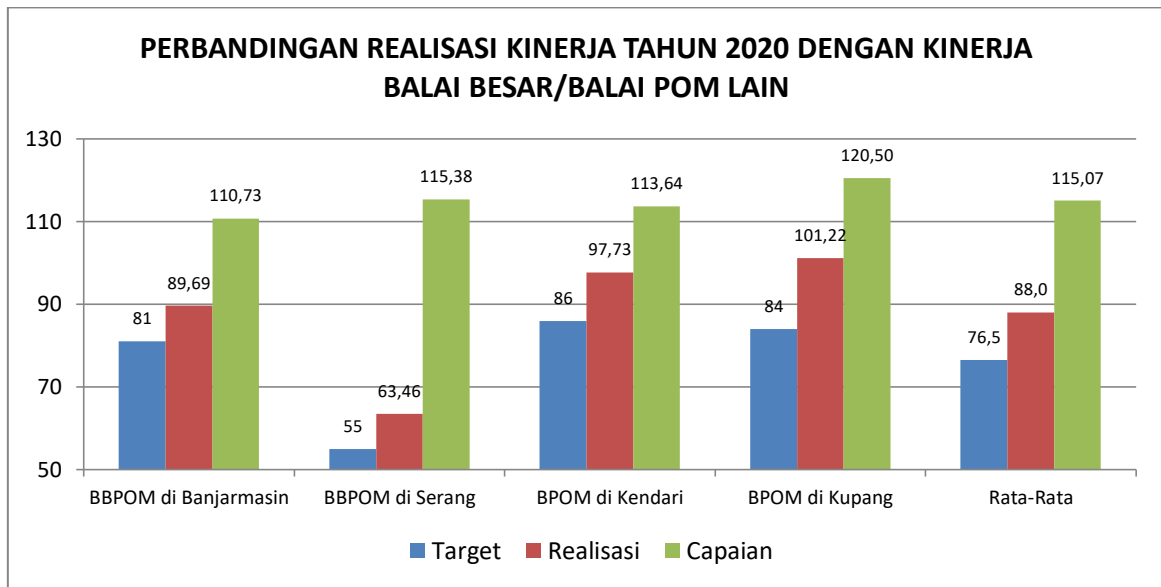


Grafik 3.55

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2020, selain Balai Besar POM di Banjarmasin terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kriteria pencapaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar $100% < x \leq 125%$, diantaranya Balai Besar POM di Serang, Balai POM di Kendari, dan Balai POM di Kupang.



Grafik 3.56

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6**

IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dari grafik di atas diketahui bahwa realisasi kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada Balai Besar POM di Serang tetapi lebih rendah daripada Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang. Realisasi kinerja tersebut berbeda antar UPT dikarenakan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, baik modus operandi kejahatannya, penyebaran perkara, tingkat kesulitan perkara, hingga sistem koordinasi lintas sektor lingkup *Criminal Justice System* (CJS) dalam penanganan perkara. Sedangkan capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin paling rendah diantara Balai POM di Kendari, Balai POM di Kupang, dan Balai Besar POM di Serang, namun masih masuk dalam kriteria pencapaian $100% < x \leq 125%$.

Capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2019). Hal ini dicapai dengan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen sehingga diperoleh sasaran/target operasi

penindakan yang valid dan dapat terpenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan ketika dilakukan tahap penyidikan. Selain itu, karena tahapan kegiatan penyidikan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh internal dan sangat berhubungan dengan pihak eksternal khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, maka peningkatan perkuatan koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam meraih realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 ini.

Dalam meraih capaian kinerja ini, diperlukan sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan sumber daya anggaran sebagai input untuk meraih output yang akan dicapai berupa capaian kinerja. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,52%, dengan capaian kinerja sebesar 110,73%. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,11 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,11, sehingga capaian tingkat efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100 %.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	110,73%	99,52%	1,11	0,11	100%

Tabel 3.30

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

**SK
8**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
2. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
8.1**

Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Status
85	74,08	87,15	Baik

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan dan harus dilakukan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berkomitmen untuk terus melaksanakan RB. Sejak tahun 2010, BPOM menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan RB, dan saat ini merupakan periode pembangunan jangka menengah (5 tahunan) ketiga BPOM melaksanakan RB.

Berbagai pencapaian dalam pelaksanaan RB telah diraih oleh BPOM. Meskipun demikian, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, harapan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meneguhkan BPOM untuk terus berkomitmen dalam melakukan transformasi organisasi melalui RB. RB BPOM dilaksanakan sesuai dengan *Grand Design* RB Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Sesuai dengan *Grand Design*, saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2020-2024 dengan harapan RB akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan RB periode ketiga ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan sasaran RB pada periode ketiga ini adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mendukung pelaksanaan RB BPOM yang selaras dan sinergi dengan *Grand Design* dan *Road Map* RB, maka perlu disusun dokumen perencanaan pelaksanaan RB BPOM 2020-2024. Selain itu,

dokumen perencanaan tersebut juga harus sinergis dan selaras dengan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020. Dokumen perencanaan RB BPOM juga harus dapat mengakomodasi perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan komposisi pegawai BPOM dengan generasi milenial menjadi generasi terbanyak saat ini, perubahan akibat revolusi industri 4.0, dan juga perubahan *landscape* dunia akibat masifnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan *life style* manusia.

Dengan dasar tersebut, maka disusun dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024 yang lebih implementatif, dan tergambar jelas perubahan yang akan dilakukan di BPOM. *Road Map* RB BPOM disusun dengan analisis dan sudut pandang yang lebih holistik, melibatkan berbagai pihak dan unsur dalam internal BPOM dengan harapan *Road Map* disusun lebih komprehensif, dan antisipatif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan RB yang lebih utuh di BPOM. Melalui dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024, diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan RB di BPOM periode 2020-2024 sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan di BPOM.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Unit Kerja

- sesuai Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Target Indeks RB Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM sesuai Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31

Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024,

No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81)					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
c.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

Tabel 3.31
Target Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM Tahun 2020-2024

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu UPT Badan POM, yang perolehan nilai Indeks RB tahun 2019 adalah **65,33** di bawah rata-rata nasional 75,81, maka target Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 85 dan pada akhir RPJM tahun 2024 targetnya adalah 95.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.04.20.131 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2020. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungnya dalam

rangka menuju WBK dan WBBM pada Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar **74,85 dengan rincian sebagai berikut :**

PENILAIAN (BOBOT)		Nilai	%	Keterangan	
A.	PROSES (60)				
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	3,75	46,91%	TMS
	II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	2,95	42,10%	TMS
	III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	7,14	71,40%	MS
	IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10	100%	MS
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	9,56	63,74%	MS
	VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	5,35	53,47%	TMS
TOTAL PENGUNGKIT		38,75	64,58%	MS	
B.	HASIL (40)				
	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	18,35	92%	MS
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	13,35	89%	TMS
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	17,75	88,75%	MS
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)		17,75	88,75%	MS	
TOTAL HASIL		36,10	90,25%		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		74,85			

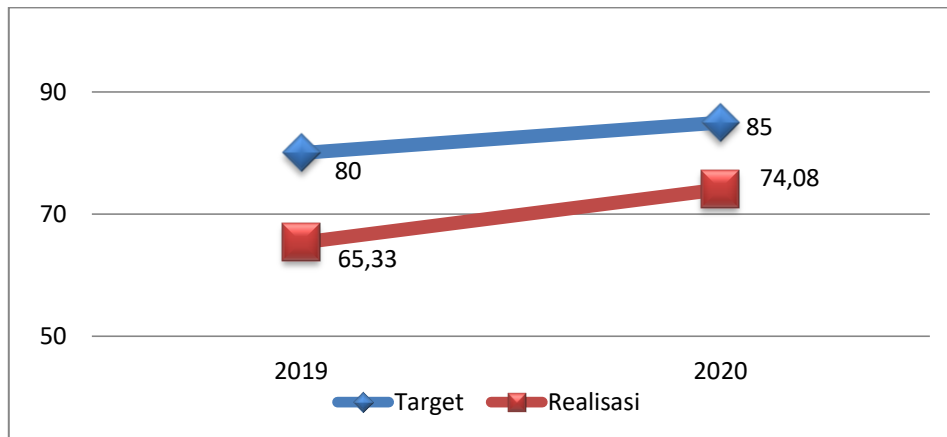
Tabel 3.32
Hasil evaluasi PMPZI Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020

Sehubungan dengan adanya **perbedaan** hasil penilaian TPI Badan POM dengan hasil penilaian KemenPANRB untuk penetapan WBK serta WBBM yang cukup tinggi maka **nilai komponen pengungkit** hasil penilaian TPI perlu dikonversikan dengan hasil penilaian oleh KemenPANRB, sesuai dengan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.01.21.01 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor Hk.02.02.7.72.11.20.13 Tentang Konversi Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Oleh Tim Penilai Internal Di Lingkungan BPOM Tahun 2020

$$\text{Koefisien Konversi} = \left(\frac{\text{Nilai rata-rata ZI KemenPANRB 2019}}{\text{Nilai rata-rata ZI TPI 2019}} \right)$$

$$\text{Nilai ZI Konversi} = \{\text{Nilai ZI TPI pengungkit 2020} \times \text{Koefisien Konversi}\}$$

Dari konversi tersebut (0,875) menghasilkan nilai Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar **74,08**.

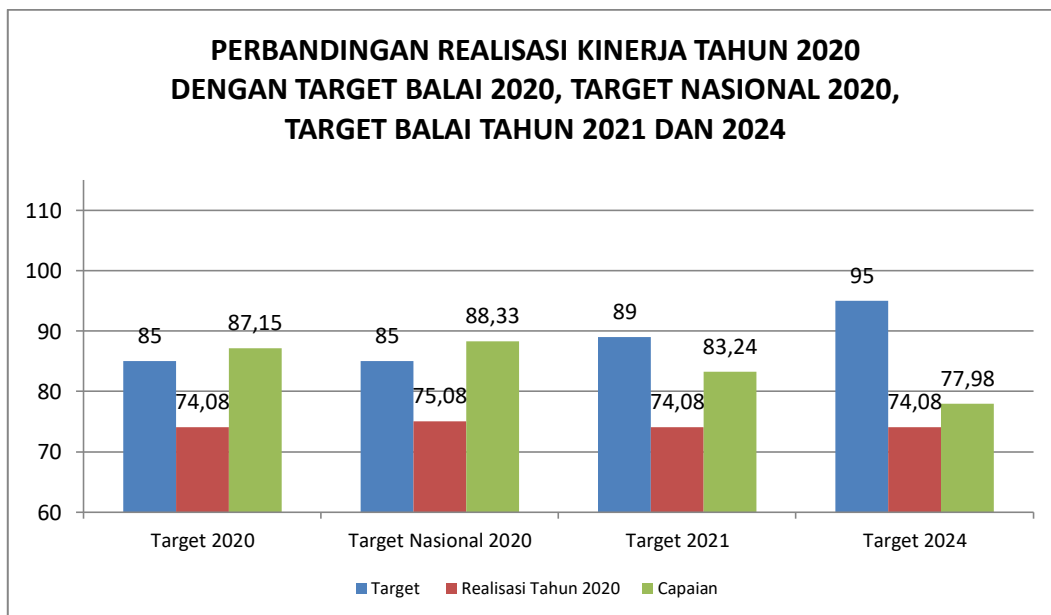


Grafik 3.57

Perbandingan Kinerja Tahun 2018-2019

IKSK8.1 Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 tersebut adalah 87,15% dari target 2020 (85), dan 77,98% dari target akhir RPJM tahun 2024 (95)



Grafik 3.58

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,

Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024

IKSK8.1 Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin

Perbandingan nilai indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2019-2020
Faktor-faktor yang mendukung capaian nilai IK ini adalah :

1. Pada area Manajemen Perubahan telah memiliki rencana Pembangunan ZI. Pimpinan telah berperan sebagai *role model* dan berkomitmen dalam Pembangunan ZI. Pembangunan ZI disosialisasikan baik ke internal maupun stakeholder secara berkala.
2. Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan *training need analysis*. Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Capaian kinerja pegawai dimonitor secara periodik dan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian *reward*.
3. Pada area Penguatan Akuntabilitas, pimpinan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.
4. Pada area Penguatan Pengawasan, pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dan dilakukan *public campaign* secara berkala. Telah melakukan sosialisasi benturan kepentingan dan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Dukungan Manajemen Satker, khususnya penyusunan dokumen, evaluasi dan laporan, dan konsultasi/koordinasi serta peningkatan kompetensi,

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.121.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 141.609.800,- atau 99,64%.

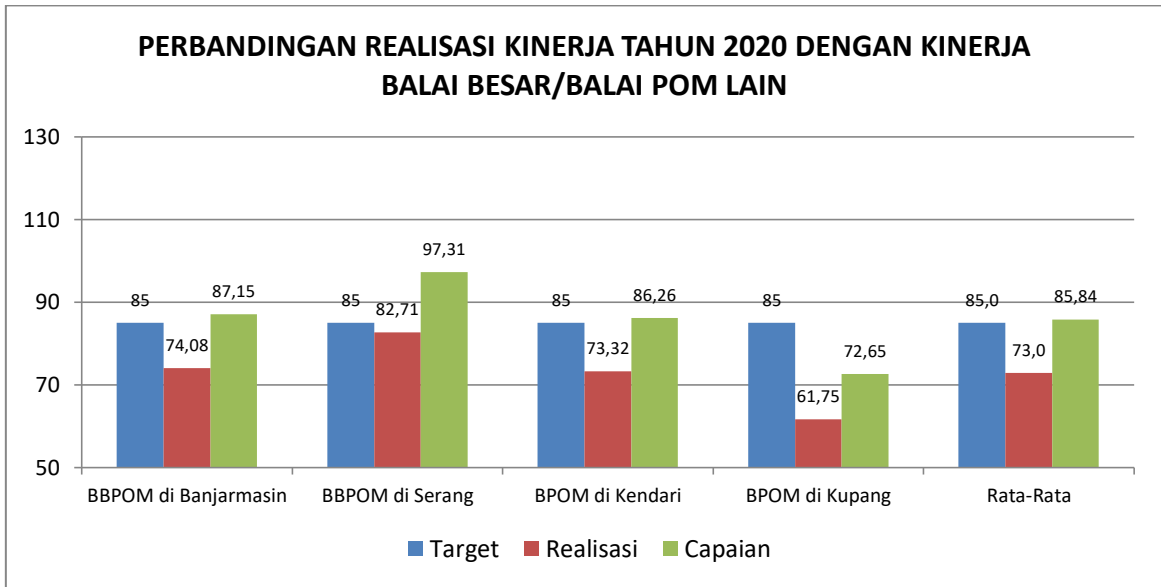
Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 87,15% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,87 dan Tingkat Efisiensi sebesar -0,13, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 75% atau Tidak Efisien

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin	87,15%	99,64%	0,87	-0,13	100%

Tabel 3.33
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK8.1 Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin

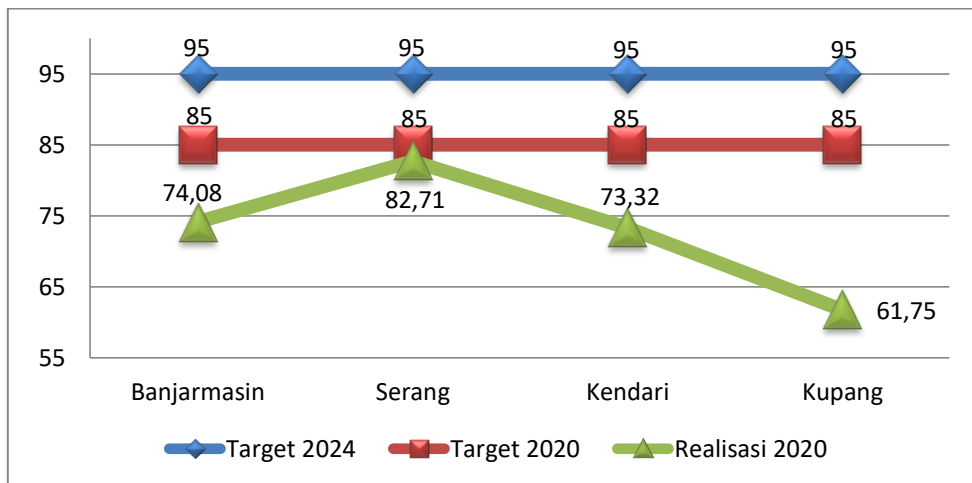
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat mencapai Tingkat Efisiensi anggaran, maka nilai Indeks RB BBPOM di Banjarmasin harus tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Perbandingan nilai indeks RB BBPOM di Banjarmasin terhadap Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 6 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.59

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK8.1 Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin**



Grafik 3.60

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK8.1 Indeks Refomasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin**

Perolehan nilai tersebut menempatkan Balai Besar POM di Banjarmasin berada di urutan ke dua setelah BBPOM di Serang, dan UPT yang paling rendah nilainya adalah BPOM di Kupang.

Balai Besar POM di Banjarmasin bersama 3 Balai Besar/Balai POM seklaster dan 36 UPT Badan POM lainnya, masuk ke dalam kelompok UPT yang tidak diusulkan untuk Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN RB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut:

1. Agen perubahan belum berkontribusi terhadap perubahan.
2. Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI.
3. Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilaksanakan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
5. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang kinerja.
6. Penanganan pengaduan masyarakat belum dipisahkan antara pengaduan berkadar pengawasan dengan pengaduan layanan publik.
7. Kebijakan *punishment*(sanksi)/*reward* bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan belum diterapkan.
8. Nilai indeks anti korupsi/IPP belum memenuhi batas minimal survei WBK.

Disamping itu, berdasarkan hasil survei lapangan pada komponen hasil dari 30 responden diperoleh nilai IPP 3,55 (syarat 3,2) dan IPAK 3,56 (syarat 3,6) dibawah persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peran Agen Perubahan melalui implementasi program perubahan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan ZI secara berkala.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
4. Memperbaiki sistem evaluasi pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan pencapaian kinerja dan menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
5. Menyajikan informasi kinerja secara memadai dalam laporan kinerja.
6. Melakukan pemisahan penanganan pengaduan yang berkadar pengawasan dengan pengaduan pelayanan publik serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat tersebut.
7. Menerapkan sistem *punishment* (sanksi)/*reward* bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan.
8. Membangun komunikasi efektif dengan pengguna layanan sehingga atas hal-hal yang belum baik yang dirasakan pengguna layanan dapat segera diperbaiki guna meningkatkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas layanan maupun indeks anti

korupsi.

**IKSK
8.2**

**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Balai Besar POM di Banjarmasin**

Target	Realisasi	Capaian	Status
80	76,14	95,18	Baik

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 pada Balai Besar POM di Banjarmasin telah dilakukan oleh Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: B-PI.04.7.72.07.20.581 tanggal 01 Juli 2020.

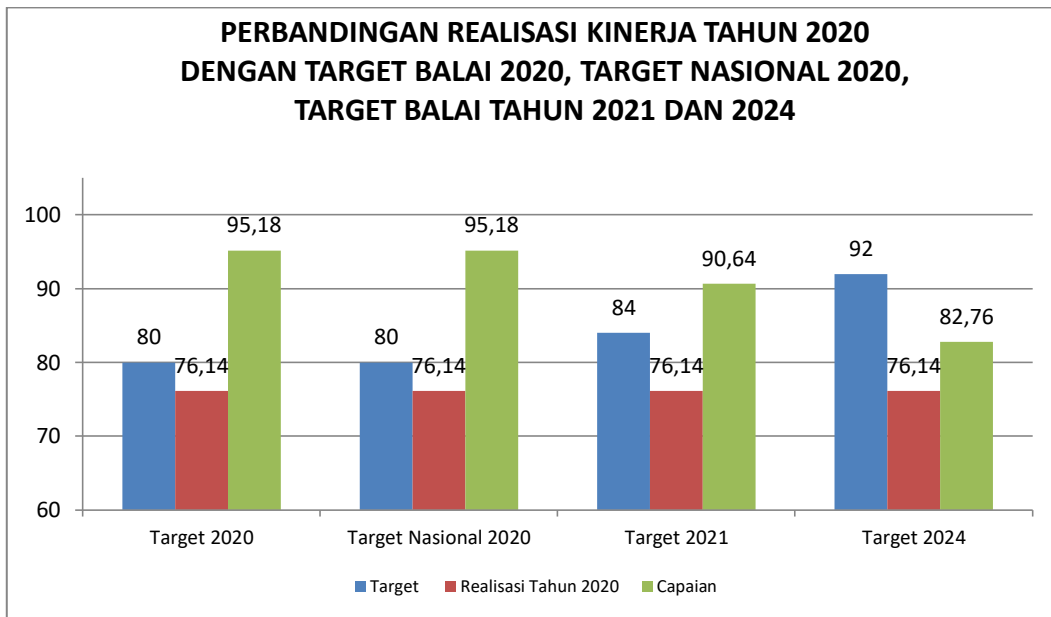
Dengan fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Banjarmasin meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), diperoleh penilaian implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 pada Balai Besar POM di Banjarmasin dapat

dikategorikan **BB** atau **Sangat Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan, dengan rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	24,71
b	Pengukuran Kinerja	25	17,50
c	Pelaporan Kinerja	15	12,72
d	Evaluasi Internal	10	7,20
e	Capaian Kinerja	20	14,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,14
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 3.34
Hasil Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020

Dari hasil penilaian tersebut diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, baik target tahun 2020 yaitu 80, maupun terhadap target akhir RPJM tahun 2024 yaitu 92. Capaian terhadap target 2020 adalah 95,18%, sedangkan capaian terhadap target tahun 2024 adalah 82,76%.

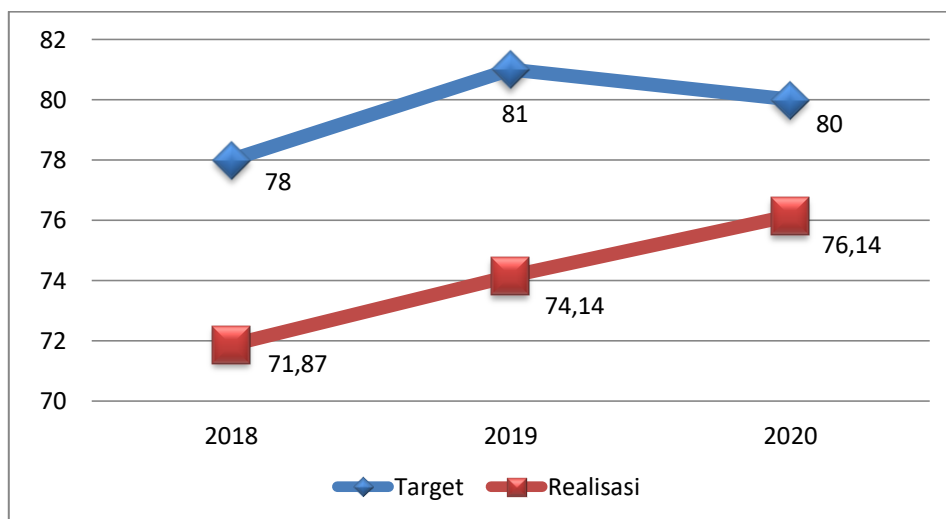


Grafik 3.61

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

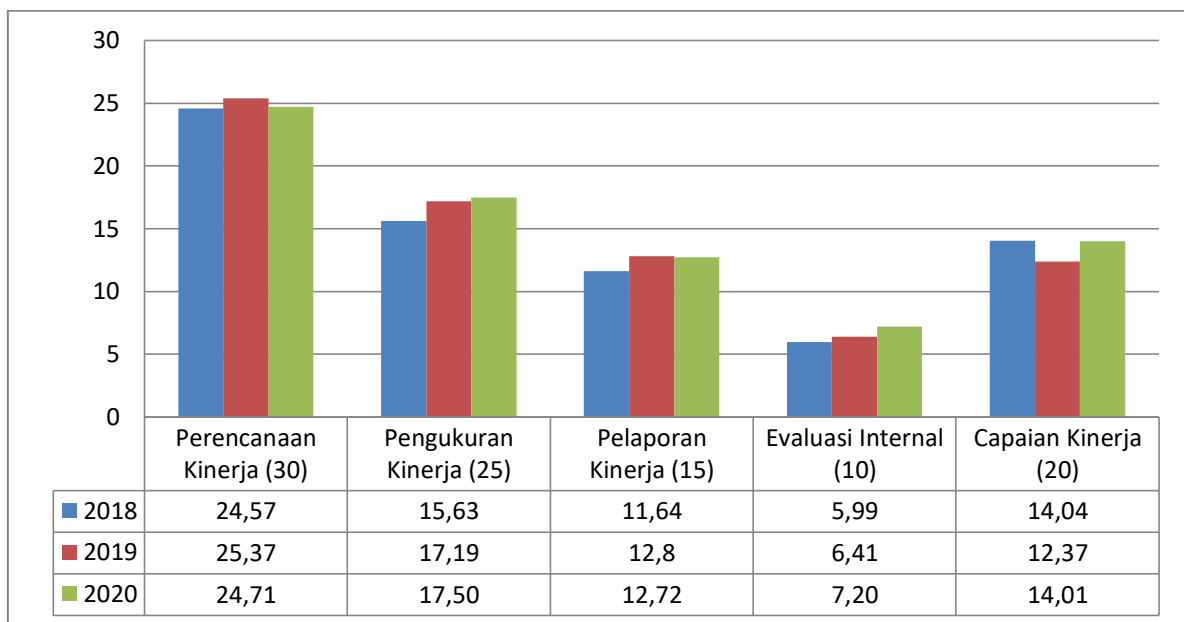
Namun apabila dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP di 2 (dua) tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.62

**Perbandingan Kinerja Tahun 2018-2020
IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin**

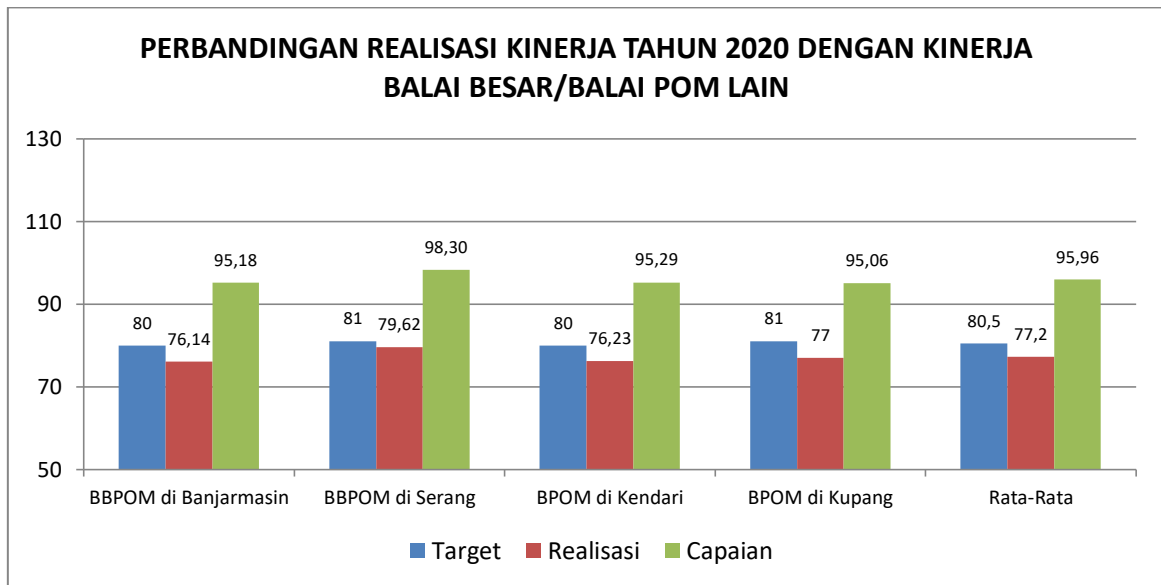
Dari 5 komponen penilaiannya, 3 komponen mengalami peningkatan, dan 2 komponen mengalami penurunan dari tahun 2019, sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.63

Perbandingan Nilai Komponen Penilaian AKIP BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2020

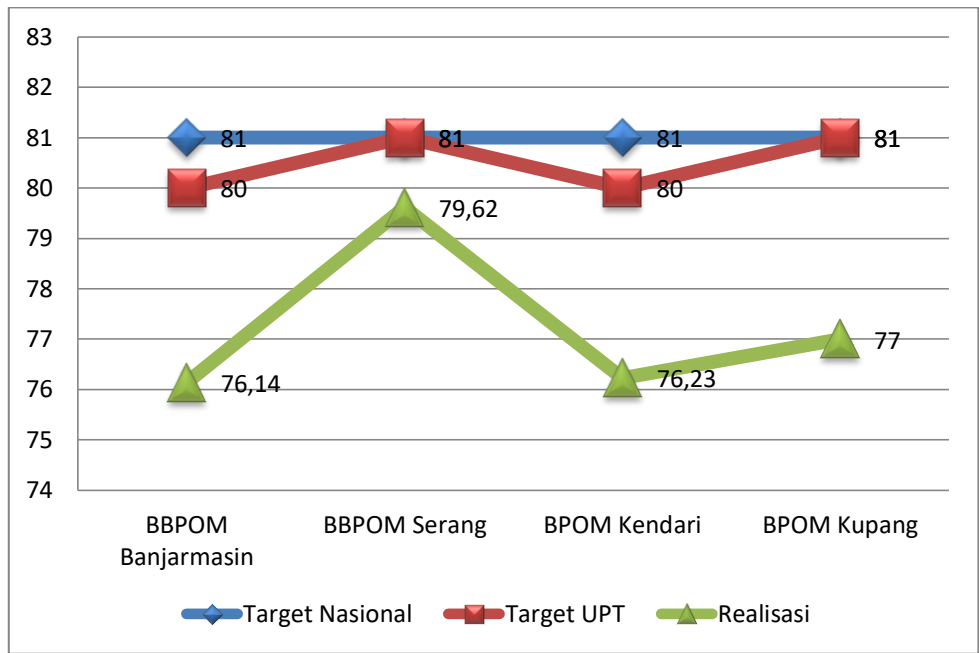
Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 dengan nilai AKIP Balai Besar / Balai POM dalam klaster 6 tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.64
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 6
IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

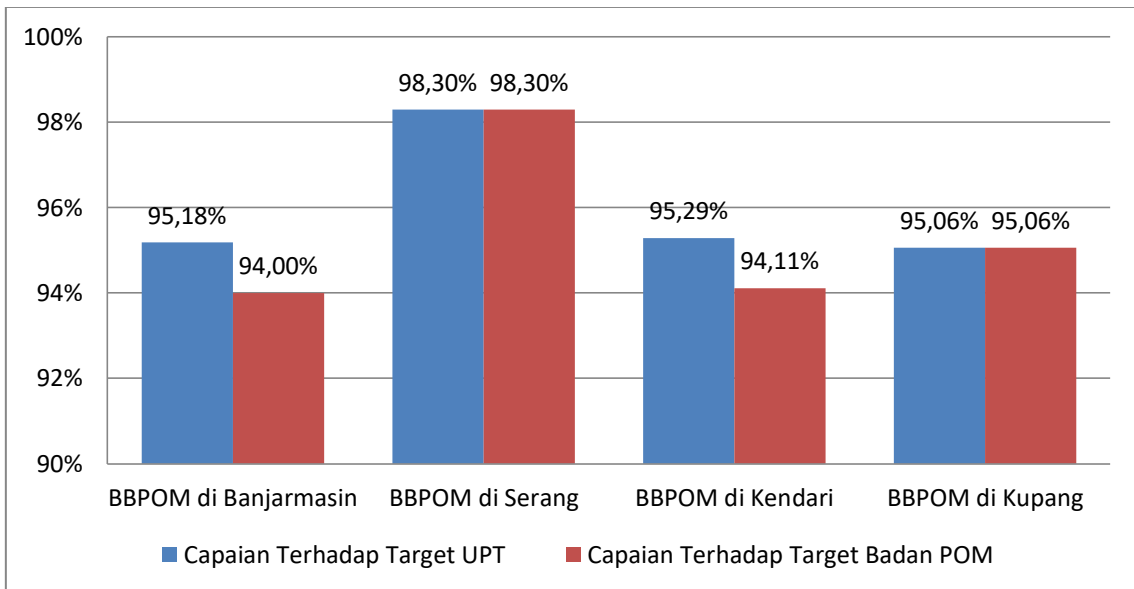
Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa nilai AKIP ke 4 (empat) Balai Besar/ Balai POM sekluster belum mencapai target masing-masing maupun target Badan POM tahun 2020, dimana nilai AKIP Balai Besar BPOM di Banjarmasin merupakan yang terendah, sedangkan yang tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Serang.

Capaian terhadap masing-masing target tahun 2020 dipengaruhi oleh penetapan target masing-masing Balai Besar/ Balai POM, dimana dalam kluster ini terdapat 2 kelompok target yaitu 80 dan 81, sedangkan target Badan POM adalah 81, maka diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.65

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Nasional
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin**



Grafik 3.66

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target UPT dan Nasional
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin**

Beberapa faktor yang meningkatkan Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin adalah meningkatnya komitmen semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SAKIP, sehingga dapat dilaksanakan lebih baik, diantaranya sebagai berikut :

1) Perencanaan

- Target Kinerja telah ditetapkan .
- Rumusan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dan dipetakan melalui Indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dan rencana aksi.

2) Pengukuran

Balai Besar POM di Banjarmasin telah menetapkan Indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.

3) Pelaporan

- Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- *Reward* dan *punishment* telah disusun sebagian, yaitu untuk petugas layanan publik

4) Evaluasi Internal

- Telah dilaksanakan evaluasi internal secara berkala (bulanan)
- Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi capaian kinerja.

5) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin secara umum telah sesuai dengan target.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2020 adalah pemantauan, evaluasi dan koordinasi antara lain berupa :

- Peningkatan kompetensi dan diseminasi terkait SAKIP, antara Workshop/Bimtek SAKIP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
- Rapat Monitoring Evaluasi Bulanan, yang dilaksanakan di awal bulan berikutnya;
- Konsultasi/ Koordinasi baik dengan unit pusat di Badan POM yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, ULP, dengan sesama Balai Besar / Balai POM antara lain BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Surabaya), maupun intansi terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Prov Kalsel.
- Supervisi Pelaksanaan Kegiatan, Monev Anggaran dan Kinerja ke Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Selain itu juga dilaksanakan pengelolaan pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan berupa Pengelolaan Administrasi/ Operasional Kegiatan dan Perkantoran, Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, baik Balai Besar POM di Banjarmasin maupun Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu,

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.635.120.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp.1.623.415.778,- atau 99,28%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 95,18% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,96 dan Tingkat

Efisiensi sebesar -0,04, dan Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 75% atau Tidak Efisien.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat mencapai Tingkat Efisiensi anggaran, maka nilai AKIP harus tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	95,18%	99,28%	0,96	-0,04	100%

Tabel 3.35
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai target adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

- Pada saat pelaksanaan assesment, Renstra 2020-2024 yang sudah disahkan belum dipublikasikan pada website BPOM maupun Subsite Balai Besar POM di Banjarmasin.
- Target Kinerja yang ditetapkan belum dilengkapi oleh Kertas kerja yang mencantumkan tren kenaikan target serta penjelasan terkait penetapan target kinerja
- Rencana aksi belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen secara rinci yang akan dilakukan dalam rencana aksi.

2) Pengukuran

Belum melakukan pemetaan Indikator kinerja utama (IKU) secara memadai atas target kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu.

3) Pelaporan

- Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin belum terdapat monitoring sub kegiatan dan target per triwulan beserta analisisnya yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut
- *Reward* dan *punishment* belum mencakup untuk semua pegawai,

4) Evaluasi Internal

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin belum dilakukan monitoring sampai dengan sub kegiatan serta analisisnya

5) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan dan informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Terhadap kelemahan yang masih ada Balai Besar POM di Banjarmasin harus melakukan perbaikan sebagai berikut :

1) Perencanaan

- Membentuk tim subsite Balai Besar POM di Banjarmasin, agar pemanfaatan subsite lebih maksimal, baik untuk mempublikasikan dokumen kinerja, maupun informasi dan berita aktual kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin
- Melengkapi kertas kerja penetapan target dengan justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan mengenai tren kenaikan/penurunan.

- Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

2) Pengukuran

Melakukan pemetaan dan mendokumentasikan *cascading* target kinerja sampai ke tingkat individu secara memadai, namun masih terkendala dengan belum selesainya proses restrukturalisasi Badan POM

3) Pelaporan

- Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu dan memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja
- Melakukan monitoring sub kegiatan dan target per triwulan serta analisisnya yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut
- Mengkaji ulang ketentuan terkait pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai untuk diterapkan ke semua pegawai dan tingkat unit kerja
- Membuat kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra

4) Evaluasi Internal

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja atas target kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.

5) Capaian Kinerja

Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

**SK
9**

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

**IKSK
9.1**

Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Besar POM di Banjarmasin

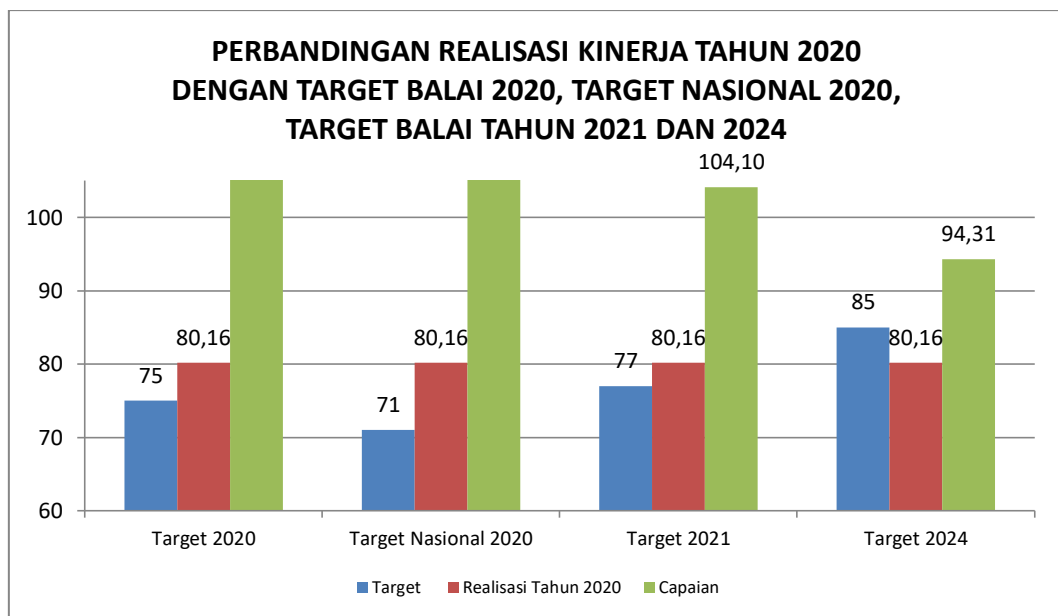
Target	Realisasi	Capaian	Status
75	80,16	106,88	Baik

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin diperoleh dari skor nilai kualifikasi (Pendidikan), kompetensi (diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/workshop), kinerja, dan disiplin setiap pegawai.

- 1) Kualifikasi yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan setiap pegawai, setiap jabatan. Semakin tinggi Pendidikan, semakin besar nilainya dengan bobot penilaian sebesar 25% dari

total nilai indeks.

- 2) Kompetensi meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat structural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai dengan bobot penilaian 40 %.
- 3) Kinerja dari penilaian SKP dan perilaku menggunakan skala penilaian dengan bobot 30%.
- 4) Disiplin berdasarkan Riwayat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai selama kurun waktu 5 tahun, dengan bobot nilai 5%.



Grafik 3.67

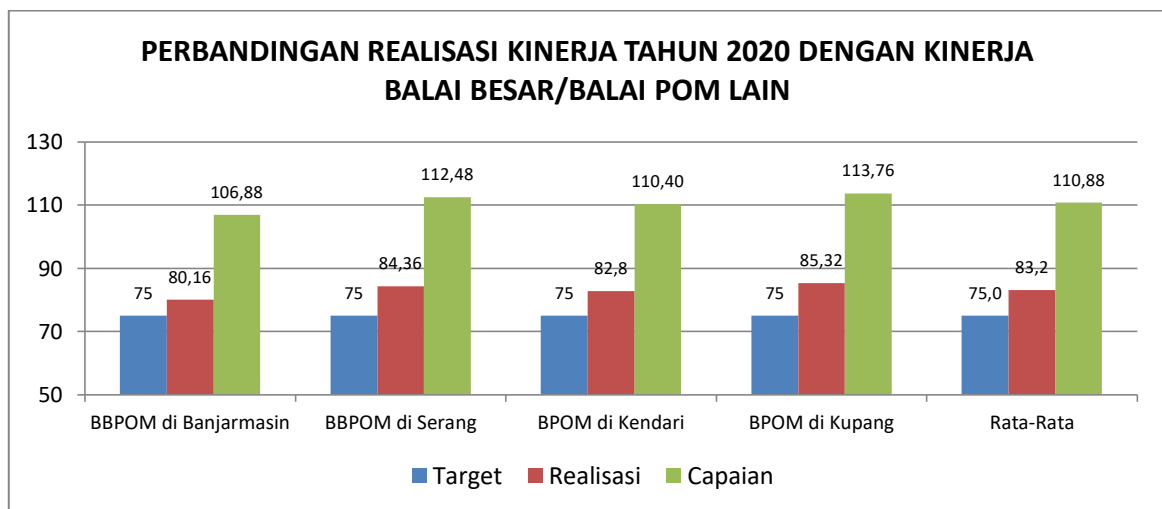
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin**

Penetapan target balai lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional, karena mengacu pada capaian di tahun sebelumnya.

Realisasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan target nasional, maka capaiannya sebesar 112,9 %

Capaian persentase indeks profesionalitas ASN merupakan indikator kinerja baru sehingga belum bisa disandingkan dengan data 3 tahun terakhir. Akan tetapi realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 salah satunya karena peningkatan kompetensi berupa seminar bisa diikuti secara *online*. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu pada tahun 2024, 85% capaian telah tercapai sehingga diharapkan pada tahun 2024 dapat tercapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

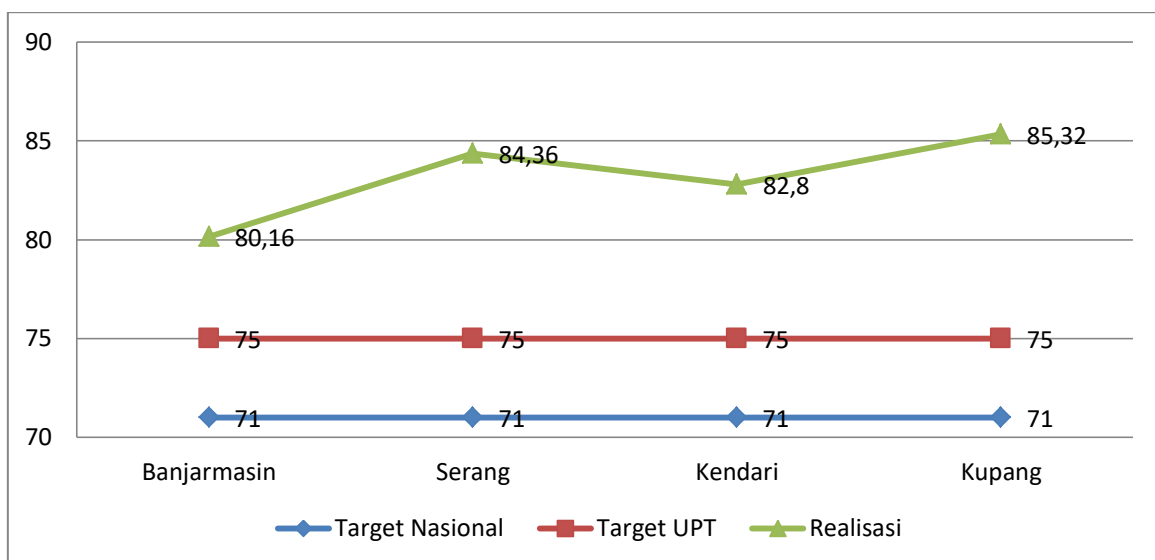
Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis dapat dilihat dari grafik berikut :



Grafik 3.68

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin

Setiap Balai Besar/Balai mempunyai pegawai yang berbeda-beda baik dari sisi latar belakang Pendidikan, kesempatan dalam pengembangan kompetensi, kinerja maupun penegakan disiplin. Jika dilihat pada grafik diatas BBPOM di Serang, BPOM di Kendari, BPOM di Kupang dan BBPOM di Banjarmasin mempunyai target yang sama yaitu sebesar 75 % dengan realisasi seluruhnya di atas target (dengan capaian di atas 100 %).



Grafik 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Nasional
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja, khususnya Pengelolaan Kepegawaian, baik yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, maupun oleh Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, Pembinaan oleh Eselon I, Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual, serta

Konsultasi dan Koordinasi Kepegawaian, baik ke Biro Umum, Balai Besar/Balai POM lain, maupun instansi terkait lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp446.065.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 45.664.200,- atau 99,13%.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 106,88% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,08 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,08, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau Efisien.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	106,88%	99,13%	1,08	0,08	100%

Tabel 3.36
Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan **Analisis realisasi kinerja** pada tahun 2020, untuk Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN dalam upaya pencapaian target tahun 2021 dan pencapaian target sesuai renstra ditahun 2024, maka Balai Besar POM di Banjarmasin selalu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN dalam pengembangan kompetensi, memastikan kinerja ASN minimal baik dan penerapan disiplin kerja untuk seluruh ASN.



Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*)
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

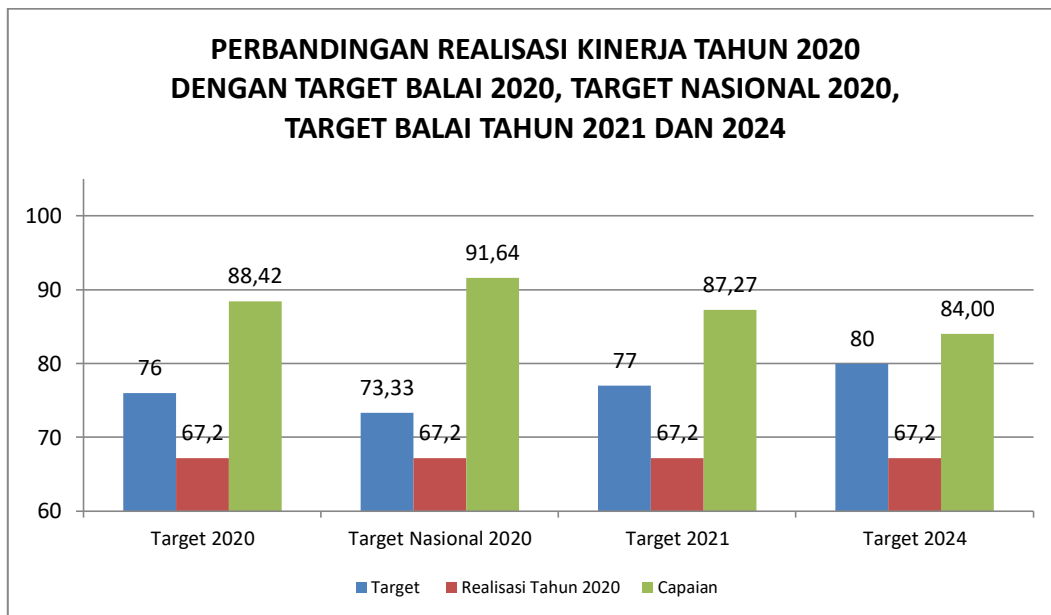
Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
10.1**

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Target	Realisasi	Capaian	Status
76	67.2	88,42	Cukup

Peningkatan kapasitas laboratorium yang modern dan andal sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan salah satu rencana strategis Badan POM, yaitu pengembangan standar dan mutu pengujian dalam rangka mendorong peningkatan daya saing obat dan makanan serta penguatan kelengkapan sarana prasarana laboratorium pengujian.

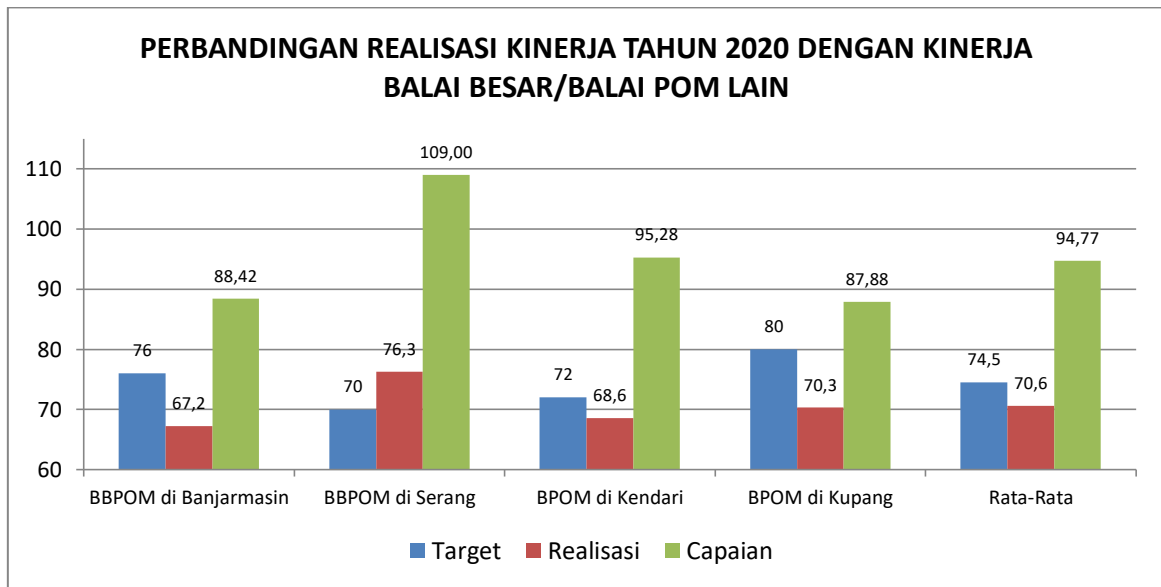


Grafik 3.70

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

IKSK10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Karena target Balai (76%) tidak berbeda signifikan dengan target nasional (73,33%), maka capaian kinerja terhadap target nasional hanya sedikit lebih tinggi (91,64%). Demikian juga apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (tahun 2024) yang sebesar 80%, capaiannya bernilai baik (84%).



Grafik 3.71

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6**

IKSK10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan Balai/Balai Besar POM lainnya dalam *cluster* yang sama, capaian BBPOM di Banjarmasin (88,42%) lebih tinggi dari capaian BPOM di Kupang (87,88%), namun lebih rendah dari capaian BBPOM di Serang (109,0%) dan BPOM di Kendari (95,28%).

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan anggaran dalam pencapaian output, pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 99,97 %, dengan capaian kinerja sebesar 88,42 %, Indeks Efisiensi sebesar 0,88 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,12 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2020 sebesar 75 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,42 %	99,97 %	0,88	-0,12	75 %

Tabel 3.37

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Dalam rangka menjamin hasil pengujian dan konsistensi penerapan cara berlaboratorium yang baik, serta konsisten dalam menjalankan bisnis proses sebagai unit pelayanan publik maka laboratorium pengujian di BPOM harus terakreditasi ISO/IEC 3817025:2005 dan tersertifikasi ISO 9001.

Pemenuhan laboratorium pengujian yang sesuai dengan standar GLP meliputi pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Pemenuhan standar GLP oleh laboratorium di lingkungan BPOM didukung oleh :

1. Kompetensi personel sesuai standar kompetensi, hal tersebut dicapai melalui kegiatan mengikuti webinar online terkait pengetahuan tentang jaminan hasil pengujian dan bimbingan teknis secara daring;
2. Peralatan sesuai dengan standar minimum peralatan, hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Review terhadap pemenuhan standar minimum peralatan;
 - b. Review kebutuhan alat laboratorium BB/Balai POM oleh PPOMN;

- c. Rekomendasi jenis, spesifikasi dan jumlah alat utama, suku cadang dan alat penunjang sesuai standar minimal peralatan; serta
 - d. Konsultasi dan rekomendasi pemenuhan sarana prasarana laboratorium BB/Balai POM sesuai standar GLP.
3. Ruang lingkup pengawasan sesuai dengan standar kapabilitas pengujian BB/Balai POM, melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. *Reassessment* GLP 31 BB/Balai POM;
 - b. Forum Diskusi Manajemen Jejaring Laboratorium Pengujian Badan POM;
 - c. Asesmen penerapan ISO/IEC17025:2005;
 - d. Persentase laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar *Good Laboratory Practices* yang ditetapkan 39 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/Strategi ;
 - e. Asesmen penerapan program laboratorium rujukan dan unggulan;
 - f. Review kinerja pengujian di BB/Balai POM terhadap pemenuhan Standar Kapabilitas Pengujian sesuai prioritas sampling; serta
 - g. Uji Profisiensi yang diikuti BB/Balai POM.

**IKSK
10.2**

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Banjarmasin yang Optimal

Target	Realisasi	Capaian	Status
1,51	1,82	120,53	Sangat Baik

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCCPemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Pada akhir triwulan IV tahun 2020, Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal sebesar 1,82 dari target 1,51 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 120,53%, sedangkan terhadap target akhir RPJM tahun 2024 sebesar 3 , capaiannya adalah 60,67%.



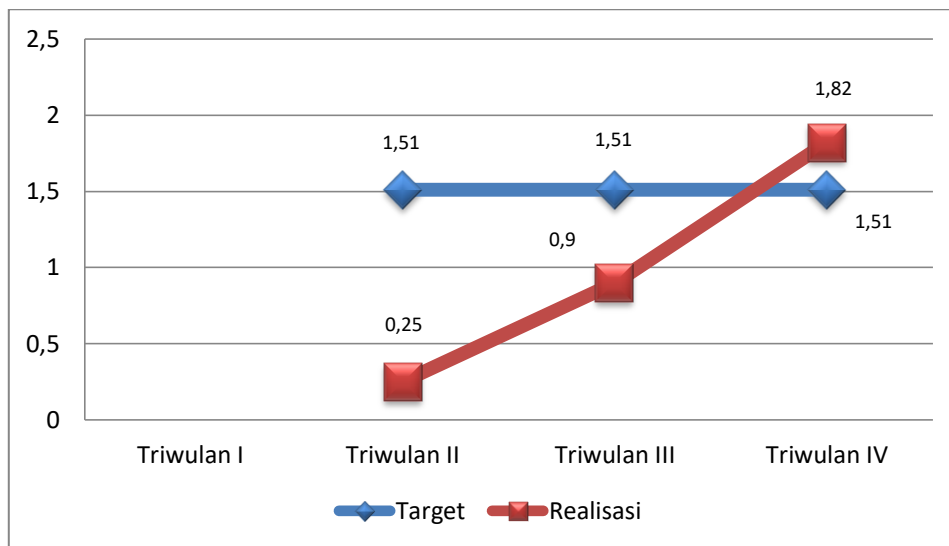
Grafik 3.72

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,

Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024

IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Perolehan Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal tahun 2020 per triwulan adalah sebagai berikut :

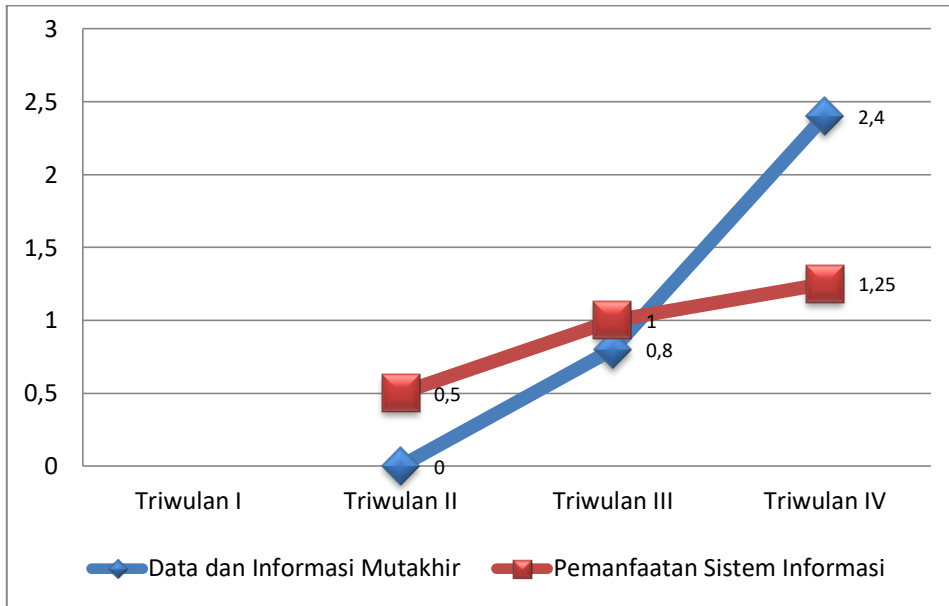


Grafik 3.73

Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

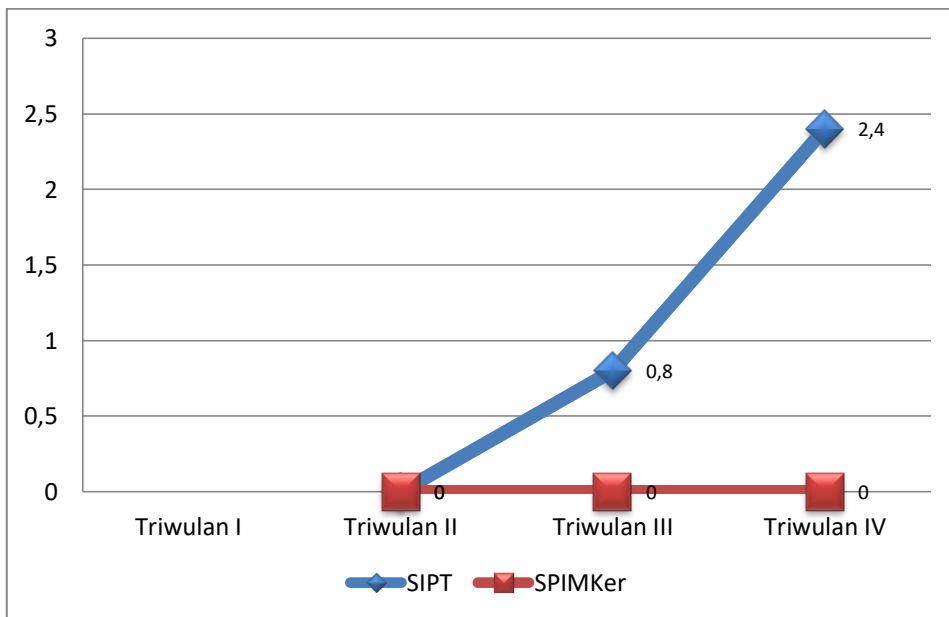
IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Nilai indeks tersebut di atas, diperoleh dari komponen-komponen pengelolaan data dan informasi, dengan perhitungan rata-rata dari Nilai Data dan Informasi Mutakhir ditambah Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi, gambaran sebagai berikut :



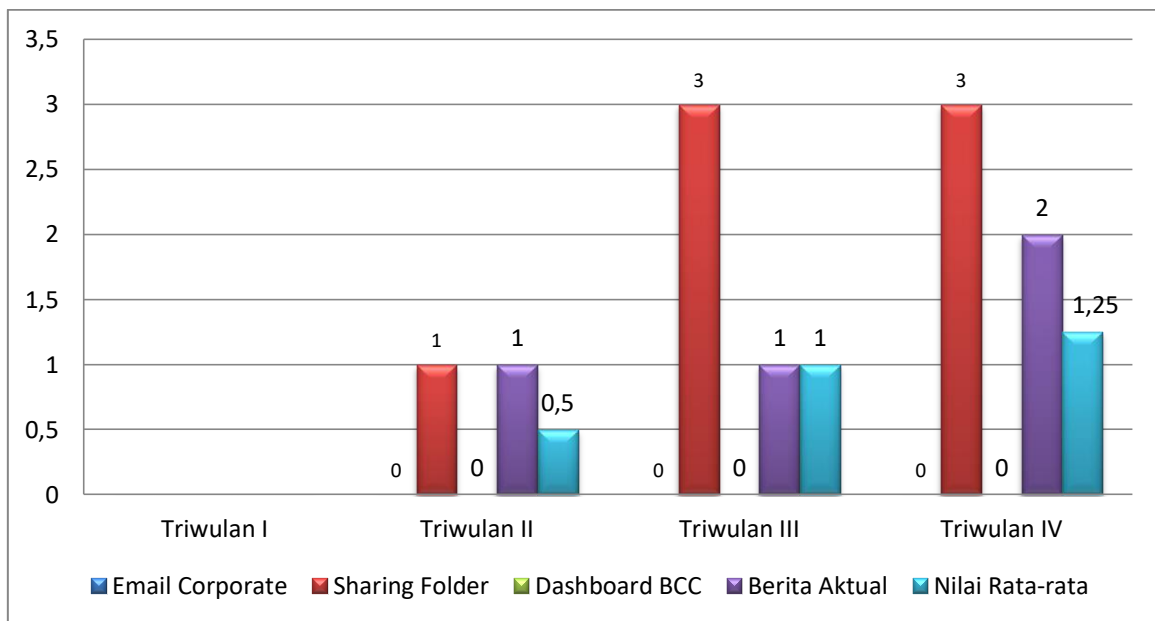
Grafik 3.74
Realisasi Nilai Data dan Informasi Mutakhir
dan Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi Per Triwulan Tahun 2020

Komponen Data dan Informasi Mutakhir, merupakan jumlah nilai SIPT dan SPIMKer, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



Grafik 3.75
Realisasi Nilai Data dan Informasi Mutakhir Per Triwulan Tahun 2020

Kemudian komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, merupakan rata-rata dari nilai pemanfaatan Email Corporate, Sharing Folder, Dashboard BCC dan Berita Aktual, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



Grafik 3.76

Realisasi Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi Per Triwulan Tahun 2020

Dari data kedua komponen di atas dapat terlihat bahwa untuk komponen Data dan Informasi Mutakhir selama tahun 2020, untuk SIPT baru mulai dilaksanakan entry data mulai triwulan II, hal ini disebabkan pada triwulan I, aplikasi SIPT masih dalam tahap pengembangan dan update oleh Pusdatin, sedangkan untuk aplikasi SPIMKer tidak ada pemutakhiran data karena adanya kendala koordinasi dengan petugas Rumah Sakit yang biasanya melakukan pelaporan. Kendala ini terkait dengan merebaknya Pandemi Covid-19,

yang membatasi aktifitas dan pengurangan anggaran yang terkait koordinasi SPIMKer pada saat APBNP tahun 2020.

Untuk komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, yang belum dimanfaatkan dengan baik adalah Email Corporate dimana pada tahun 2020, pemanfaatan Email Corporate belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga BBPOM di Banjarmasin dan pegawainya menggunakan email dari Google atau Yahoo. Sedangkan Dashboard BCC, belum dimanfaatkan dengan baik karena fitur yang tersedia hanya bisa diakses oleh pimpinan unit.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.648.877.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.033.599.570,- atau 62,69%.

Pagu anggaran tersebut merupakan total dari Pagu anggaran pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, kendaraan bermotor, peralatan fasilitas perkantoran dan sisa pagu anggaran pembangunan/renovasi gedung dan bangunan yang tidak bisa dipotong pada saat APBNP 2020 karena sudah dalam kontrak Manajemen Konstruksi, kemudian dilakukan addendum dan dipersiapkan untuk Pembayaran Kekurangan Bayar Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik Tahap II. Kepastian perhitungan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp.257.236.570,- baru diperoleh pada akhir bulan November 2020, sehingga tersisa pagu sebesar Rp.615.277.430,- (37,31%) dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan revisi optimalisasi sisa anggaran tersebut.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 120,53% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE)

sebesar 1,92 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,92, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 88% atau Efisien.

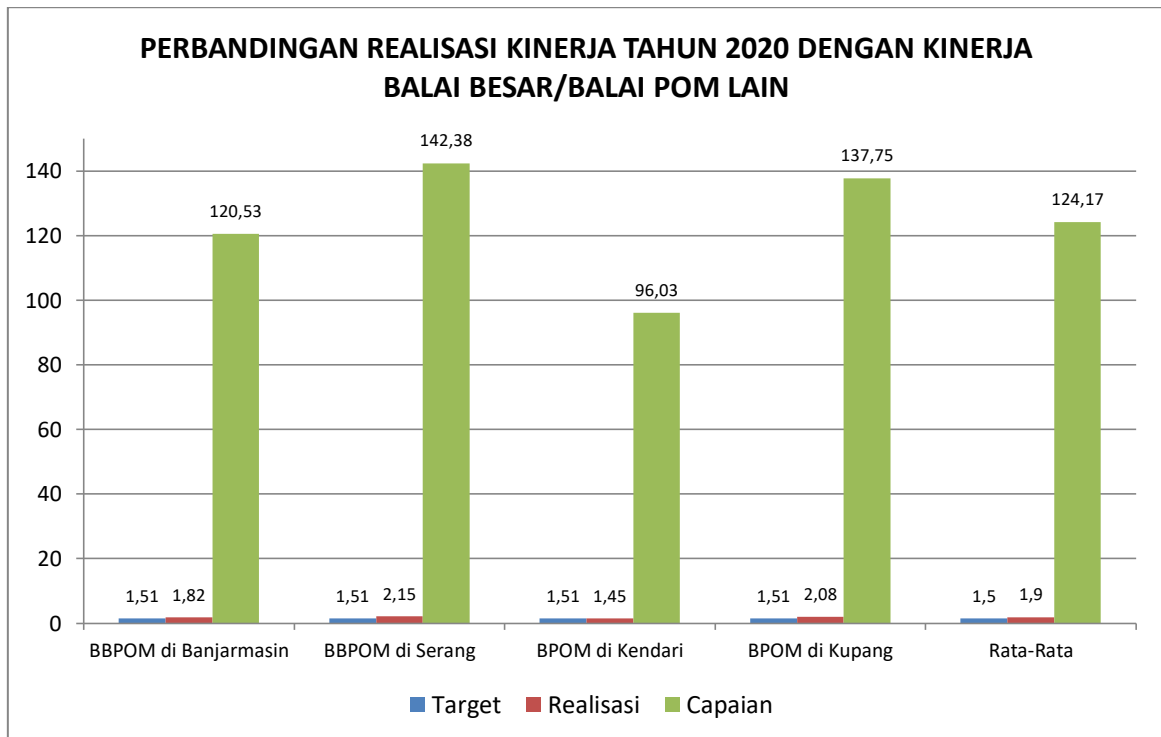
Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 yang Optimal	120,53 %	62,69 %	1,92	0,92	88%

Tabel 3.38

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020, berada di posisi ke tiga dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, adalah sebagai berikut :

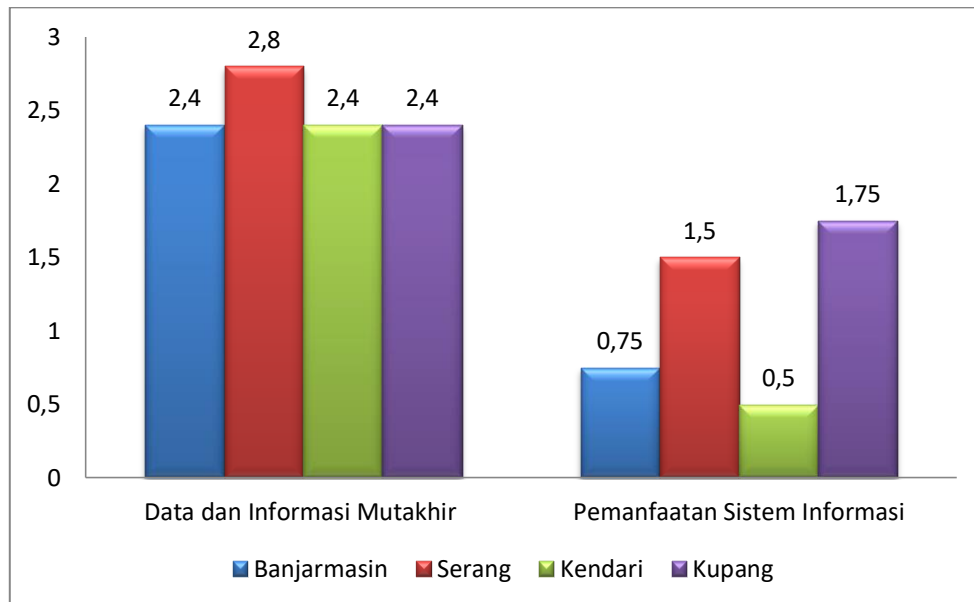


Grafik 3.77

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Berdasarkan Nilai komponennya maka posisi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



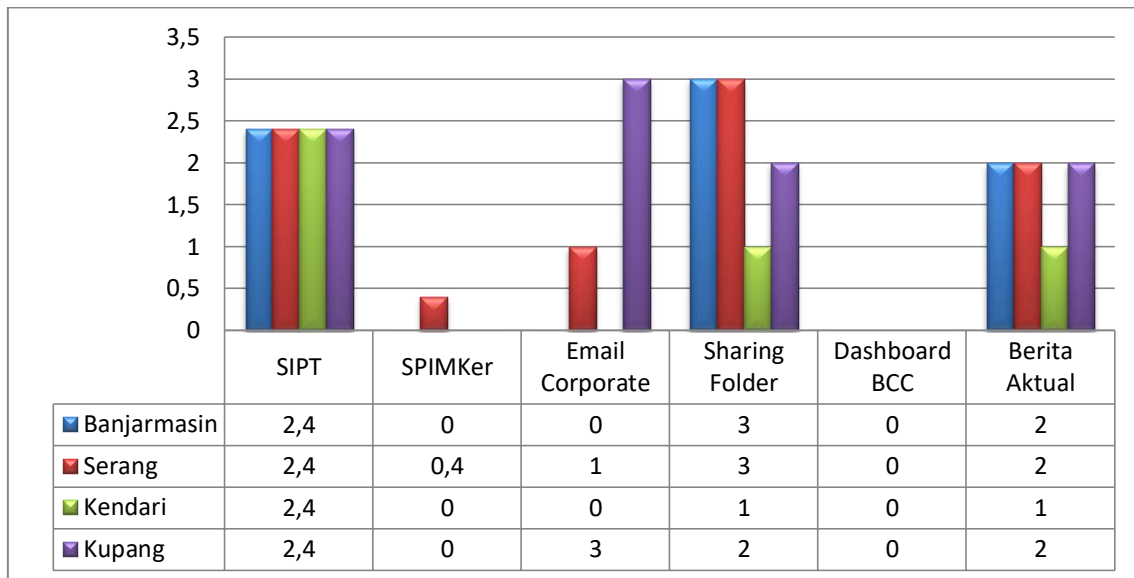
Grafik 3.78

Perbandingan Nilai Komponen Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Dan apabila dilihat dari Nilai subkomponen masing-masing maka posisi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



Grafik 3.79

Perbandingan Nilai Sub Komponen Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Dari keempat Balai Besar/Balai POM seklaster, semua sudah melakukan update SIPT, sedangkan yang melakukan update SPIMKer hanya BBPOM di Serang.

Untuk pemanfaatan email corporate yang paling optimal adalah BPOM di Kupang, disusul BBPOM di Serang, sedangkan BBPOM di Banjarmasin dan BPOM di Kendari belum ada pemanfaatan. Nampak juga bahwa Dashboard BCC belum dimanfaatkan oleh seluruh Balai Besar/Balai POM di klaster ini, sedangkan Berita Aktual sudah dimanfaatkan oleh keempat Balai.

Untuk lebih mengoptimalkan nilai kinerja ini, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah :

- Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline

- Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer.
- Melakukan migrasi email google / yahoo instansi ke email corporate, dan sosialisasi pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.
- Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin

**SK
10**

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
2. Tingkat Efisiensi Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**IKSK
11.1**

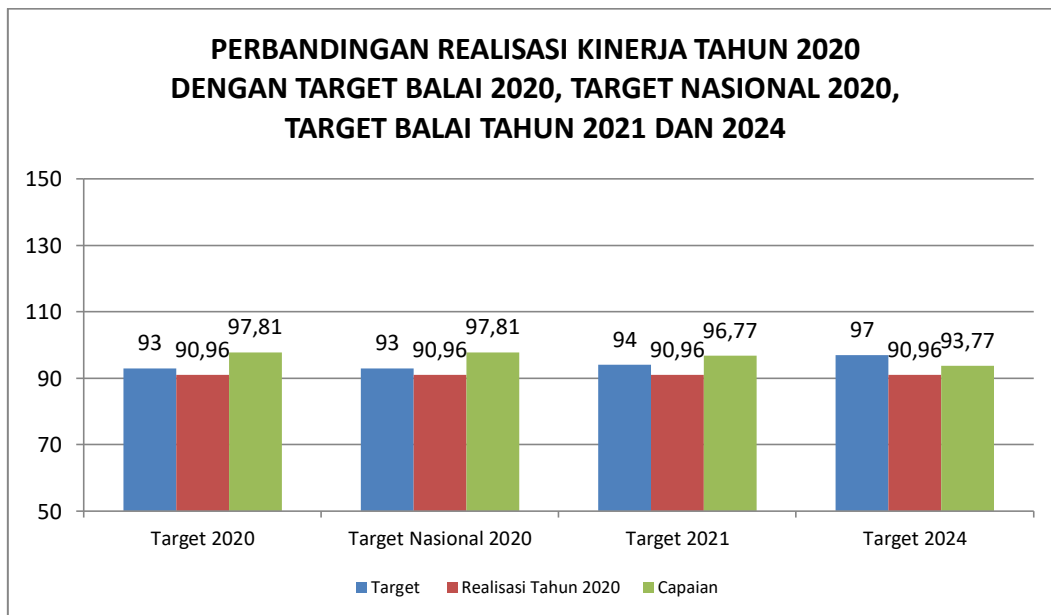
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Status
--------	-----------	---------	--------

93	90,96	97,81	Baik
----	-------	-------	------

Pada Renstra BPOM tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran menjadi salah satu indikator untuk penilaian kinerja Badan POM dan UPT di lingkungannya. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan komposisi 60% Nilai IKPA ditambah 40% Nilai EKA.

Pada akhir triwulan IV tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 90,96 dari target 93 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 97,81%, sedangkan terhadap target akhir RPJM tahun 2024, yaitu 97 capaiannya adalah 93,66%.

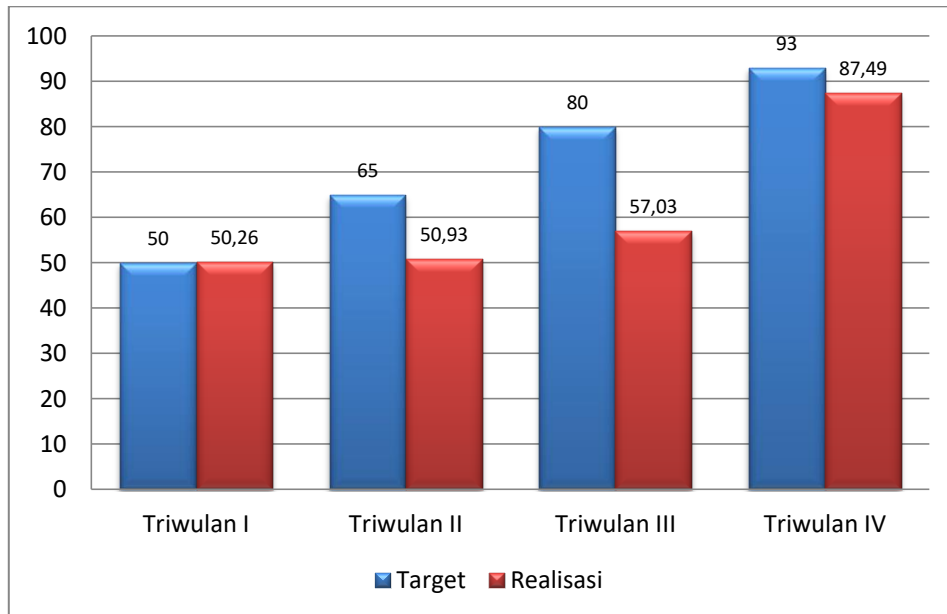


Grafik 3.80

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024**

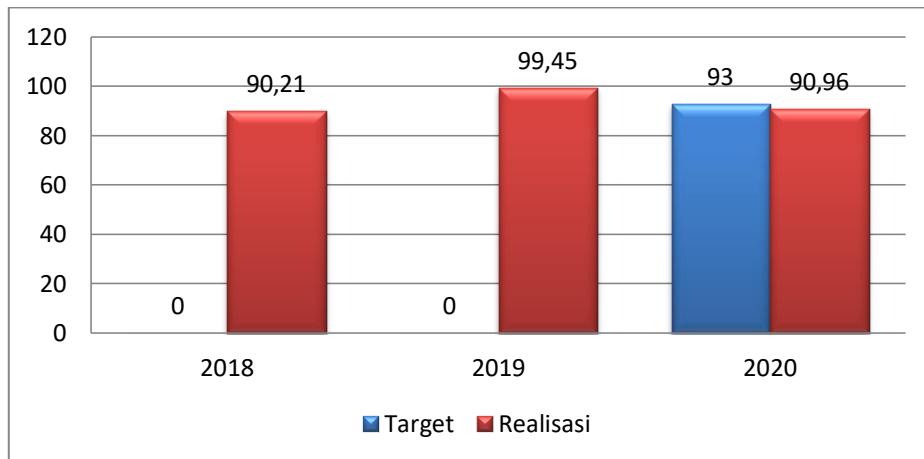
IKSK11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Perolehan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 per triwulan adalah sebagai berikut :



Grafik 3.81
Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
IKSK11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

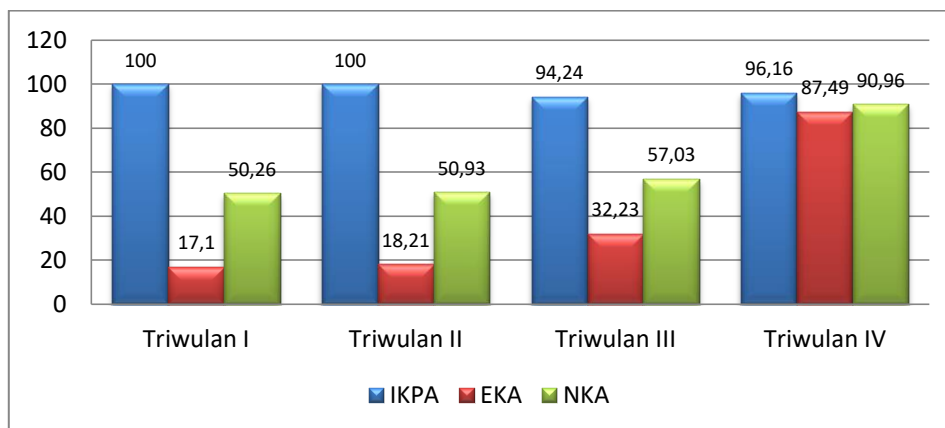
Meskipun pada Renstra BPOM tahun 2015-2019 Nilai Kinerja Anggaran tidak menjadi indikator penilaian kinerja, namun Nilai Kinerja Anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2018-2020.



Grafik 3.82

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2020

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa NKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, harus ditelaah dari ke dua sumber penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai EKA, dimana untuk tahun 2020 perolehan nilai tiap triwulannya adalah sebagai berikut :



Grafik 3.83

Perbandingan Nilai Komponen NKA BBPOM di Banjarmasin Per Triwulan Tahun 2020

A. Nilai IKPA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan hasil pengukuran yang disebut Nilai IKPA.

Pada tahun 2020, dilakukan reformulasi terhadap IKPA yang sebelumnya terdiri dari 12 indikator menjadi 13 indikator dan perubahan bobot penilaiannya.

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%
2	Data Kontrak	15%	15%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%
4	Konfirmasi Capaian Output	-	10%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%
8	LPJ Bendahara	5%	5%
9	Renkas	5%	5%
10	Kesalahan SPM	6%	5%

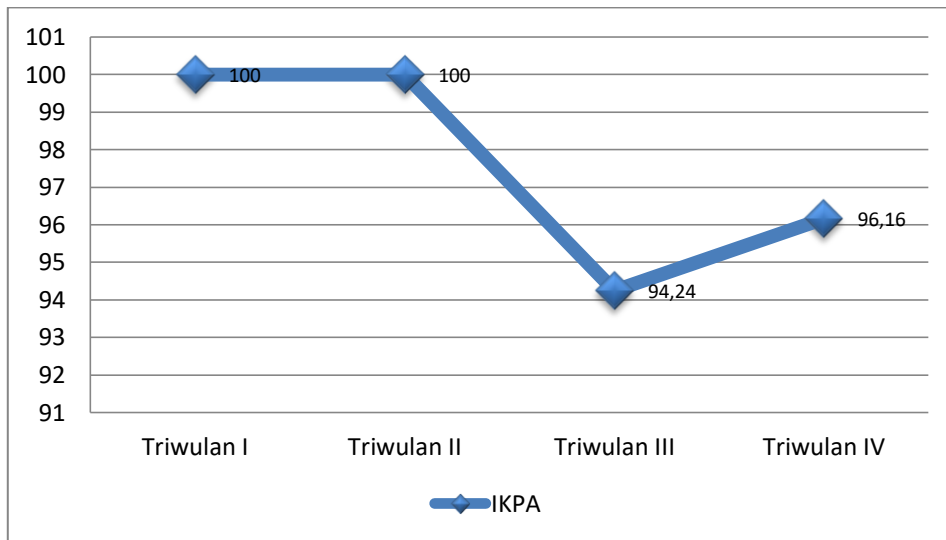
No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020
11	Retur SP2D	6%	5%
12	PaguMinus	4%	5%
13	Dispensasi	4%	5%
	TOTAL	100%	100%

Tabel 3.39
Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2019-2020

Untuk mendukung Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka pada triwulan I dan II tahun 2020 diterapkan relaksasi penilaian IKPA, namun tetap menjaga tata kelola keuangan.

Kemudian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020, penilaian IKPA dilaksanakan kembali untuk triwulan III dan IV tahun 2020.

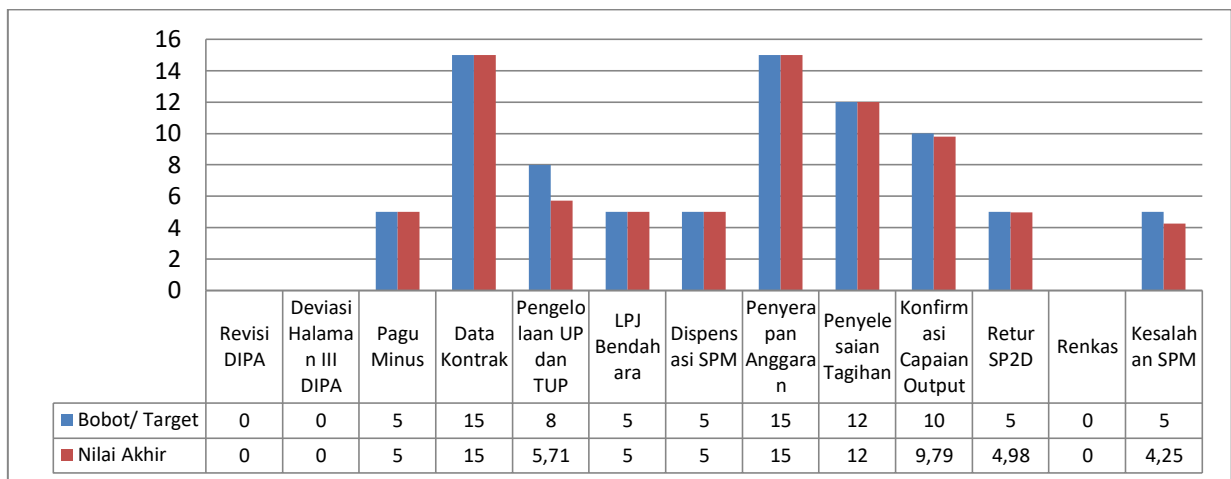
Kedua kebijakan tersebut diatas cukup berpengaruh terhadap perolehan Nilai IKPA Balai Besar POM di Banjarmasin, dimana pada triwulan I dan II, karena ada relaksasi penilaian, maka diasumsikan Nilai IKPA yang diperoleh adalah 100, sedangkan pada triwulan III dan IV, penilaian IKPA telah dilakukan terhadap 10 dari 13 indikatornya, dan pembobotannya menjadi 85%, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut :



Grafik 3.84

Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020 tiap Tri Wulan

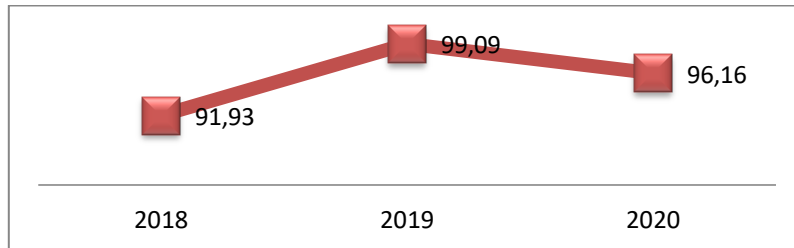
Berdasarkan komponennya Nilai IKPA Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik3.85

Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020 berdasarkan Komponen

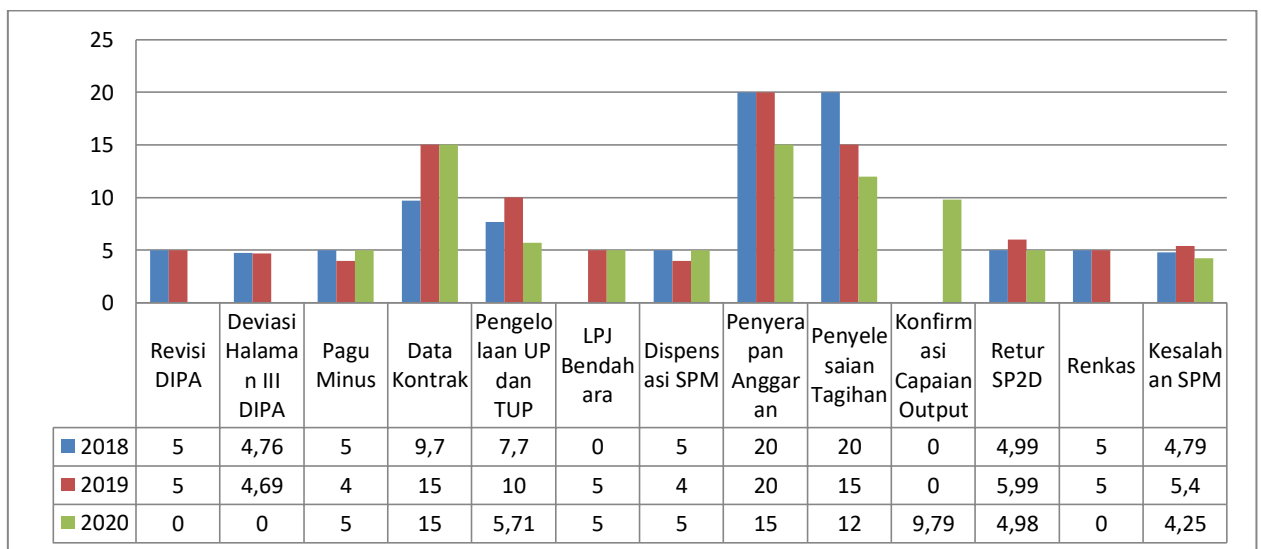
Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.86

Perbandingan Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2020

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.87

Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator yang belum maksimal capaian nilainya adalah Pengelolaan

UP dan TUP, Konfirmasi Capaian Output, Retur SP2D dan Kesalahan SPM, dengan faktor penyebab sebagai berikut :

1. Pengelolaan UP dan TUP

Nilai yang diperoleh adalah 71,43% dari bobot indikatornya sebesar 8 yaitu 5,71, dihitung dari 7 UP yang dilakukan selama tahun 2020, terdapat 2 UP yang bertanggung jawabannya tidak tepat waktu. Hal ini akibat adanya pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan berdampak pada penyerapan anggaran terhambat.

2. Retur SP2D

Selama tahun 2020 telah diterima 515 SP2D, 2 diantaranya terjadi retur akibat adanya kesalahan rekening penyedia, sehingga nilai yang diperoleh 99,61% dari bobot indikatornya sebesar 5 yaitu 47,98.

3. Kesalahan SPM

Pada tahun 2020 telah dibuat 537 SPM yang 22 diantaranya terjadi kesalahan dan harus diperbaiki. Kesalahan SPM yang terjadi diantaranya karena adanya perbaikan akun untuk kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang awalnya menggunakan akun belanja barang biasa, menjadi akun khusus COVID-19, sehingga nilai yang diperoleh 99,61% dari bobot indikatornya sebesar 6 yaitu 4,25.

4. Konfirmasi Capaian Output

Sebagai indikator baru hasil reformulasi IKPA penilaiannya berdasarkan konfirmasi capaian output bulanan, dimana yang dimaksud dengan terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali).

- Berdasarkan data OMSPAN bulan Juli sampai dengan Desember 2020, terdapat 2 output yang tidak terkonfirmasi, masing-masing 1 output di bulan Agustus dan Oktober sehingga diperoleh nilai 97,92% dari bobot sebesar 10 yaitu 9,79.
- Pada bulan Agustus 2020, capaian output yang tidak terkonfirmasi adalah output Layanan Sarana dan Prasarana Internal (951), karena progress sudah mencapai 66,67% sementara realisasi output masih 0 (nol), sehingga menjadi anomali. Hal ini disebabkan oleh target output yang bersifat generik (layanan) dan akan tercapai pada akhir tahun anggaran, sedangkan progress perbulannya dihitung dari target dibagi jumlah bulan setahun (12).
- Sedangkan pada bulan Oktober 2020, capaian output yang tidak terkonfirmasi adalah output Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar (003), dimana progressnya sebesar 176,7% , melebihi batas anomali 120%. Setelah ditelusuri, data anomali ini disebabkan oleh kekeliruan pengisian progress perbulan, dan telah diperbaiki pada saat sinkronisasi data monitoring dan evaluasi untuk penyusunan laporan ini.

B. Nilai EKA

EKA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 adalah sebesar 96,16, dengan rincian nilai 4 indikator sebagai berikut :

1. Penyerapan 93,55%

- Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin pada awal tahun 2020 sebesar Rp.53.402.305.000,- dan mengalami pemotongan anggaran pada saat Revisi APBNP sebesar Rp.26.697.470.000,- atau 49,99% sehingga pagu akhirnya adalah Rp.26.704.835.000,-
- Berdasarkan data realisasi anggaran per jenis belanja, serapan anggaran paling tinggi adalah belanja barang (52) dengan rata-rata 99,04%, dimana dari total anggaran Rp.12.241.388.000,- hanya tersisa Rp.118.078.058,- atau 0,96%. Kemudian diikuti oleh belanja pegawai (51) yang penyerapannya 92,28%. Penyerapan belanja pegawai yang kurang maksimal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang hanya memberikan THR dan Gaji ke 13 tanpa disertai dengan Tunjangan Kinerja, kepada pegawai Eselon III ke bawah, dan tidak memberikan THR dan Gaji ke 13 kepada pegawai Eselon II ke atas, sehingga dari pagu sebesar Rp.12.814.570,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp.988.665.540,- atau 7,72%. Apabila THR dan Gaji ke 13 dibayarkan sesuai perencanaan awal, maka penyerapan anggaran belanja pegawai akan maksimal, bahkan berdasarkan estimasi akan terjadi kekurangan pagu.
- Sedangkan belanja modal (53) penyerapannya hanya 62,69% yaitu Rp.1.033.599.570,- dari pagu Rp.1.648.877.000,-. Anggaran belanja modal yang tidak terserap Rp.615.277.430,-

(37,31%) merupakan sisa anggaran yang dipersiapkan untuk Pembayaran Kekurangan Bayar Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik Tahap II sebesar Rp.872.514.000,-. Kepastian perhitungan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp.257.236.570,- baru diperoleh pada akhir bulan November 2020, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan revisi optimalisasi sisa anggaran tersebut.

2. Konsistensi RPD Awal 69,52%

Singkatnya waktu penyusunan RKAKL Final/Alokasi Anggaran dan masih adanya perubahan-perubahan baik pagu maupun kegiatan, mengakibatkan kesulitan untuk menentukan RPD yang baik, dan penyusunan RPD hanya berdasarkan fitur trend pada aplikasi RKAKL. Hal ini mengakibatkan besarnya deviasi antara RPD Awal dengan realisasi penyerapan anggaran yaitu 30,48%

3. Konsistensi RPD Akhir 83,54%

- Adanya reformulasi penilaian IKPA tahun 2020, dimana revisi RPD yang dijadikan penilaian adalah yang diusulkan di bulan pertama tiap triwulan, sehingga harus dapat membuat estimasi RPD untuk 3 (tiga) bulan ke depan. Sementara usulan RPD dari masing-masing pengguna anggaran belum dilaksanakan dengan baik mengakibatkan sulitnya membuat estimasi RPD yang baik secara keseluruhan.
- Selain itu penggunaan aplikasi SAKTI yang penyusunan RPD nya cukup berbeda dibandingkan dengan aplikasi RKAKL, dimana pada aplikasi RKAKL penentuan RPD hanya sampai jenis belanja, sedangkan pada aplikasi SAKTI RPD disusun

sampai level komponen, bahkan level detail, cukup menyulitkan penyusunan RPD pada saat usulan revisi halaman III DIPA.

4. Capaian Keluaran (output) 100%

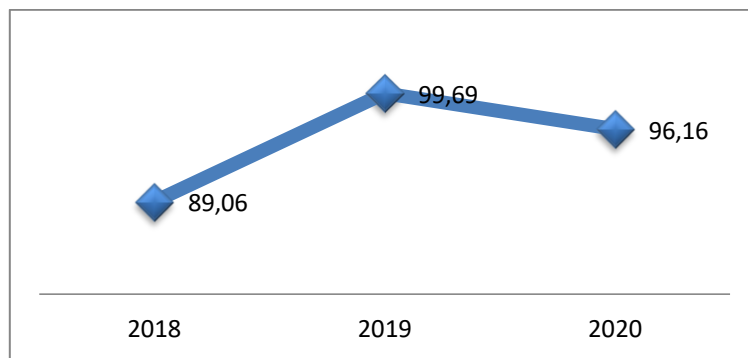
Merupakan rata-rata dari capaian keluaran 16 output yang dimiliki, dimana seluruh output berhasil mencapai 100 %, bahkan 5 output diantaranya memperoleh capaian lebih dari 100%, yaitu :

- 1) Output 003.Sampel Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 107,13%;
- 2) Output 004.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 111,82%;
- 3) Output 005.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 111,76%;
- 4) Output 081.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dengan capaian keluaran 100,06%; dan
- 5) Output 081.Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang disebabkan oleh optimalisasi anggaran untuk pengadaan 6 unit alat pengolah data dan komunikasi, dan 4 unit peralatan fasilitas perkantoran, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 88 unit dari target yang harus diadakan setelah revisi APBNP sebanyak 78 unit (113,95%)

5. Efisiensi 7,57%

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara capaian realisasi anggaran sebesar 93,55% dengan rata-rata capaian realisasi keluaran sebesar 102,80%.

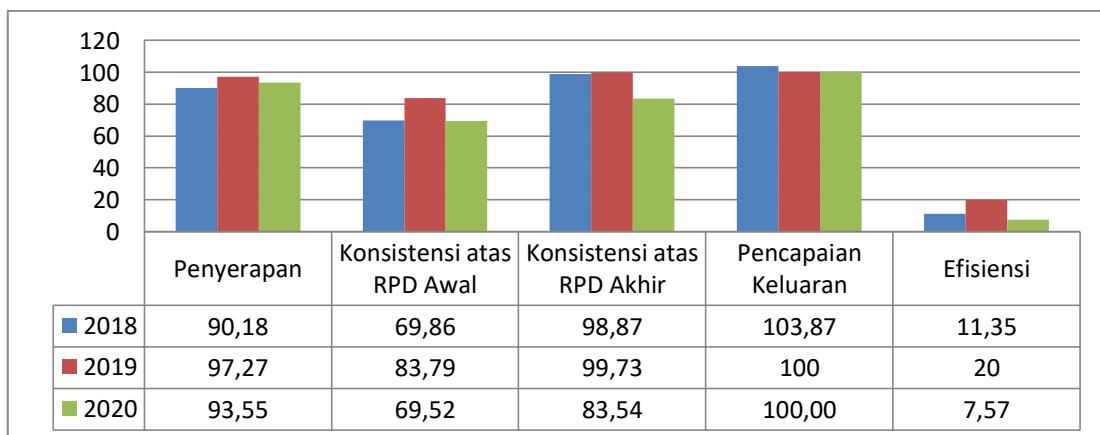
Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.88

Perbandingan Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2020

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.89

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin berdasarkan Komponen Tahun 2018-2020

Berdasarkan nilai komponen tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran

- Faktor penghambat penyerapan anggaran tahun 2020 ini adalah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pada hampir seluruh output tertunda dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun adanya revisi APBNP dan revisi realokasi anggaran untuk kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat, cukup mendongkrak penyerapan anggaran di tengah masa Pandemi Covid-19, ditambah Komitmen para pengelola kegiatan yang cukup tinggi, terutama dalam rangka pencapaian target penyerapan anggaran secara maksimal dan tetap akuntabel.
- Kepastian perhitungan jumlah yang harus dibayarkan untuk Pembayaran Kekurangan Bayar Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik Tahap II yang baru diperoleh pada akhir bulan November 2020, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan revisi optimalisasi sisa anggarannya.
- Untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali di tahun anggaran berikutnya, perlu meningkatkan koordinasi, baik dengan pihak pelaksana agar proses pekerjaan pembangunan gedung dapat terlaksana sesuai jadwal perencanaan serta dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang sama, maupun dengan

pihak lain yang berwenang, apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

2. Konsistensi Penyerapan Anggaran, baik terhadap RPD Awal maupun RPD Akhir.

- Penyusunan RPD Awal belum dilaksanakan berdasarkan POA yang proporsional, namun masih berdasarkan fitur trend pada aplikasi RKAKL pada saat penyusunan RKAKL Final/Alokasi Anggaran. Penyusunan RKAKL Final/Alokasi Anggaran sendiri sangat singkat dan masih ada perubahan-perubahan baik pagu maupun kegiatan, sangat sulit untuk menentukan RPD yang baik. Sehingga RPD Awal hanya berdasarkan data RPD tahun anggaran sebelumnya dengan sedikit perbaikan pada bulan-bulan tertentu. Penyusunan POA sendiri dilaksanakan di awal tahun Anggaran berjalan. Ditambah lagi dengan penggunaan aplikasi SAKTI yang penyusunan RPD nya cukup berbeda dibandingkan dengan aplikasi RKAKL. Pada aplikasi RKAKL penentuan RPD hanya sampai jenis belanja, sedangkan pada aplikasi SAKTI RPD disusun sampai level komponen, bahkan level detail. Belum adanya usulan RPD dari masing-masing Bidang pengguna anggaran mengakibatkan sulitnya membuat estimasi RPD yang baik secara keseluruhan.
- Komitmen para pengelola kegiatan yang cukup baik, dan telah dilakukan upaya perbaikan RPD melalui mekanisme Revisi Halaman III DIPA secara berkala, sehingga meminimalkan deviasi yang terjadi (RPD Akhir).
- Penyusunan DIPA/RKKAKL Final/Alokasi Anggaran hendaknya diberikan waktu yang lebih panjang, agar Penyusunan RPD Awal yang dilakukan memanfaatkan fitur trend, masih dapat

disesuaikan dengan memperhatikan data realisasi anggaran di tahun sebelumnya dan rencana pelaksanaan kegiatan (KAK) masing-masing.

3. Capaian Keluaran

Faktor yang menghambat pencapaian keluaran kegiatan adalah adanya keluaran yang pencapaiannya dapat dinilai pada akhir tahun anggaran, seperti output 011. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan; output 085. Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); output 089. Desa Pangan Aman; dan output 090. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

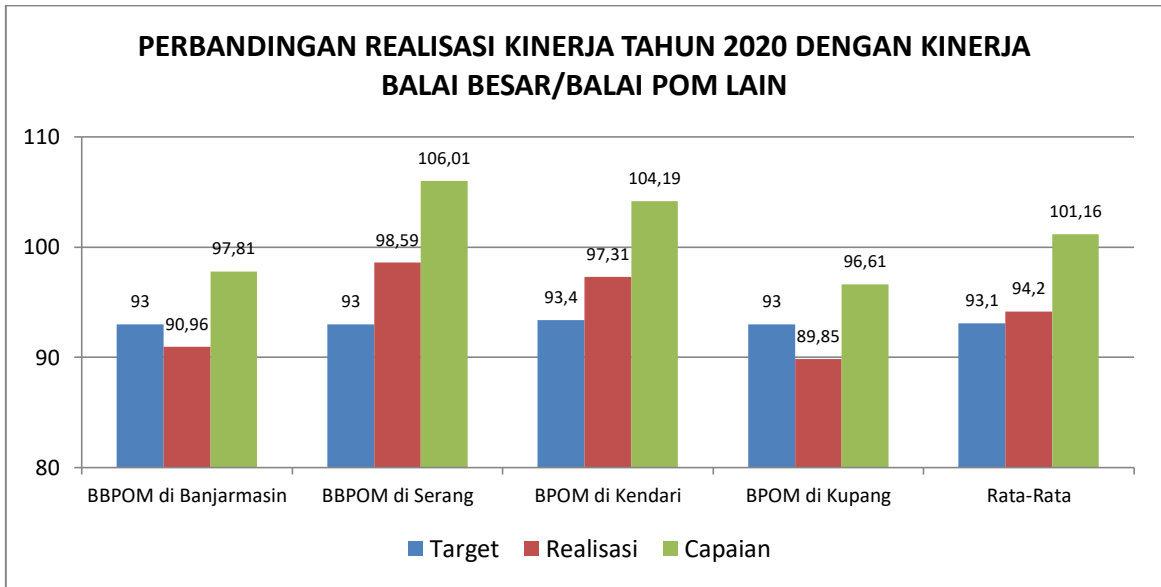
Target keluaran pada dasarnya sudah sesuai dengan kemampuan balai, sehingga dapat dipenuhi dengan baik

4. Efisiensi

- Faktor penghambat efisiensi diantaranya adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pada hampir seluruh output tertunda dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Disamping itu adanya output dengan target volume keluaran generik yang membatasi kemungkinan pencapaian tidak dapat melebihi 100%.
- Faktor pendukung efisiensi adalah, pencapaian keluaran dari beberapa output yang melebihi target, seperti :
 - 1) Output 003.Sampel Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 107,13%;
 - 2) Output 004.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 111,82%;

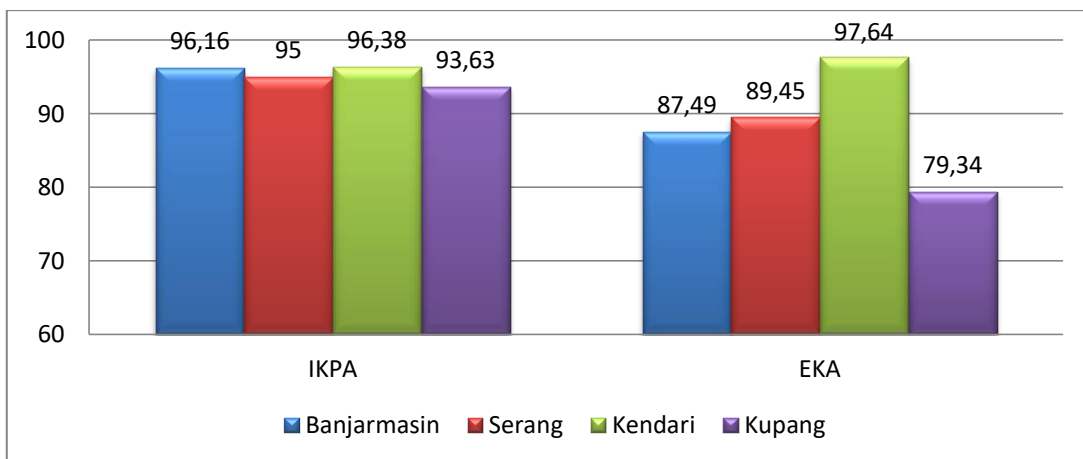
- 3) Output 005.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa, capaian keluarannya 111,76%;
 - 4) Output 081.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dengan capaian keluaran 100,06%; dan
 - 5) Output 081.Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan capaian keluaran 113,95%.
- Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, semakin besar semakin tinggi efisiensinya. Untuk dapat mempertahankan gap tersebut, di satu sisi diharapkan penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, dimana realisasi anggaran minimal 90 % untuk mendapatkan nilai 100 pada IKPA, di sisi lain realisasi volume keluaran harus maksimal dengan tetap memperhatikan batas anomali, tidak lebih dari 120%.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020, berada di posisi ke 3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



Grafik 3.90
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Apabila dilihat dari Nilai EKA dan IKPA maka posisi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



Grafik 3.91
Perbandingan Nilai IKPA dan Eka Tahun 2020

Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Perkantoran, khususnya penyediaan anggaran dan pembayaran Gaji dan Tunjangan, menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.814.570.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 11.826.459.886,- atau 92,29%.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 97,69% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,06 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,06, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau Efisien.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020	97,69 %	92,29 %	1,06	0,06	100%

Tabel 3.40

Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
IKSK11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

**IKSK
11.2**

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Status
90	100	111,11	Sangat Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan, dibutuhkan pengukuran dan penetapan beberapa hal sebagai berikut :

a. Indeks efisiensi (IE)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input. Persentase Capaian Output yang dimaksud adalah Persentase Capaian Indeks Kinerja atau Rata-rata Persentase Capaian Indeks Kinerja, sedangkan Persentase Capaian Input adalah Persentase Penyerapan Anggaran per Indeks Kinerja atau Persentase Penyerapan Anggaran seluruhnya.

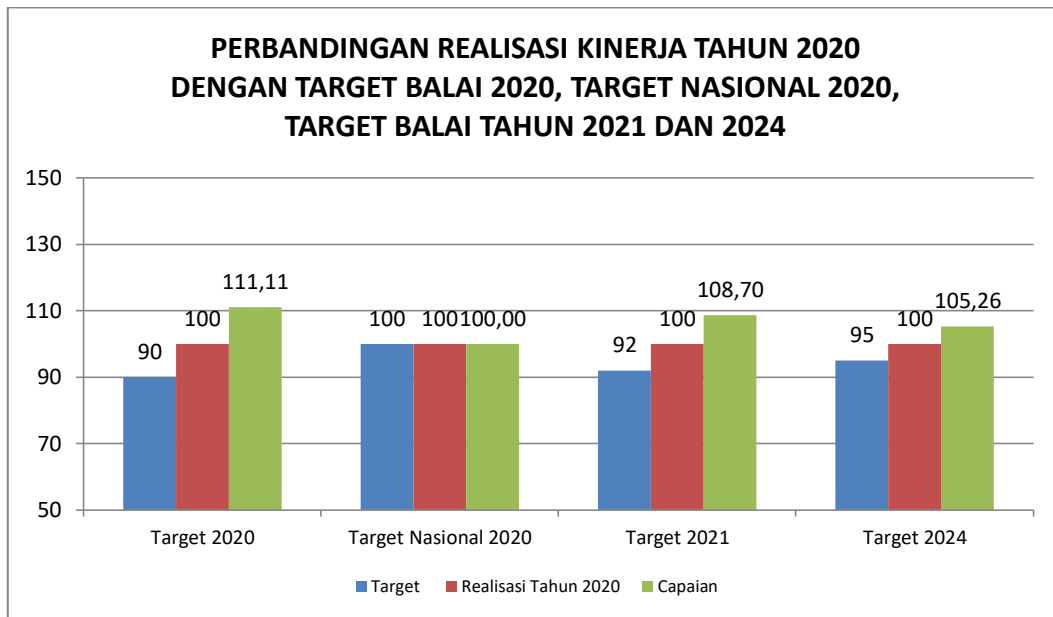
b. Standar efisiensi (SE) ditetapkan dengan nilai 1

c. Tingkat Efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih besar atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Efisien**,
- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Tidak Efisien**.
- Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:
 - **0 - 0,2 : 100% → Efisien**
 - **0,21 - 0,4 : 95% → Efisien**

- **0,41 - 0,6 : 92% → Efisien**
 - **0,61 - 0,8 : 90% → Efisien**
 - **0,81 - 1,0 : 88% → Efisien**
 - **1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien**
 - **1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien**
 - **1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien**
 - **1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien**
 - **> 1,81 : 75% → Tidak Efisien**
- Atau dengan kata lain penentuan kriteria Efisien sebagai berikut :
 - 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - 2) Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Pada tahun 2020 berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin adalah Efisien dengan nilai 100%, dengan kata lain Balai Besar POM di Banjarmasin telah mampu menghasilkan capaian output yang lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi penggunaan anggaran sebagai inputnya. Capaian output rata-rata yang diperoleh adalah 105,87% sedangkan capaian realisasi anggaran seluruhnya adalah 93,55%.



Grafik 3.92

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Balai Tahun 2020,
Target Nasional 2020 dan Target Balai Tahun 2021 dan 2024
IKSK11.2 Tingkat Efisiensi Anggaran BBPOM di Banjarmasin**

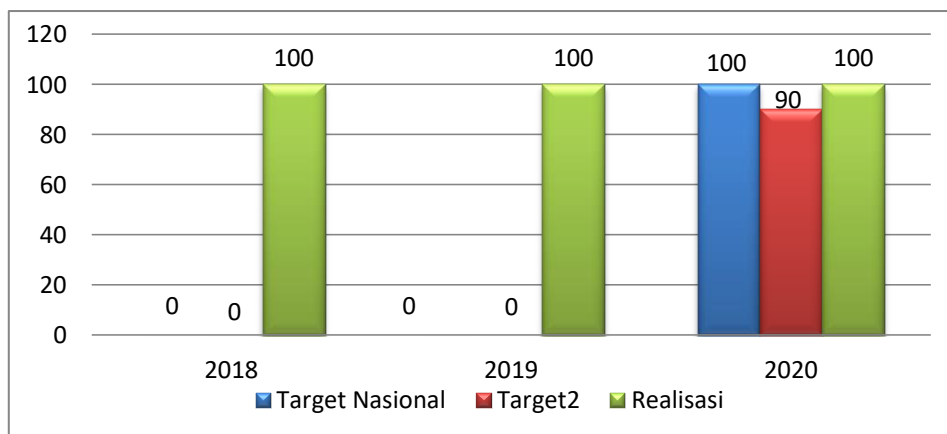
Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2020 ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Efisien dengan nilai 90% dengan capaian 111,11%, dan terhadap target akhir tahun RPJM yaitu 2024 sebesar 95% dengan capaian 105,26%. Realisasi indikator kinerja ini sesuai dengan target nasional yaitu Efisien dengan nilai 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Perkantoran, khususnya operasional dan pemeliharaan kantor, baik yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, maupun oleh Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk kegiatan tersebut tersedia pagu anggaran sebesar

Rp4.509.259.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 4.427.556.862,- atau 98,1%.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 111,11% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,16 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,13, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau Efisien.

Meskipun pada Renstra BPOM tahun 2015-2019 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak menjadi indikator penilaian kinerja, namun Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2018-2020.



Grafik 3.93

**Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2019**

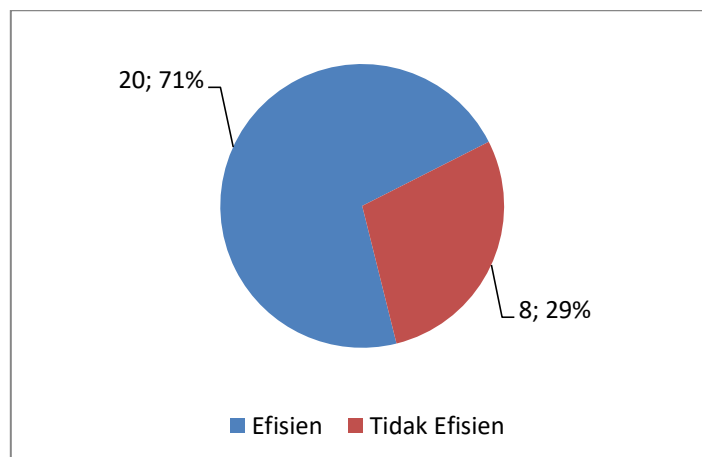
Adapun Capaian Tingkat Efisiensi dari masing-masing IK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Output (%)	Capaian Input (anggaran) (%)	Capaian TE	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,15	99,99	75 %	Tidak Efisien
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,54	99,98	100 %	Efisien
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,16	99,99	75 %	Tidak Efisien
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,48	99,98	75 %	Tidak Efisien
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	115,24	98,51	100 %	Efisien
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	112,03	99,95	100 %	Efisien
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	105,71	99,92	100 %	Efisien
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100,77	100	100 %	Efisien
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,84	100	75 %	Tidak Efisien
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	97,31	100	75 %	Tidak Efisien
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121,72	99,95	95 %	Efisien
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	182,95	99,76	88 %	Efisien
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,02	99,71	100 %	Efisien
Indeks Pelayanan Publik	118,65	100	100 %	Efisien
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	107,37	98,51	100 %	Efisien
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	99,97	100 %	Efisien
Jumlah desa pangan aman	100	99,28	100 %	Efisien
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100	99,90	100 %	Efisien
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	108,08	99,99	100 %	Efisien
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	110,79	99,98	100 %	Efisien
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	110,73	99,52	100 %	Efisien

Indikator Kinerja	Capaian Output (%)	Capaian Input (anggaran) (%)	Capaian TE	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	87,15	99,64	75 %	Tidak Efisien
Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	95,18	99,28	75 %	Tidak Efisien
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	106,88	99,13	100 %	Efisien
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,42	99,97	75 %	Tidak Efisien
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	120,53	62,69	88 %	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	97,69	92,29	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	111,11	98,19	100 %	Efisien
TOTAL	105,87	93,55	100 %	Efisien

Tabel 3.41
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator Kinerja
BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018-2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 28 indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, 20 indikator kinerja berhasil memperoleh capaian tingkat efisiensi anggaran Efisien dengan nilai antara 88% sampai dengan 100%, sedangkan 8 IK lainnya hanya mampu memperoleh nilai 75% atau Tidak Efisien.

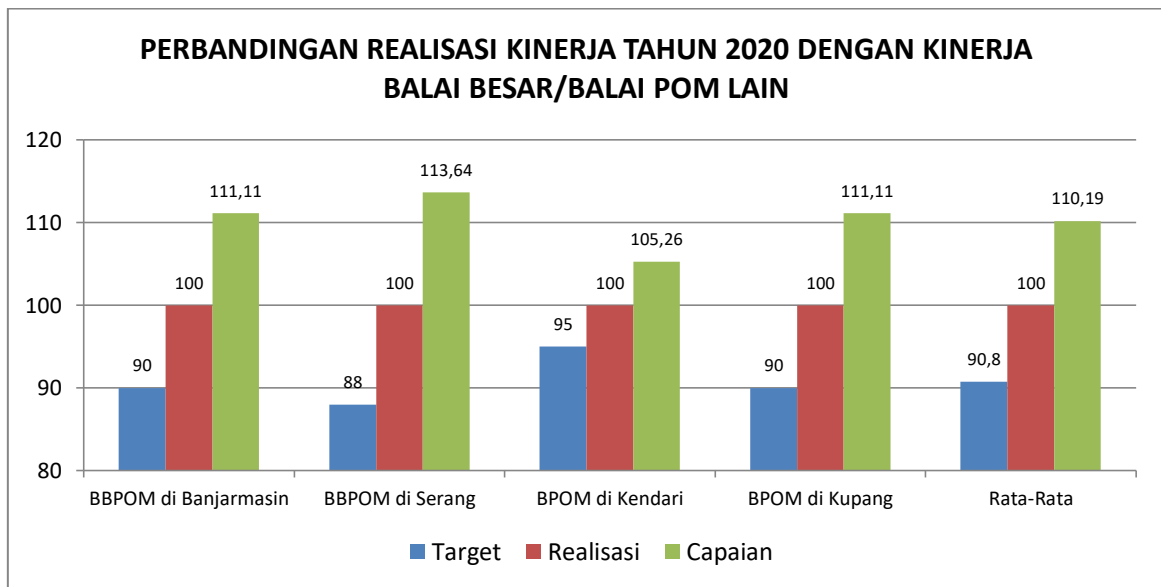


Grafik 3.94

Profil Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020

Faktor penghambat pencapaian ik ini adalah adanya 8 IK yang capaian outputnya masih belum mencapai target. Dari ke 8 IK tersebut, terdapat 2 IK terlalu tinggi dalam menetapkan targetnya oleh BBPOM di Banjarmasin sendiri, bahkan di atas target nasional, yaitu IK.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan IK.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Sedangkan 6 IK lainnya penetapan target sudah sesuai dengan target nasional atau target ditetapkan oleh Badan POM.

Berdasarkan data dari 3 Balai Besar/ Balai POM lain sekluster didapatkan perbandingan sebagai berikut :



Grafik 3.95

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6
IKSK12.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Seluruh Balai Besar/ Balai POM seklaster dapat memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran yang Efisien dengan nilai 100%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan oleh masing-masing UPT, sehingga direkomendasikan untuk meningkatkan target masing-masing pada tahun-tahun berikutnya sesuai target nasional

3.2. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berikut rincian realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020 per Sasaran Kinerja :

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1,230,769,150	1,230,623,207	99.99
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	526,079,500	518,227,992	98.51
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	197,600,000	197,512,488	99.96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di	396,327,000	395,516,309	99.80

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
	Banjarmasin			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1,615,017,500	1,602,132,753	99.20
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	166,632,850	166,610,718	99.99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	435,478,000	433,385,198	99.52
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,777,241,000	1,765,025,578	99.31
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	46,065,000	45,664,200	99.13
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2,989,796,000	2,374,096,781	79.41
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara akuntabel	17,323,829,000	16,254,016,748	93.82
	JUMLAH	26,704,835,000	24,982,811,972	93.55

Data berdasarkan OMSPAN

Tabel 3.42

Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020

Rata-rata capaian realisasi anggaran tiap sasaran kegiatan adalah 97,15%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin berbanding lurus dengan

program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang secara fisik mencapai 100% (data terlampir).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan seluruh program/kegiatan sesuai perjanjian kinerja dengan baik walaupun masih ada sisa anggaran yang tidak terserap. Agar capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat optimal, dilakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara baik dan tepat.

Upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 versi Rencana Kerja (Renja)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Muhammad Guntur**
Jabatan : **Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P**
Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 NOV 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.



Dr. Muhammad Guntur



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	89,10
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70
		3. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80
		4. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00
		2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55,00
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	70,00
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin	74,00
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin	71,00
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin	84,00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	70,00
		2.Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		3.Jumlah desa pangan aman	6
		4.Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1.Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		2.Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00
9	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	1.Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	81,00
		2.Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	81,00
10	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	1.Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	77,00
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Banjarmasin yang Terintegrasi dan Adaptif	1.Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Banjarmasin yang baik	70,00
12	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	1.Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93,4
		2.Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien (90%)



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan

Anggaran

Rp. 53.402.305.000,-


Jakarta, 15 NOV 2019

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama

Dr. Muhammad Guntur



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.02.109.11.19. 6164

TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020.**
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : **01 NOV 2019**





BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : HK.02.02.109.11.19.6164 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	89,10
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70
		3. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80
		4. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00
		2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55,00
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	70,00
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin	74,00
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin	71,00
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin	84,00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	70,00
		2.Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		3.Jumlah desa pangan aman	6
		4.Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1.Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		2.Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00
9	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	1.Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	81,00
		2.Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	81,00
10	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	1.Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	77,00
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Banjarmasin yang Terintegrasi dan Adaptif	1.Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Banjarmasin yang baik	70,00
12	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	1.Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93,4
		2.Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien (90%)



KEPALA,

MUHAMMAD GUNTUR

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 versi Renstra 2020-2024
(Setelah APBNP 2020)

 BADAN POM	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa, Apt.
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jakarta, 11 Juni 2020	
Pihak Kedua  Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.	Pihak Pertama  Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan

Anggaran

Rp. 26.704.835.000,-

Jakarta, 11 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama



Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2020 versi Renstra 2020-2024 (setelah APBP 2020)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	695.924.800,-
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	381.076.500,-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	94	86.990.600,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	81.659.250,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	68	33.920.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	86	82.982.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72	59.850.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	88,5	19.680.000,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	40.660.000,-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	50	50	55	24.960.000,-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	82	82	82	84.120.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	10	10	15	20	93.594.000,-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	13,75	27,5	41,25	55	201.474.000,-
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,46	3,81	4,16	11.720.000,-
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	83,73	83,73
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%			50%	80%	16	328.128.000,-
Jumlah desa pangan aman	20%			50%	85%	4	666.460.000,-
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%			60%	70%	2	129.550.000,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	45	67,5	90	86.990.600,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	45	67,5	90	81.659.250,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,25	40,5	60,75	81	529.948.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	85	162.778.000,-
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	80	1.676.219.000,-
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	75	59.215.000,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	76	1.434.635.000,-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	-	1,51	1,51	1,51	1.648.877.000,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	50	65	80	93	12.814.570.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	4.509.259.000,-
J U M L A H						26.704.835.000,-	

Jakarta, 11 Juni 2020



Dis. H. G. Kakerissa, Apt.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	081.001.051.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	9.056.000		
			081.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL BAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (BALAI)	236.447.000		
			081.001.053.A	Pengujian laboratorium sampel obat, Ot, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	373.200.000		
			081.001.054.A	Evaluasi Pengujian	1.000		
			081.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	29.236.000		
			081.002.062.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	4.448.000		
			081.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	33.520.800		
			081.003.072.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	5.008.000		
			081.003.072.B	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	5.008.000		
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	003.001.051.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING/ EVALUASI SAMPLING 2020 DAN PERENCANAAN SAMPLING 2021	4.102.000		
			003.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	77.383.600		
			003.001.053.A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	275.800.000		
			003.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	7.609.700		
			003.002.061.B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	689.500		
			003.002.062.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	4.137.000		
			003.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	11.353.700		
			003.003.072.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	1.000		

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	081.001.051.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	1.132.000
			081.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (BALAI)	29.556.000
			081.001.053.A	Pengujian laboratorium sampel obat, Ot, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	46.649.000
			081.001.054.A	Evaluasi Pengujian	1.000
			081.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	3.654.500
			081.002.062.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	556.000
			081.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	4.190.100
			081.003.072.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	626.000
			081.003.072.B	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	626.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	003.001.051.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING/ EVALUASI SAMPLING 2020 DAN PERENCANAAN SAMPLING 2021	879.000
			003.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	16.582.200
			003.001.053.A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	59.100.000
			003.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	1.630.650
			003.002.061.B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	147.750
			003.002.062.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	886.500
			003.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	2.432.150
			003.003.072.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	1.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	088.001.052.B	PERTEMUAN NASIONAL	33.920.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	005.001.053 O	Pelayanan Prima dan Bimtek E Registration Pangan Olahan	34.285.000
			087.001.051 B	Pembinaan UMKM dalam rangka pemenuhan GMP/GDP/Granding IRTP menuju MD	35.520.000
			087.001.052 A	Bimtek pendaftaran Pangan Olahan dan Layanan Publik	2.400.000
			087.001.052 B	Inhouse Training Registrasi Pangan	5.270.000
			087.001.052 C	Peningkatan Kompetensi Petugas	5.507.000
		088.001.052 A	Advokasi dan Koordinasi kepada Stakeholder	59.850.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	088.001.052 C	Konsultasi/ Koordinasi/ Peningkatan Kompetensi bidang Infokon	19.680.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	005.001.052 A	WORKSHOP/ SEMINAR/ BIMBINGAN TEKNIS / MANAJEMEN/ FORUM KOMUNIKASI/ DIKLAT	10.032.000
			005.001.052 B	KONSULTASI/ KOORDINASI/ PENINGKATAN KOMPETENSI	10.614.000
			005.001.052 C	WORKSHOP PENGAWASAN PANGAN ONLINE	4.143.000
			005.001.052 D	EVALUASI EFEKTIFITAS HASIL PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KOSMETIK	6.000.000
			005.002.062 A	Rakontek Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	5.463.000
			005.002.062 C	Bimtek Inspektur OT dan SK Tingkat Dasar dan Lanjutan	4.407.000
			005.003.072 A	Rakontek Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1.000

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	005.001.053 C	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.660.000
			005.001.053 E	RAKOR MANAJEMEN INSPEKSI PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU 2020	5.660.000
			005.001.053 F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB	11.318.000
			005.001.053 J	SOSIALISASI STANDAR DAN REGULASI DI BIDANG ONPP DAN ZAT ADIKTIF	2.320.000
			005.002.062 B	Evaluasi efektifitas hasil pemeriksaan sarana distribusi dan produksi kosmetik	1.000
			005.003.072 B	Konsultasi /koordinasi/peningkatan kompetensi	1.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	005.001.051 D	Pemeriksaan/pembinaan sarana UMKM dalam rangka E-Registrasi/ Pemenuhan GMP	8.280.000
			087.001.051 A	Audit sarana produksi/ distribusi produk OMKA dalam rangka perizinan dan sertifikasi/ penerbitan SKI/ Serifikasi Halal	50.000.000
			087.002.053 A	Audit sarana produksi/ distribusi produk OMKA dalam rangka perizinan dan sertifikasi/ penerbitan SKI/ Serifikasi Halal	14.680.000
			087.003.054 A	Audit sarana produksi/ distribusi produk OMKA dalam rangka perizinan dan sertifikasi/ penerbitan SKI/ Serifikasi Halal	11.160.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	004.001.051 A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI DALAM KOTA	11.120.000
			004.001.051 B	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA	52.620.000
			004.001.052 A	BIMTEK INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK TINGKAT DASAR DAN TINGKAT LANJUTAN	5.308.000
			004.002.061 A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. HSU	3.869.000
			004.002.062 A	BIMTEK INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK TINGKAT DASAR DAN TINGKAT LANJUTAN	1.000
			004.003.071 A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. TANAH BUMBU	11.000.000
			004.003.072 A	BIMTEK INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK TINGKAT DASAR DAN TINGKAT LANJUTAN	9.676.000

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	005.001.051 A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	74.530.000
			005.001.051 B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR)	80.160.000
			005.001.051 E	KONSULTASI/ KOORDINASI/ ADVOKASI/ INSPEKSI/ UNDANGAN/ WORKSHOP	3.090.000
			005.001.051 F	PRESS CONFERENCE HASIL PENGAWASAN	3.350.000
			005.001.061 A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. HSU	9.450.000
			005.001.061 B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. HSU	10.830.000
			005.001.071 A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. TANAH BUMBU	10.104.000
			005.001.071 B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) DI LUAR KOTA OLEH LOKA POM KAB. TANAH BUMBU	9.960.000
			Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	970.001.053 I	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	088.001.051 A	SOSIALISASI KEAMANAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	291.085.000
			088.001.051 B	KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI / KIE	35.095.000
			088.001.051 C	SOSIALISASI DI MEDIA CETAK/ ELEKTRONIK/ TALKSHOW/ MEDIA SOSIAL/ LUAR RUANG	41.400.000
			088.001.051 D	MOBIL LAB KELILING DALAM RANGKA CAR FREE DAY	8.160.000
			088.001.051 E	PAMERAN	136.990.000
			088.002.061 A	SOSIALISASI KEAMANAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	89.604.000
			088.002.062 A	TALKSHOW/ PAMERAN/ SOSIALISASI MEDIA	1.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			088.002.071 A	SOSIALISASI KEAMANAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	59.360.000
			088.002.072 A	TALKSHOW/ PAMERAN/ SOSIALISASI MEDIA	16.240.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	085.001.051	KOORDINASI LINTAS SEKTOR	59.895.000
			085.001.052 A	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	154.963.000
			085.001.052 B	AUDIT DAN PENDAMPINGAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH	62.760.000
			085.001.052 C	SAMPLING DAN OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	48.085.000
			085.001.052 D	MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI INTERVENSI KEAMANAN PJAS	2.425.000
		Jumlah desa pangan aman	089.001.051 A	ADVOKASI DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DESA	39.760.000
			089.001.052 A	PELATIHAN KORLAP DAN KADER KEAMANAN PANGAN DAERAH	116.420.000
			089.001.052 B	BIMTEK KOMUNITAS DESA	157.280.000
			089.001.052 C	GAP ASSESSMENT / NEED ANALYSIS DAN FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	77.400.000
			089.001.053 A	MOBIL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PRE DAN POST PENGAWALAN KEAMANAN PANGAN	30.340.000
			089.001.053 B	MOBIL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PENGAWALAN DESA YANG TELAH DIINTERVENSI PADA TAHUN SEBELUMNYA	28.720.000
			089.001.054 A	MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	181.900.000
			089.001.054 B	LOMBA DESA PANGAN AMAN	34.640.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	090.001.051	ADVOKASI KOMITMEN PEMDA SERTA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	17.500.000
			090.001.053 A	KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	12.800.000
			090.001.053 B	PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR DAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PASAR	48.130.000
			090.001.053 C	SURVEY PASAR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	9.720.000
			090.001.054 A	MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	28.120.000
			090.001.054 B	PENDAMPINGAN PETUGAS PENGAWAS PASAR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	13.280.000

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	081.001.051.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	1.131.000
			081.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL BAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (BALAI)	29.556.000
			081.001.053.A	Pengujian laboratorium sampel obat, Ot, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	46.650.000
			081.001.054.A	Evaluasi Pengujian	1.000
			081.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	3.654.500
			081.002.062.A	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	556.000
			081.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN (LOKA TANBU)	4.190.100
			081.003.072.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	626.000
			081.003.072.B	PENAJAMAN MUTU PRIORITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK DI PEREDARAN	626.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	003.001.051.A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING / EVALUASI SAMPLING 2020 DAN PERENCANAAN SAMPLING 2021	879.000
			003.001.052.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	16.582.200
			003.001.053.A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	59.100.000
			003.002.061.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	1.778.400
			003.002.061.B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	443.250
			003.002.062.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	443.250
			003.003.071.A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	2.432.150
			003.003.072.A	FORUM DISKUSI MANAJEMEN JEJARING LABORATORIUM DI BADAN POM	1.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	011.001.051 B	WORKSHOP MANAJEMEN INTELIJEN	7.960.000
			011.001.051 F	BIMTEK APLIKASI DASHBOARD PENINDAKAN (PETA RAWAN KASUS)	1.270.000
			027.U01.051 A	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi (Operasi Intelijen)	48.160.000
			027.U01.052 A	Pelaksanaan Pendalaman Informasi	103.680.000
			027.U01.055 A	Operasi Penindakan	165.660.000
			027.U01.055 B	Penangkapan dan Penahanan	11.160.000
			027.U01.056 A	Pemberkasan	91.660.000
			027.U01.056 B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	18.576.000
			027.U01.056 C	Gelar Perkara	2.402.000
			027.U01.056 D	Bantuan Hukum	3.600.000
			027.U02.051 A	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi (Operasi Intelijen)	3.820.000
			027.U02.052 A	Pelaksanaan Pendalaman Informasi	9.720.000
			027.U02.053 A	Evaluasi Hasil Pendalaman Informasi, Gelar Kasus dan Pelaporan	305.000
			027.U02.054 A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	244.000
			027.U02.055 A	Operasi Penindakan	12.930.000
			027.U02.055 B	Penangkapan dan Penahanan	4.320.000
			027.U02.056 A	Pemberkasan	15.201.000
			027.U02.056 B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2.000.000
			027.U02.056 C	Gelar Perkara	4.530.000
			027.U03.051 A	Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi (Operasi Intelijen)	5.820.000
			027.U03.052 A	Pelaksanaan Pendalaman Informasi	1.950.000
			027.U03.055 A	Operasi Penindakan	10.180.000
			027.U03.056 A	Pemberkasan	1.800.000
			027.U03.056 B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2.000.000
			027.U03.056 D	Bantuan Hukum	1.000.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	970.001.051 A	PERENCANAAN/ IMPLEMENTASI/ PENGELOLAAN/ KONSULTASI/ KOORDINASI/ SAI/ KEUANGAN	58.140.000
			970.001.051 B	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	12.990.000
			970.001.051 C	KOORDINASI/ KONSULTASI/ PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/ EVALUASI/ LAPORAN KEUANGAN/ KETATAUSAHAAN	71.752.000
			970.001.051 D	AWARENESS QMS ISO 9001:2015	4.411.000
			970.001.052 E	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI	10.710.000
			970.001.053 H	PELATIHAN AGEN OF CHANGE/ REFORMASI BIROKRASI	4.775.000
			970.001.052 B	RAPAT EVALUASI NASIONAL	28.910.000
			970.001.052 C	KOORDINASI/ KONSULTASI/ SUPERVISI DALAM RANGKA TATA HUBUNGAN KERJA	80.623.000
			970.001.052 D	SINERGISME EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI IMPLEMENTASI DAN EVALUASI RB DAN ZI WBK/WBBM SERTA QMS ISO 9001:2015 TERINTEGRASI DENGAN SPIP DAN FRAUD CONTROL PLAN	6.920.000
			970.001.054 A	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	362.450.000
		970.001.054 B	PENGELOLAAN BMN	12.440.000	
		970.001.054 C	PEMUTAKHIRAN DATA BMN	21.220.000	
		970.001.054 D	PENCEGAHAN WABAH COVID 19 MELALUI DETEKSI DINI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN IMUNITAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BBPOM DI BANJARMASIN	404.880.000	
		970.001.054 E	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	60.000.000	
		970.001.054 F	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SATPAM, SOPIR DAN PRAMUBAKTI	30.800.000	
		970.001.054 G	ADMINISTRASI/ PERSIAPAN/ PENYELENGGARAAN PBJ	16.743.000	
		970.001.054 H	OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA POM KAB. HSU	294.991.000	
		970.001.054 I	OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA POM KAB. TANAH BUMBU	295.820.000	
		083.001.051 A	Advokasi/koordinasi/ sosialisasi/ evaluasi/ supervisi Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	9.560.000	
		083.001.051 B	Advokasi/koordinasi/ sosialisasi/ evaluasi/ supervisi Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	9.860.000	



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			083.001.052 A	Awariness QMS ISO 9001:2019 dan ujian Kompetensi CPNS	17.390.000
			083.001.052 B	Awariness QMS ISO 9001:2019	4.292.000
			083.001.052 C	Sinergisme Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Melalui Implementasi dan Evaluasi RB dan ZI WBK/WBBM Loka POM I	9.660.000
			083.001.052 D	Sinergisme Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Melalui Implementasi dan Evaluasi RB dan ZI WBK/WBBM Loka POM II	9.660.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	970.001.053 A	PEMBINAAN OLEH ES I BPOM	13.650.000
			970.001.053 B	PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PENGAMBILAN SUMPAAH PNS	2.200.000
			970.001.053 C	PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN SPIRITUAL PEGAWAI	10.000.000
			970.001.053 D	KONSULTASI KEPEGAWAIAN	33.365.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	012.001.052 A	UJI PROFISIENSI	5.000.000
			012.001.052 B	PEMBAHASAN HASIL BAKU PEMBANDING	12.560.000
			012.001.052 C	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM OLEH KAN-BSN	13.760.000
			012.001.052 E	FORUM DISEMINASI HASIL RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	4.630.000
			012.001.052 F	VALIDASI/ REVALIDASI/ VERIFIKASI METODE ANALISIS	50.750.000
			012.001.052 G	KELOMPOK JAMINAN MUTU	20.000.000
			012.001.052 H	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (FOOD SECURITY)	27.160.000
			012.001.052 J	REKALIBRASI/VERIFIKASI PERALATAN LABORATORIUM	96.225.000
			012.001.052 K	PENGADAAN SUKU CADANG, KOLOM, BAKU PEMBANDING, MEDIA MIKRO PIHAK KETIGA/ KASUS, TEST KIT, K3 DAN GAS LAB, REAGEN PREKURSOR/PPI DAN GLASSWARE	793.720.000
			012.001.052 L	PENGADAAN REAGEN/ SUKU CADANG PIHAK KE TIGA/ KASUS	200.000.000
			012.001.052 M	PENGADAAN TEST KIT LOKA	72.500.000
			012.001.053 D	PENGUATAN LABORATORIUM BPOM DALAM JEJARING NASIONAL DAN ASEAN	9.210.000
			012.001.053 E	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	36.840.000
			012.001.053 I	BIMTEK ANALISIS BIDANG PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DI BBPOM BANJARMASIN	13.980.000
			012.001.053 J	PENGADAAN APD/ THERMOMETER SCAN/ HAND SANITIZER/ DESINFECTAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN WABAH COVID 19	78.300.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id


BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	951.001.051 A	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	268.000.000
			951.001.051 B	Pengadaan kendaraan roda 2	57.000.000
			951.001.052 A	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN ALAT KOMUNIKASI/ STUDIO BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN	269.423.000
			951.001.053 A	PENGADAAN SARANA GEDUNG DAN MEUBELAIR BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN	59.534.000
			951.001.054 A	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TAHAP III	994.920.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	994.001.001 A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.231.529.000
			994.001.001 B	Tunjangan Kinerja	6.583.041.000
			994.001.002 A	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	198.000.000
			994.001.002 B	PENGADAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	177.600.000
			994.001.002 C	PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL	196.805.000
			994.001.002 D	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	153.000.000
			994.001.002 E	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	134.040.000
			994.001.002 F	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2	9.750.000
			994.001.002 G	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4/6/10	132.000.000
			994.001.002 H	LANGGANAN DAYA DAN JASA	624.000.000
			994.001.002 I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN	2.192.192.000
			994.001.002 J	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KAB. HULU SUNGAI UTARA	341.682.000
			994.001.002 K	OPERASIONAL PIMPINAN LOKA POM DI KAB. TANAH BUMBU	350.190.000
J U M L A H					
26.704.835.000					

Jakarta, 11 Juni 2020



Drs. H. G. Kakerissa, Apt.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.05.20.1730 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.11.19.6164 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.11.19.6164 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.11.19.6164 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN NOMOR HK.02.02.109.11.19.6164 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 20 MAY 2020

KEPALA,



MUHAMMAD GUNTUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.05.20.1730 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.11.19.6164 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	88,5



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)

KEPALA,



MUHAMMAD GUNTUR

Lampiran 5.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024
(Lampiran Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OLEH BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN								53.400	58.740	64.610	71.080	78.980	
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	80,8	83,6	86,6	90	92,3	749,60	824,56	907,016	997,72	1.097,49	BBPOM di Banjarmasin
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	48,8	53,68	59,05	64,95	71,45	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	49,6	54,56	60,02	66,02	72,62	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	78	80	82	84	86	428,2	471,02	518,12	569,93	626,93	BBPOM di Banjarmasin
			78	80	82	84	86	16,55	18,26	20,03	22,03	24,23	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			78	80	82	84	86	24,11	26,52	29,17	32,09	35,3	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	94	94	94	95	95	93,7	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	6,1	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			94	94	94	95	95	6,2	6,82	7,5	8,25	9,08	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	85	86	87	88	89	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			94	94	94	95	95	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	68	71	74	78	81	84,84	93,32	102,66	112,92	124,21	BBPOM di Banjarmasin
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	86	87,5	89	90,5	92	107,37	118,1	129,91	142,9	157,19	BBPOM di Banjarmasin
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	72	75	77	80	83	85,44	93,98	103,38	113,72	125,09	BBPOM di Banjarmasin
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Kalimantan Selatan	88,5	90,5	91	91,5	92	52,72	57,99	63,79	70,17	77,19	BBPOM di Banjarmasin

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kalimantan Selatan	87	89	91	93	95	70,34	77,37	85,11	93,62	102,98	BBPOM di Banjarmasin
			87	89	91	93	95	27,92	30,71	33,78	37,16	40,87	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			87	89	91	93	95	25,55	28,11	30,92	34,01	37,41	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kalimantan Selatan	55	60	65	70	75	96,32	105,95	116,46	128,2	141,02	BBPOM di Banjarmasin
			55	60	65	70	75	5,46	6,01	6,61	7,27	7,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			55	60	65	70	75	11,8	12,98	14,28	15,71	17,28	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kalimantan Selatan	82	84	86	88	90	77,48	85,23	93,75	103,13	113,44	BBPOM di Banjarmasin
			82	84	86	88	90	14,68	16,15	17,76	19,54	21,49	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			82	84	86	88	90	14,16	15,58	17,13	18,85	20,73	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	20	21	22	23	24	110	121	133,1	146,41	161,05	BBPOM di Banjarmasin
			20	21	22	23	24	16	17,6	19,36	21,29	23,43	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			20	21	22	23	24	37,04	40,74	44,82	49,3	54,23	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
4.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	55	57	60	63	65	539,66	593,62	652,98	718,28	790,11	BBPOM di Banjarmasin
			55	57	60	63	65	16,99	18,69	20,56	22,61	24,87	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			55	57	60	63	65	6,06	6,67	7,34	8,07	8,88	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
4.6	Indeks Pelayanan Publik	Kalimantan Selatan	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	11,72	12,89	14,18	15,59	17,16	BBPOM di Banjarmasin
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang	Kalimantan Selatan	72	75	78	81	85	851	936,1	1.029,71	1.326,68	1.245,95	BBPOM di Banjarmasin
			72	75	78	81	85	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			72	75	78	81	85	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Kalimantan Selatan	20	40	62	82	104	510	561	617,1	678,81	746,69	BBPOM di Banjarmasin
5.3	Jumlah desa pangan aman	Kalimantan Selatan	6	12	19	25	32	800	880	968	1.064,81	1.171,28	BBPOM di Banjarmasin
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan Berbahaya	Kalimantan Selatan	2	4	6	8	10	140	154	169,4	186,34	204,97	BBPOM di Banjarmasin

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	93,7	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
			90	90	91	91	92	6,1	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			90	90	91	91	92	6,2	6,82	7,5	8,25	9,08	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
			90	90	91	91	92	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			90	90	91	91	92	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	81	83	85	88	90	767,85	844,64	929,09	1.022,01	1.124,21	BBPOM di Banjarmasin
			81	83	85	88	90	92,52	101,77	111,94	123,14	135,45	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			81	83	85	88	90	93,25	102,57	112,83	124,11	136,52	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
SK 8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif												
8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	85	89	93	94	95	371,22	408,34	449,18	494,09	543,5	BBPOM di Banjarmasin
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM	Kalimantan Selatan	85	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,2	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			85	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,2	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	80	84	89	91	92	1.514,38	1.665,82	1.832,39	2.015,64	2.217,20	BBPOM di Banjarmasin
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	9,56	10,52	11,57	12,72	13,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			100	100	100	100	100	9,86	10,85	11,93	13,12	14,44	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	7,16	7,88	8,66	9,53	10,48	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			100	100	100	100	100	7,6	7,77	8,55	9,39	10,34	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
SK 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal												
9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Kalimantan Selatan	75	77	80	82	85	384,68	423,15	465,46	512,01	563,21	BBPOM di Banjarmasin
			77	78	80	82	85	57,6	63,36	69,69	76,66	84,33	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			77	78	80	82	85	56,86	62,54	68,79	75,68	83,25	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
	10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Kalimantan Selatan	76	77	78	79	80	9.677,43	1.064,52	1.170,97	1.288,07	1.416,87	BBPOM di Banjarmasin
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Kalimantan Selatan	1,51	2	2,26	2,5	3	17.242,06	18.966,65	20.863,31	22.949,64	25.244,61	BBPOM di Banjarmasin
	SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel												
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	93	94	95	96	97	12.814,57	14.096,03	15.505,63	17.056,19	18.761,81	BBPOM di Banjarmasin
	11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	Kalimantan Selatan	90	92	92	95	95	3.755,28	4.130,81	4.543,89	4.998,28	5.498,10	BBPOM di Banjarmasin
90				92	92	95	95	374,29	411,72	452,89	498,18	547,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
90				92	92	95	95	379,69	417,66	459,42	505,37	555,9	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	

Lampiran 6.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020			Capaian Terhadap Target Tahun 2020	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	946	1212	78,05	96,60
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	349	428	81,54	104,54
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	229	333	68,77	73,16
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	147	185	79,46	93,48
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	-	-	78,36	115,24
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	-	-	96,35	112,03
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	-	-	76,11	105,71
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	-	-	89,18	100,77

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020			Capaian Terhadap Target Tahun 2020	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Internal Process Perspective								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	-	-	81,64	93,84
		IKSK10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	-	-	53,52	97,31
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	1570	1573	99,81	121,72
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	45	123	36,59	182,93
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	325	542	59,96	109,02
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	-	-	3,69	118,65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	-	-	88,80	106,06
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	-	-	16,00	100,00
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	-	-	4,00	100,00
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	-	-	2,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	-	-	97,27	108,08
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	-	-	96,41	107,12
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	-	-	89,69	110,73

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020			Capaian Terhadap Target Tahun 2020	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Learning & Growth Perspective								
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	-	-	74,08	87,15
		IKSK23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	-	-	76,14	95,18
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	-	-	80,16	106,88
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	-	-	67,2	88,42
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	-	-	1,82	120,53
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	-	-	90,96	97,81
		IKSK28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	-	-	100,00	111,11

Lampiran 7.

NPS BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Status	
				Realisasi				
1	2	3	4	7	8	9	9	
Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,60	96,60	Baik
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,54	104,54	104,54	Baik
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	73,16	Cukup
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	93,48	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 1						91,95	91,95	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24	115,24	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 2						115,24	115,24	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03	112,03	Sangat Baik
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71	105,71	Baik
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77	100,77	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 3						106,17	106,17	Baik
Capaian Stakeholder Perspective						104,45	104,45	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2020	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Status	
				Realisasi				
1	2	3	4	7	8	9	9	
Internal Process Perspective								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84	93,84	Baik
		IKSK10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	53,52	97,31	97,31	Baik
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72	120,00	Sangat Baik
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,93	120,00	Sangat Baik
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	109,02	Baik
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	118,65	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 4						120,58	109,80	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06	106,06	Baik
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16,00	100,00	100,00	Baik
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00	100,00	Baik
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00	100,00	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 5						101,51	101,51	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	108,08	Baik
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	107,12	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 6						107,60	107,60	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Tahun 2020	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Status
					Realisasi			
1	2	3		4	7	8	9	9
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	110,73	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 7						110,73	110,73	Sangat Baik
Capaian Internal Process Perspective						110,11	107,41	Baik
Learning & Growth Perspective								
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15	87,15	Baik
		IKSK23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18	95,18	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 8						91,16	91,16	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88	106,88	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 9						106,88	106,88	Baik
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	88,42	Cukup
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	120,00	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 10						104,48	104,21	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81	97,81	Baik
		IKSK28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100,00	111,11	111,11	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 11						104,46	104,46	Baik
Capaian Learning & Growth Perspective						101,74	101,68	Baik
NPS Total						105,43	104,51	Baik

Lampiran 8.

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020
DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2020, TARGET BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020			Target Nasional		Target 2021		Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stakeholder Perspective												
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,60	80,8	96,60	83,6	93,36	92,3	84,56
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,54	104,54	78	104,54	80	101,93	86	94,82
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	85	80,90	94	73,16	95	72,39
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	78	101,87	86	92,39	86	92,39
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24	70	111,94	71	110,37	81	96,74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03	81,7	117,93	87,5	110,11	92	104,73
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71	70	108,73	75	101,48	83	91,70
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77	84	106,17	90,5	98,54	92	96,93

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020			Target Nasional		Target 2021		Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Internal Process Perspective												
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	87	81,64	93,84	87	93,84	89	91,73	95	85,94
		IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	55	53,52	97,31	55	97,31	60	89,20	75	71,36
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72	85	117,42	84	118,82	90	110,90
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,93	50	73,17	21	174,22	24	152,44
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	60	99,94	57	105,20	65	92,25
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	3,33	110,81	3,46	106,65	4,51	81,82
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06	83,73	106,06	85,41	103,97	90,64	97,97
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16,00	100,00	660	2,42	40	40,00	104	15,38
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00	211	1,90	12	33,33	32	12,50
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00	84	2,38	4	50,00	10	20,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	89,5	108,68	90	108,08	92	105,73
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	89,5	107,72	90	107,12	92	104,79
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	76	118,01	83	108,06	90	99,66

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020			Target Nasional		Target 2021		Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Learning & Growth Perspective												
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15	77	96,21	89	83,24	95	77,98
		IKSK23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18	81	94,00	84	90,64	92	82,76
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88	71	112,90	77	104,10	85	94,31
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	73,33	91,64	77	87,27	80	84,00
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	1,51	120,53	2	91,00	3	60,67
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81	93	97,81	94	96,77	97	93,77
		IKSK28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100,00	111,11	100	100,00	92	108,70	95	105,26

Lampiran 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 6

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN NPS BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR/BALAI POM DALAM KLASTER 6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Banjarmasin				Balai Besar POM di Serang				Balai POM di Kendari				Balai POM di Kupang				
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9	
Stakeholder Perspective																			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,60	96,60	80,8	77,23	95,58	95,58	80,8	96,94	119,98	119,98	80,8	91,39	113,11	113,11
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,54	104,54	104,54	78	72,9	93,46	93,46	78	87,54	112,23	112,23	78	84,83	108,76	108,76
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	73,16	72	69,52	96,56	96,56	80	96,31	120,39	120,00	94	87,34	92,91	92,91
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	93,48	60	61,87	103,12	103,12	76	87,72	115,42	115,42	80	72,12	90,15	90,15
Capaian Sasaran Kegiatan 1					91,95	91,95			97,18	97,18			117,00	116,91			101,23	101,23	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24	115,24	71	87,33	123,00	120,00	68	72,6	106,76	106,76	71	68,41	96,35	96,35
Capaian Sasaran Kegiatan 2					115,24	115,24			123,00	120,00			106,76	106,76			96,35	96,35	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03	112,03	82	83,69	102,06	102,06	83	86,81	104,59	104,59	83	89,07	107,31	107,31
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71	105,71	72	79,76	110,78	110,78	69	72,54	105,13	105,13	84	65,82	78,36	78,36
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BOPM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77	100,77	86,5	85,51	98,86	98,86	88,5	68,66	77,58	77,58	85	87,02	102,38	102,38
Capaian Sasaran Kegiatan 3					106,17	106,17			103,90	103,90			95,77	95,77			96,02	96,02	
Capaian Stakeholder Perspective					104,45	104,45			108,03	107,03			106,51	106,48			97,87	97,87	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Banjarmasin				Balai Besar POM di Serang				Balai POM di Kendari				Balai POM di Kupang				
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9	
Internal Process Perspective																			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84	93,84	87	93,91	107,94	107,94	50	57,53	115,06	115,06	90	100	111,11	111,11
		IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	53,52	97,31	97,31	56,6	57,1	100,88	100,88	54,8	45,91	83,78	83,78	50	52,32	104,64	104,64
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72	120,00	83	95,78	115,40	115,40	85	90	105,88	105,88	85	99,07	116,55	116,55
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,93	120,00	42	49,04	116,76	116,76	46	48,51	105,46	105,46	60	40,83	68,05	68,05
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	109,02	55	56,32	102,40	102,40	55	54,6	99,27	99,27	73	70,82	97,01	97,01
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	118,65	3,51	4,25	121,08	120,00	3,51	3,57	101,71	101,71	3,51	3,95	112,54	112,54
Capaian Sasaran Kegiatan 4					120,58	109,80			110,74	110,56			101,86	101,86			101,65	101,65	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06	106,06	85,85	90,66	105,60	105,60	89,49	93,59	104,58	104,58	85,74	92,85	108,29	108,29
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16,00	100,00	100,00	18	18	100,00	100,00	14	14	100,00	100,00	16	17	106,25	106,25
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00	100,00	5	5	100,00	100,00	4	4	100,00	100,00	6	6	100,00	100,00
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00	100,00	1	1	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	3	2,7	90,00	90,00
Capaian Sasaran Kegiatan 5					101,51	101,51			101,40	101,40			101,15	101,15			101,14	101,14	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	108,08	85	98,21	115,54	115,54	92	100	108,70	108,70	90	96,89	107,66	107,66
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	107,12	84	97,76	116,38	116,38	85	98,83	116,27	116,27	90	94,47	104,97	104,97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Banjarmasin				Balai Besar POM di Serang				Balai POM di Kendari				Balai POM di Kupang					
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian		
			4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9	4	7	8	9		
			Capaian Sasaran Kegiatan 6				107,60	107,60			115,96	115,96			112,48	112,48			106,31	106,31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	110,73	55	63,46	115,38	115,38	86	97,73	113,64	113,64	84	101,22	120,50	120,00		
			Capaian Sasaran Kegiatan 7				110,73	110,73			115,38	115,38			113,64	113,64			120,50	120,00
			Capaian Internal Process Perspective				110,11	107,41			110,87	110,83			107,28	107,28			107,40	107,27
			Learning & Growth Perspective																	
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22 Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15	87,15	85	82,71	97,31	97,31	85	73,32	86,26	86,26	85	61,75	72,65	72,65		
		IKSK23 Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18	95,18	81	79,62	98,30	98,30	80	76,23	95,29	95,29	81	77	95,06	95,06		
			Capaian Sasaran Kegiatan 8				91,16	91,16			97,80	97,80			90,77	90,77			83,85	83,85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24 Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88	106,88	75	84,36	112,48	112,48	75	82,8	110,40	110,40	75	85,32	113,76	113,76		
			Capaian Sasaran Kegiatan 9				106,88	106,88			112,48	112,48			110,40	110,40			113,76	113,76
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	88,42	70	76,3	109,00	109,00	72	68,6	95,28	95,28	80	70,3	87,88	87,88		
		IKSK26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	120,00	1,51	2,15	142,38	120,00	1,51	1,45	96,03	96,03	1,51	2,08	137,75	120,00		
			Capaian Sasaran Kegiatan 10				104,48	104,21			125,69	114,50			95,65	95,65			112,81	103,94
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81	97,81	93	91,69	98,59	98,59	93,4	97,31	104,19	104,19	93	89,92	96,69	96,69		
		IKSK28 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100,00	111,11	111,11	88	100	113,64	113,64	95	100	105,26	105,26	90	100	111,11	111,11		
			Capaian Sasaran Kegiatan 11				104,46	104,46			106,11	106,11			104,72	104,72			103,90	103,90
			Capaian Learning & Growth Perspective				101,74	101,68			110,52	107,72			100,39	100,39			103,58	101,36
			NPS Total				105,43	104,51			109,81	108,53			104,73	104,72			102,95	102,17

Lampiran 10.

REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi			
			Target	Realisasi	Anggaran (%)	
1	2	3	5	6	7	
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	687.639.200	687.589.937	99,99
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	376.497.100	376.422.552	99,98
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	85.954.900	85.948.743	99,99
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.677.950	80.661.975	99,98
Anggaran Sasaran Kegiatan 1			1.230.769.150	1.230.623.207	99,99	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	526.079.500	518.227.992	98,51
Anggaran Sasaran Kegiatan 2			526.079.500	518.227.992	98,51	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	108.214.000	108.163.680	99,95
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	45.336.000	45.298.808	99,92
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	44.050.000	44.050.000	100,00
Anggaran Sasaran Kegiatan 3			197.600.000	197.512.488	99,96	
Anggaran Stakeholder Perspective			1.954.448.650	1.946.363.687	98,90	
Internal Process Perspective						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	29.198.000	29.197.040	100,00
		IKSK10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	26.000.000	25.999.962	100,00
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	50.608.000	50.585.000	99,95
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	93.594.000	93.367.098	99,76
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	191.767.000	191.207.209	99,71
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	5.160.000	5.160.000	100,00
Anggaran Sasaran Kegiatan 4			396.327.000	395.516.309	99,80	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	526.079.500	518.227.992	98,51
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	292.928.000	292.827.789	99,97
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	666.460.000	661.659.172	99,28
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	129.550.000	129.417.800	99,90
Anggaran Sasaran Kegiatan 5			1.615.017.500	1.602.132.753	99,20	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi		
				Target	Realisasi	Anggaran (%)
1	2	3		5	6	7
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.954.900	85.948.743	99,99
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80.677.950	80.661.975	99,98
Anggaran Sasaran Kegiatan 6				166.632.850	166.610.718	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	435.478.000	433.385.198	99,52
Anggaran Sasaran Kegiatan 7				435.478.000	433.385.198	99,52
Anggaran Internal Process Perspective				2.613.455.350	2.597.644.978	99,40
Learning & Growth Perspective						
8	Tervujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	142.121.000	141.609.800	99,64
		IKSK23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	1.635.120.000	1.623.415.778	99,28
Anggaran Sasaran Kegiatan 8				1.777.241.000	1.765.025.578	99,31
9	Tervujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	46.065.000	45.664.200	99,13
Anggaran Sasaran Kegiatan 9				46.065.000	45.664.200	99,13
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1.340.919.000	1.340.497.211	99,97
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1.648.877.000	1.033.599.570	62,69
Anggaran Sasaran Kegiatan 10				2.989.796.000	2.374.096.781	79,41
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	12.814.570.000	11.826.459.886	92,29
		IKSK28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	4.509.259.000	4.427.556.862	98,19
Anggaran Sasaran Kegiatan 11				17.323.829.000	16.254.016.748	93,82
Anggaran Learning & Growth Perspective				22.136.931.000	20.438.803.307	92,33
Anggaran Seluruhnya				26.704.835.000	24.982.811.972	93,55

Lampiran 11.


PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Stakeholder Perspective													
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,6	687.639.200	687.589.937	99,99	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
		IKSK02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,54	104,54	376.497.100	376.422.552	99,98	1,05	0,05	100 %	Efisien
		IKSK03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16	85.954.900	85.948.743	99,99	0,73	-0,27	75 %	Tidak Efisien
		IKSK04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48	80.677.950	80.661.975	99,98	0,93	-0,07	75 %	Tidak Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 1					91,95	1.230.769.150	1.230.623.207	99,99	0,92	-0,08	75 %	Tidak Efisien	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24	526.079.500	518.227.992	98,51	1,17	0,17	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 2					115,24	526.079.500	518.227.992	98,51	1,17	0,17	100 %	Efisien	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03	108.214.000	108.163.680	99,95	1,12	0,12	100 %	Efisien
		IKSK07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71	45.336.000	45.298.808	99,92	1,06	0,06	100 %	Efisien
		IKSK08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77	44.050.000	44.050.000	100,00	1,01	0,01	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 3					106,17	197.600.000	197.512.488	99,96	1,06	0,06	100 %	Efisien	
Tingkat Efisiensi Stakeholder Perspective					104,45	1.954.448.650	1.946.363.687	99,59	1,05	0,05	100 %	Efisien	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Internal Process Perspective													
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK09	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84	29.198.000	29.197.040	100,00	0,94	-0,06	75 %	Tidak Efisien
		IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	55	53,52	97,31	26.000.000	25.999.962	100,00	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72	50.608.000	50.585.000	99,95	1,22	0,22	95 %	Efisien
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,95	93.594.000	93.367.098	99,76	1,83	0,83	88 %	Efisien
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02	191.767.000	191.207.209	99,71	1,09	0,09	100 %	Efisien
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,69	118,65	5.160.000	5.160.000	100,00	1,19	0,19	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 4					120,58	396.327.000	395.516.309	99,80	1,21	0,21	95 %	Efisien	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,8	106,06	526.079.500	518.227.992	98,51	1,08	0,08	100 %	Efisien
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	292.928.000	292.827.789	99,97	1,00	0,00	100 %	Efisien
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	666.460.000	661.659.172	99,28	1,01	0,01	100 %	Efisien
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	129.550.000	129.417.800	99,90	1,00	0,00	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 5					101,52	1.615.017.500	1.602.132.753	99,20	1,02	0,02	100 %	75 %	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08	85.954.900	85.948.743	99,99	1,08	0,08	100 %	75 %
		IKSK20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12	80.677.950	80.661.975	99,98	1,07	0,07	100 %	75 %
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 6					107,60	166.632.850	166.610.718	99,99	1,08	0,08	100 %	Efisien	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73	435.478.000	433.385.198	99,52	1,11	0,11	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 7					110,73	435.478.000	433.385.198	99,52	1,11	0,11	100 %	Efisien	
Tingkat Efisiensi Internal Process Perspective					110,11	2.613.455.350	2.597.644.978	99,40	1,11	0,11	100 %	Efisien	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Learning & Growth Perspective													
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15	142.121.000	141.609.800	99,64	0,87	-0,13	75 %	Tidak Efisien
		IKSK23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18	1.635.120.000	1.623.415.778	99,28	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 8						91,17	1.777.241.000	1.765.025.578	99,31	0,92	-0,08	75 %	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88	46.065.000	45.664.200	99,13	1,08	0,08	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 9						106,88	46.065.000	45.664.200	99,13	1,08	0,08	100 %	Efisien
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42	1.340.919.000	1.340.497.211	99,97	0,88	-0,12	75 %	Tidak Efisien
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	1.648.877.000	1.033.599.570	62,69	1,92	0,92	88 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 10						104,48	2.989.796.000	2.374.096.781	79,41	1,32	0,32	95 %	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81	12.814.570.000	11.826.459.886	92,29	1,06	0,06	100 %	Efisien
		IKSK28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100	111,11	4.509.259.000	4.427.556.862	98,19	1,13	0,13	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 11						104,46	17.323.829.000	16.254.016.748	93,82	1,11	0,11	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Learning & Growth Perspective						101,75	22.136.931.000	20.438.803.307	92,33	1,10	0,10	100 %	Efisien
Tingkat Efisiensi Seluruhnya						105,43	26.704.835.000	24.982.811.972	93,55	1,13	0,13	100 %	Efisien

Lampiran 12. SK Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.05.20.1728 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Loka POM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 18 Mei 2020



[Signature]
DR. MUHAMMAD GUNTUR

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.296 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan POM



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 – 2024;

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin serta penetapan RS, RKT, RKA dan PK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 18 MAY 2020

KEPALA,



MUHAMMAD GUNTUR,



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI
BANJARMASIN
NOMOR : HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 - 2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

1. Nama Organisasi : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
 - e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 - f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sam adi bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama :



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	5 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		14 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	15 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		17 Jumlah desa pangan aman
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	22 Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
		23 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan BBPOM di Banjarmasin	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		26 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
		28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

